

**ANALISIS PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENGELOLAAN GEOPARK NATUNA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2025**

**ANALISIS PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENGELOLAAN GEOPARK NATUNA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan



AINUL NURMADIAH

NIM. 2105020010

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2025**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Motto

“Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Jika Allah Menghendaki”

- Qs Yasin : 82

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda. PERCAYA PROSES Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Kata Proses Yang Kamu Anggap Sulit”

- Edwar Satria

Teriring rasa syukur atas rahmat Allah SWT dan syafaat Rasulnya skripsi ini penulis persembahkan untuk malaikat tanpa sayapku, Ibunda tersayang yang selalu memberikan cinta kasih yang tak pernah usai dan mengasihiku setulus hati dan sesuci do'a-nya. Dan kepada Ayahanda yang mengajarkan kemandirian dan kekuatan untuk terus melangkah walau tidak disertai perannya yang penuh. Juga kepada Kakak-Kakakku yang juga memberikan kekuatan dan dukungannya secara moril maupun materil. Serta kepada teman-teman yang memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa. Semua itu menjadi bagian berharga dalam proses ini, untuk itu terima kasih segalanya.

(Ainul Nurmadiyah)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Nurmadiyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2105020010

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Judul Skripsi : Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 4 November 2025

Yang Membuat Pernyataan,



AINUL NURMADIAH
NIM. 2105020010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ainul Nurmadiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2105020010
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam
Pengelolaan Geopark Natuna

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 9 Desember 2025 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

1. **Dr. Wawu Eko Yudiatmaja, S.IP., MPA.** Ketua (.....) NIP/NIDN. 198707012012121002
2. **Dr. Dian Prima Safitri, S.A.P., M.AP.** Anggota 1 (.....) NIP/NIDN. 198506012012122001
3. **Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P.** Anggota 2 (.....) NIP/NIDN. 199211022020121003
4. **Reza Gemilang, S.Si., M.A.B** Anggota 3 (.....) NIP/NIDN. 199706182024061002
5. **Dedy Afrizal, S.Sos., M.Si., Ph.D** Anggota 4 (.....) NIP/NIDN. 198605262025061001

Disahkan Oleh:
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Saved Fauzan Rivadi, S.Sos., IMAS.
NIP. 198207072015041002

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Ainul Nurmadiyah

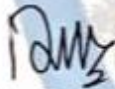
Nomor Induk Mahasiswa : 2105020010

Program Studi/Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : ANALISIS PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENGELOLAAN GEOPARK NATUNA

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal:
Pembimbing Utama,



Dr. Dian Prima Safitri, S.A.P., M.A.P
NIP/NIDN.198506012012122001

Menyetujui, tanggal:
Pembimbing Pendamping,



Charey Ramba Sholeh, S.A.P., M.A.P
NIP/NIDN.19921102202121003

Mengetahui
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Firman, ST., M.A.P
NIP/NIDN.198710032020121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini bukan sekadar sebuah karya ilmiah, tetapi juga hasil dari proses panjang yang penuh dengan pembelajaran. Dalam perjalanan ini, ada begitu banyak tangan yang membantu, begitu banyak hati yang mendukung, dan begitu banyak doa yang mengiringi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan tinggi Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi. ★
2. Bapak Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang memberikan pengembangan dan peningkatan mutu di tingkat pelayanan dan fasilitas fakultas.
3. Bapak Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.SC., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Kajian Film, Televisi, dan Media. Serta Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmunya kepada peneliti sejak masa awal perkuliahan.
4. Bapak Firman, S.T., M.A.P., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan bimbingan.

5. Ibu Dr. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP., selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga sejak awal proses. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.
6. Bapak Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh perhatian telah memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sejak tahap awal penyusunan usulan penelitian hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas dedikasi dalam membimbing sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
7. Bapak Dr. Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP., MPA selaku ketua penguji yang juga telah memberikan masukan, arahan, membimbing serta membantu mengevaluasi skripsi ini agar menjadi lebih baik.
8. Pintu surgaku, Ibunda Rosmawati yang sangat berperan penting dalam hidup penulis dan dalam tahap menyelesaikan program studi yang penulis tempuh. Hanya kata terima kasih yang bisa tersampaikan untuknya atas semua jerih payah, kasih sayang, dukungan moril maupun materil, dan segalanya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
9. Ayahanda, terima kasih atas segala rasa, tantangan, dan rintangan yang telah diberikan sehingga membentuk diri penulis menjadi pribadi yang kuat dan mandiri seperti sekarang ini.

10. Kepada kakak-kakak penulis, Yessimiati dan Sa'dahiyati terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil, juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya dan bertahan sampai saat ini.
11. Kepada keponakan-keponakan tercinta yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala kasih dan tawa yang sudah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan studinya.
12. Teman-teman “Lingkaran” penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, peran, tawa, tangis, kasih dan juga rumah baru yang penuh berbagai rasa bagi penulis untuk berkeluh kesah selama masa studi ini.
13. Kepada HIMANEGARA, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi bagian di dalamnya dan juga berbagai ilmu yang penulis pelajari selama 2 periode.
14. Kepada REACTION, terima kasih atas hadirnya rumah baru dengan orang-orang di dalamnya yang memberikan rasa kasih kepada penulis, dan juga berbagai hal baik yang tidak didapatkan dimanapun sebelumnya bagi penulis.
15. Terakhir, penulis berterima kasih kepada sosok gadis yang selama ini berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil yang memiliki impian besar. Terima kasih kepada diriku sendiri, Ainul Nurmadiyah yang telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan akan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan tanpa rasa ingin menyerah. Walau kadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, atas semua

pencapaianmu yang mungkin tidak dirayakan orang lain, terima kasih untuk segalanya. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun dirimu berada, rayakanlah segala pencapaian dirimu, dan bermanfaatlah bagi orang-orang disekitarmu.

Dengan penuh rasa syukur, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam perjalanan ini. Masukan berupa kritik dan saran akademik sangat diterima demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi langkah akhir dalam studi, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara.

Tanjungpinang, 4 November 2025



Ainul Nurmadiyah
NIM. 2105020010

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, salah satu civitas akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji :

Nama : Ainul Nurmadiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2105020010
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Righth*) atas karya ilmiah saya berjudul:

“Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 4 November 2025



AINUL NURMADIAH
NIM. 2105020010

ANALISIS PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN GEOPARK NATUNA

Oleh:

Ainul Nurmadiyah

NIM. 2105020010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna, serta merumuskan model pengembangan yang efektif berdasarkan pandangan para aktor terkait. Penelitian ini berfokus pada pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna serta pengembangan model ideal yang berkelanjutan bagi kawasan tersebut. Geopark Natuna, yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak 2018, menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola kolaboratif akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta validasi data menggunakan triangulasi sumber. Data dianalisis dengan kerangka teori *stakeholder mapping* (Johnson & Scholes) dan model kolaborasi *Pentahelix* yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN), yang didominasi oleh aparatur pemerintah daerah, merupakan aktor kunci (*key players*) dalam pengelolaan geopark. Masyarakat lokal memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh rendah dalam proses pengambilan keputusan. Model pengembangan ideal yang dihasilkan berlandaskan tiga pilar utama: konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan, dengan rekomendasi penguatan kapasitas SDM lokal serta kemitraan publik-swasta yang lebih terstruktur. Rekomendasi penelitian ini adalah menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat lokal, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi kemitraan publik-swasta.

Kata kunci: Analisis Pemangku Kepentingan, Geopark Natuna, *Pentahelix*, Pengelolaan Berkelanjutan.

ANALYSIS OF STAKEHOLDER MAPPING IN THE MANAGEMENT OF NATUNA GEOPARK

By:

Ainul Nurmadiyah

NIM. 2105020010

ABSTRACT

This study aims to identify the roles, responsibilities, and interests of stakeholders involved in the management of Natuna Geopark, as well as to formulate an effective development model based on the views of relevant actors. This study focuses on mapping stakeholders in the management of Natuna Geopark and developing an ideal sustainable model for the area. Natuna Geopark, which was designated as a National Geopark in 2018, faces various challenges in collaborative governance due to limited resources, coordination between institutions, and low participation from the local community. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation, as well as data validation using source triangulation. The data was analyzed using the stakeholder mapping theoretical framework (Johnson & Scholes) and the Pentahelix collaboration model, which involves the government, private sector, academia, media, and community. The results of the study show that the Natuna Geopark Management Agency (BPGN), which is dominated by local government officials, is a key player in geopark management. Local communities have a high level of interest but little influence in the decision-making process. The ideal development model is based on three main pillars: conservation, education, and sustainable economy, with recommendations to strengthen local human resource capacity and more structured public-private partnerships. The recommendations of this study are to emphasize the importance of strengthening the capacity of local communities, establishing cross-sector coordination forums, and optimizing public-private partnerships.

Keywords: *Stakeholder Analysis, Natuna Geopark, Pentahelix, Sustainable Management.*

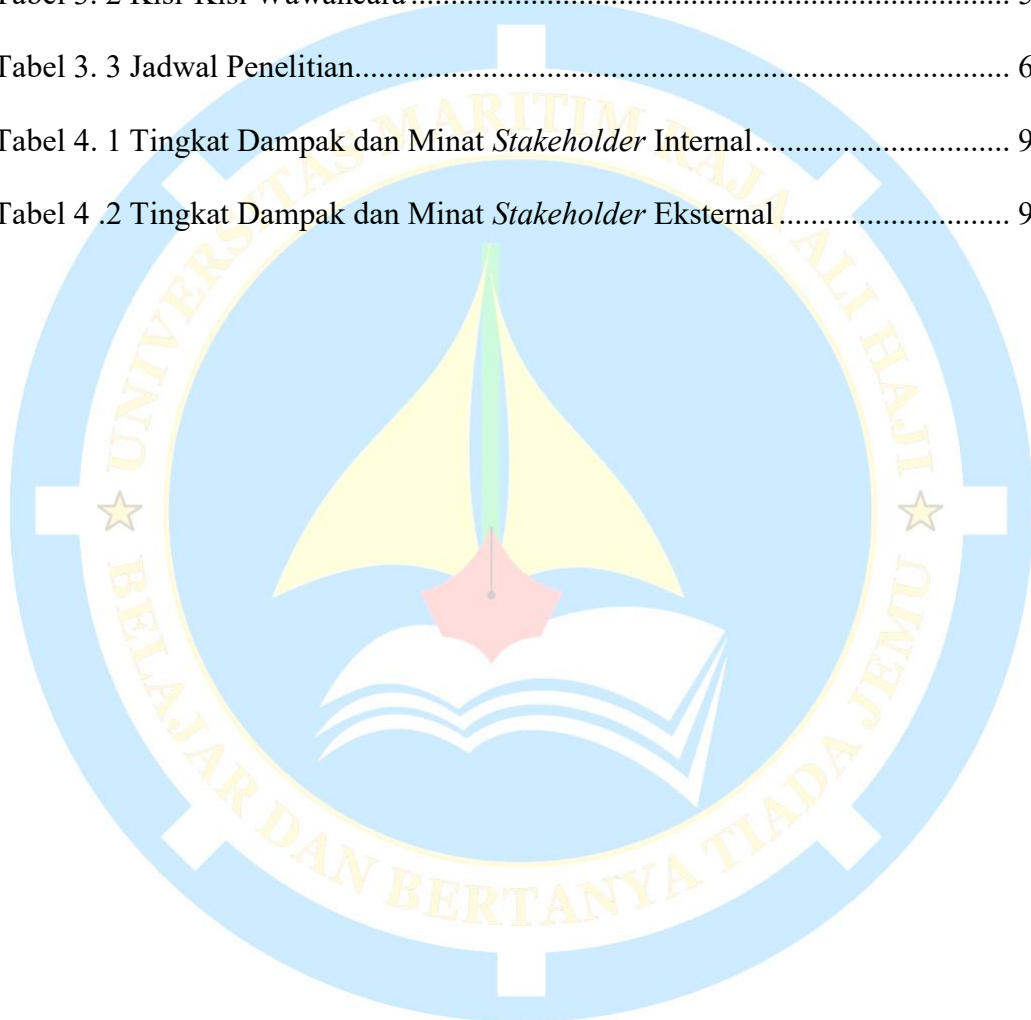
DAFTAR ISI

SAMPUL (<i>COVER</i>)	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.2 Kerangka Teori	21
2.2.1 <i>Stakeholder Mapping</i>	21
2.2.2 <i>Public-Private Partnership (PPPs)</i>	29
2.2.3 Kerangka Pemikiran	45
2.3 Definisi Konsep	46
BAB 3 METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	49

3.3	Fokus Penelitian	50
3.4	Sumber Data	50
3.5	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6	Informan	51
3.7	Teknik Analisis Data	54
3.8	Triangulasi	57
3.9	Konsiderasi Etik	60
3.10	Jadwal Penelitian	60
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum	62
4.1.1	Konteks Historis Geopark Natuna	62
4.1.2	Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Setempat	66
4.1.3	Sumber Daya	68
4.1.4	Tata Kelola Geopark Natuna	70
4.1.5	Struktur Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna	73
4.2	Hasil Penelitian	75
4.2.1	Penentuan Wilayah Pemetaan	75
4.2.2	Identifikasi Kelompok Kepentingan	80
4.2.3	Pengembangan Alat Pemetaan	87
4.2.4	Pemetaan Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Geopark Nasional Natuna	96
4.3	Model Pengembangan Geopark Natuna Menurut Pemangku Kepentingan	101
4.3.1	Model Pengembangan Geopark Natuna Secara Fundamental	101
4.3.2	Model Pengembangan Geopark Natuna dengan Pendekatan Pentahelix	103
4.4	Pembahasan	105
BAB 5 PENUTUP		121
5.1	Kesimpulan	121
5.2	Implikasi Penelitian	124
5.2.1	Implikasi Teori	124
5.2.2	Implikasi Praktis	126
5.3	Saran	128
DAFTAR REFERENSI		132
LAMPIRAN		136

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	52
Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Wawancara	53
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian.....	60
Tabel 4. 1 Tingkat Dampak dan Minat <i>Stakeholder</i> Internal.....	92
Tabel 4 .2 Tingkat Dampak dan Minat <i>Stakeholder</i> Eksternal.....	95



DAFTAR GAMBAR

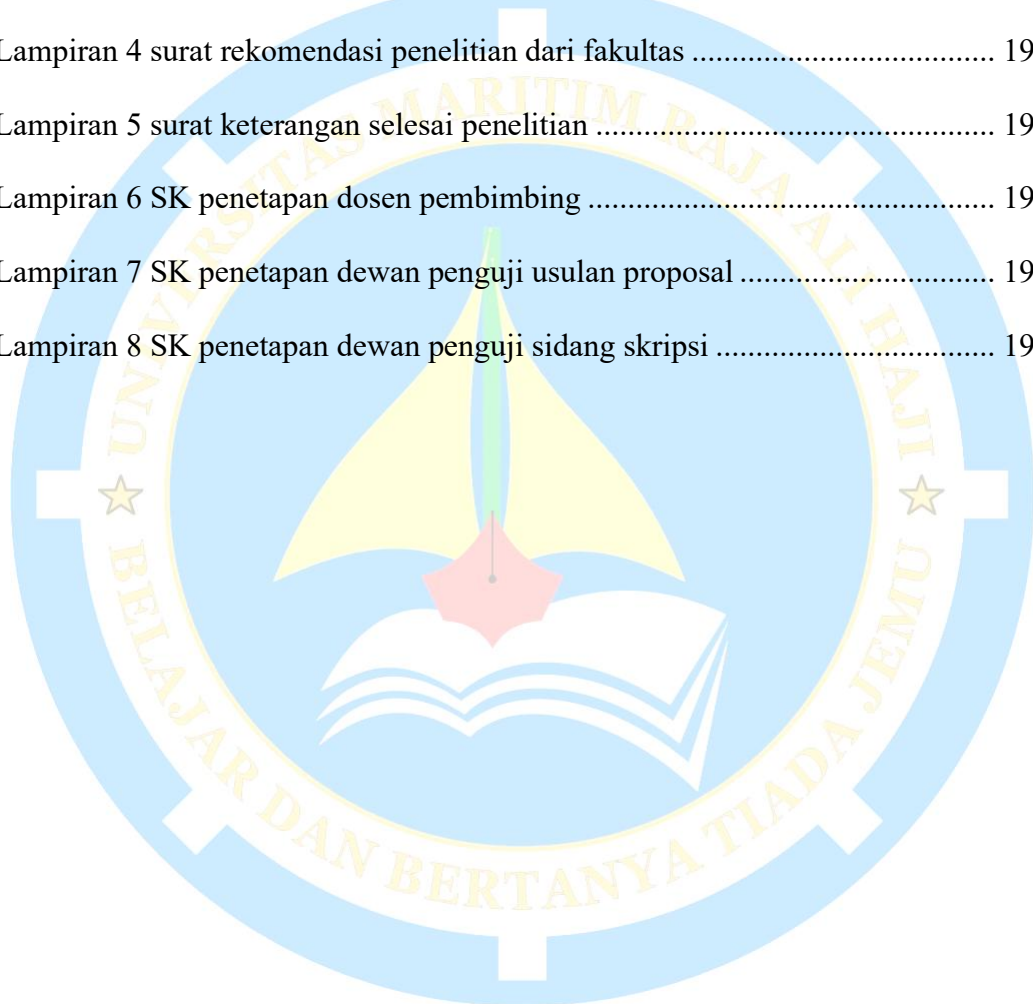
Gambar 1. 1 Logo Geopark Natuna	2
Gambar 1. 2 Struktur Pengurus BPGN Natuna Periode 2024-2026	4
Gambar 1. 3 Struktur Pengurus NGYF Periode 2024-2026	5
Gambar 1. 4 Data Statistik Kunjungan Wisatawan Natuna Pada 2019-1023	10
Gambar 2. 1 Algoritma yang diusulkan untuk pemetaan pemangku kepentingan lokal.....	23
Gambar 2. 2 Daftar objek yang terjadi di area pemetaan.....	25
Gambar 2. 3 Contoh penetapan jenis objek ke host	25
Gambar 2. 4 Matriks G.Johnson dan K. Scholes	27
Gambar 2. 5 Struktur Kontrak Manajemen.....	33
Gambar 2. 6 Struktur Kontrak Sewa.....	36
Gambar 2. 7 Struktur Kontrak BOT.....	38
Gambar 2. 8 Struktur Kontrak Konsesi.....	42
Gambar 2. 9 Struktur Kontrak Patungan.....	44
Gambar 3. 1 Analisis Data Spiral (Creswell, 2007).....	56
Gambar 3. 2 Cara Melakukan Triangulasi Sumber.....	59
Gambar 3. 3 Cara Melakukan Triangulasi Teknik.....	59
Gambar 4. 1 Peta Geopark Natuna.....	65
Gambar 4. 2 Gambar project map Pemetaan Wilayah.....	76
Gambar 4. 3 Kerjasama antar Stakeholder melalui Konsep Pentahelik.....	80
Gambar 4. 4 Gambar project map Identifikasi Kelompok Kepentingan	81

Gambar 4. 5 Gambar project map Pengembangan Alat Pemetaan	87
Gambar 4. 6 Matriks Pengaruh Kepentingan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Geopark Natuna.....	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 transkrip wawancara	136
Lampiran 2 hasil olah data NVIVO	187
Lampiran 3 dokumentasi wawancara/turun lapangan.....	188
Lampiran 4 surat rekomendasi penelitian dari fakultas	192
Lampiran 5 surat keterangan selesai penelitian	193
Lampiran 6 SK penetapan dosen pembimbing	194
Lampiran 7 SK penetapan dewan penguji usulan proposal	196
Lampiran 8 SK penetapan dewan penguji sidang skripsi	198



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan Geopark, namun masih ada kekurangan dalam pemetaan pemangku kepentingan yang spesifik dan terperinci dalam konteks Geopark Natuna. Pada penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek pengembangan geowisata dan strategi pengelolaan secara umum, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai peran, tanggung jawab, dan juga interaksi antara pemangku kepentingan yang terlibat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Geopark Natuna, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat tentang konsep geopark, juga belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur yang ada. Penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif pemetaan pemangku kepentingan dan strategi pengelolaan yang efektif serta berkelanjutan di Geopark Natuna.

Geopark (Taman Bumi) merupakan wilayah geografis tunggal yang menyatu. Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan dengan luas tertentu secara berkelanjutan yang memadukan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*), dan budaya (*culturaldiversity*) (Muzhaffar, 2022). Dalam pengembangannya, konsep ini berpijak pada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan nilai ekonomi. Geopark ini merupakan sebuah konsep baru,

yang dikembangkan oleh kementerian pariwisata. Konsep geopark mengacu kepada pengembangan kawasan yang berdasarkan kepada aktivitas konservasi, edukasi, dan peningkatan (Mustajadli & Junriana, 2023).

Menurut (Yanuar et al., 2018) geopark adalah kawasan dengan keunikan geologi (*outstanding geology*) yang memiliki nilai arkeologi, ekologi, dan budaya dengan melibatkan masyarakat setempat untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan tersebut. Wilayah Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 29 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia yang diberi nama “Geopark Natuna”. Dengan ditetapkannya wilayah Natuna sebagai Geopark Natuna maka sangat penting adanya pengelolaan, agar pengelolaan tersebut efektif maka akan sangat dibutuhkan juga peran pemangku kepentingan didalamnya.

Gambar 1. 1 Logo Geopark Natuna



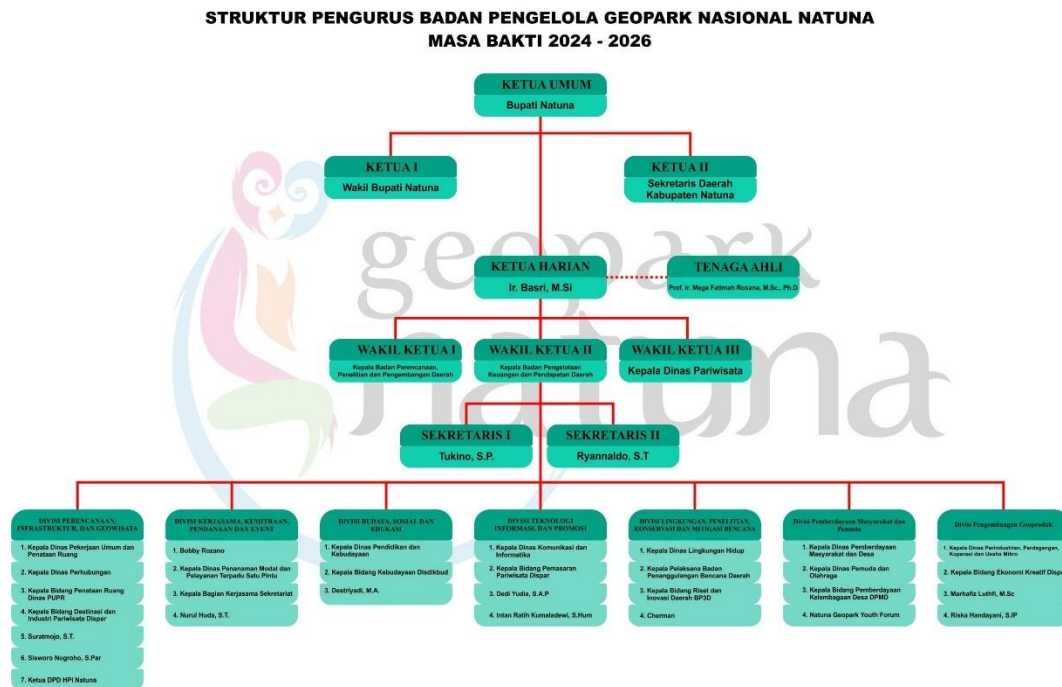
Sumber : (Logo Geopark Natuna, 2020)

Desain logo Geopark Natuna diatas berupa siluet hewan endemik Natuna yaitu “Kekah Natuna” atau disebut dalam bahasa latin “*Presbytis Natunae*”.

Hewan tersebut banyak dijumpai di Pulau Bunguran yang merupakan habitat aslinya. Logo Geopark Natuna terdiri dari perpaduan berbagai warna yang memiliki filosofi masing-masing. Akan tetapi secara keseluruhan makna filosofis dari Logo Geopark Natuna tersebut menggambarkan tentang keragaman geologi, biologi dan budaya yang dikembangkan dengan memperhatikan pelestariannya, mengedukasi tiap generasi serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (*Logo Geopark Natuna*, 2020).

Upaya memajukan pariwisata Kabupaten Natuna kedepan, Bupati Natuna telah membentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini yang dijadikan dalam satu wadah organisasi baru yaitu BPGN (Badan Pengelola Geopark Natuna). Pembentukan BPGN ini untuk mendukung wilayah Natuna yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Geopark Nasional berkembang dan juga menerapkan semangat kolaborasi dalam pembangunan yang berkelanjutan (Mustajadli & Junriana, 2023).

Gambar 1. 2 Struktur Pengurus BPGN Natuna Periode 2024-2026

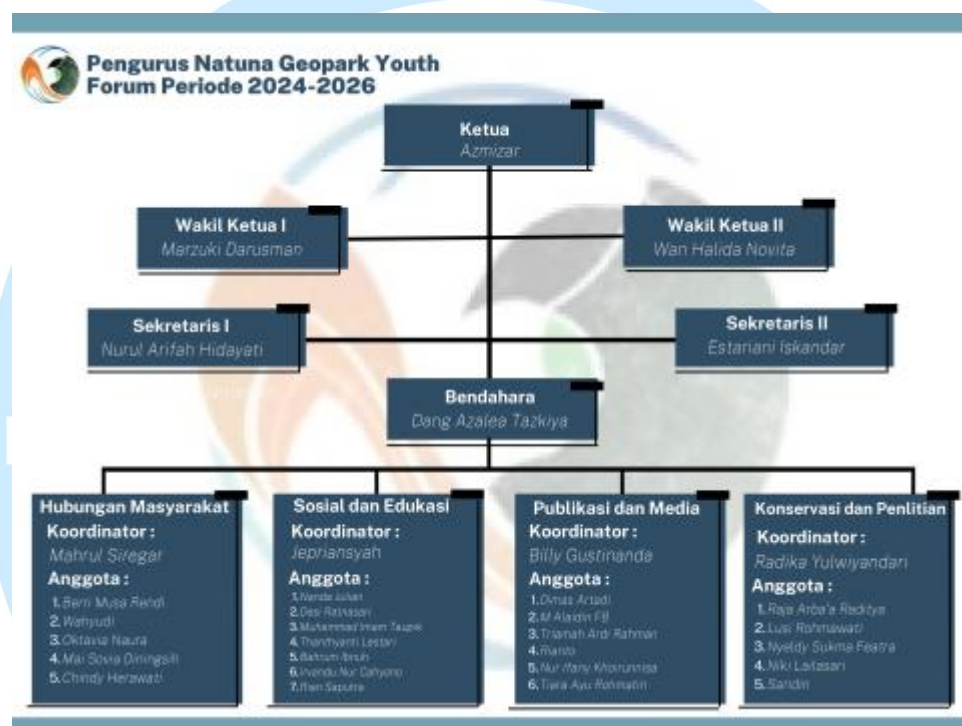


Sumber : (Profil Geopark Natuna, 2025.)

Dukungan terhadap program Geopark Nasional Natuna, terutama pada sektor pemberdayaan masyarakat pemuda, dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 15 tahun 2020 tentang RAN Pengembangan Geopark 2021-2025 dimana ada keterlibatan pemuda didalamnya, ketua BPGN Natuna membentuk Natuna Geopark Youth Forum (NGYF). Pembentukan kepengurusan secara resmi ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BPGN Natuna nomor 1 pada bulan April 2022 tentang Pengurus Natuna Geopark Youth Forum (NGYF). Natuna Geopark Youth Forum (NGYF) melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung BPGN dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Geopark Nasional Natuna (Mustajadli & Junriana, 2023). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada aspek pariwisata, tetapi juga mencakup

pendidikan, pelatihan, dan juga promosi kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian selain BPGN, NGYF diharapkan juga dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan Geopark Natuna serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Gambar 1. 3 Struktur Pengurus NGYF Periode 2024-2026



Sumber : (Profil Geopark Natuna, 2025.)

Pengelolaan suatu destinasi pariwisata menuntut adanya penguatan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif demi menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tersebut (Eddyono, F., 2021). Pengelolaan Geopark Natuna sangat memerlukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) didalamnya agar bisa berkembang dan juga maju. Freeman & Phillips (2002)

memberikan definisi *stakeholder* secara sederhana dapat dipahami sebagai pihak yang dapat terpengaruh dan/atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan. Jika dikaitkan dalam konteks kebijakan publik, maka pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak individu atau kelompok yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi sebuah kebijakan publik (Sartika & Yogopriyatno, 2024). Dengan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna itu sangat penting, mengingat keberagaman kepentingan dan perspektif yang ada. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, maupun sektor swasta, pengelolaan Geopark Natuna dapat dilakukan secara lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan, tetapi juga akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap keberadaan Geopark, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pengelolaan sangat membutuhkan proses pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dimaksudkan untuk mengetahui pihak yang terlibat serta bagaimana peran dan posisi pihak tersebut dalam penyusunan regulasi sampai dengan pelaksanaan dan pemantauan sehingga dapat mengevaluasi capaian dari pihak tersebut. Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung apabila terdapat regulasi yang tidak sesuai. Dalam buku (*World Bank Group*, 2022) manajemen destinasi yang sukses sangat bergantung pada

kolaborasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat guna menghasilkan dampak ekonomi yang inklusif bagi penduduk setempat. Sedangkan (Said, F., Haerul, & Farid, R. S., 2023) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di kawasan geopark sangat ditentukan oleh koordinasi yang efektif antar berbagai aktor kunci dalam menjalankan program pengembangan yang telah direncanakan secara terpadu. Selain itu (Adiansyah et al., 2024), pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) berfungsi untuk mengidentifikasi posisi peran dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi dengan menempatkan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dengan peran yang kuat dan tidak memiliki peran serta pengaruh dan juga menempatkan pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai pembantu atau penunjang dari pengelolaan yang dalam hal ini pengelolaan Geopark Natuna (Adiansyah et al., 2024).

Teori stakeholder yang disampaikan oleh Freeman (1984) bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam teorinya ini menekankan pentingnya memahami kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, yang mencakup tidak hanya pemilik atau manajemen, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam operasi organisasi. Teori ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap

semua pemangku kepentingan, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. (Kurniansah, R., Dkk, 2024) mengatakan bahwa keberhasilan dalam pembangunan sebuah destinasi pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pihak pengelola untuk mengintegrasikan peran dari setiap pemangku kepentingan guna memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola destinasi yang inovatif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan (Nasution, S., 2025). Maka dari itu, hubungan antara pemangku kepentingan dapat membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengarah pada pengembangan teknik pemetaan dan analisis pemangku kepentingan yang dalam pengelolaan dan juga kebijakan publik (Sartika & Yogopriyatno, 2024).

Matriks kepentingan dan pengaruh yang dikembangkan oleh Johnson dan Scholes (1999) adalah alat analisis yang membagi pemangku kepentingan menjadi empat kategori berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap proyek. Kategori tersebut yakni pemangku kepentingan utama, yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi, sehingga memerlukan kerja sama yang erat. Pemangku kepentingan yang perlu diperhatikan, yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemangku kepentingan yang perlu diberikan informasi, memiliki kepentingan rendah tetapi pengaruh tinggi, sehingga harus tetap

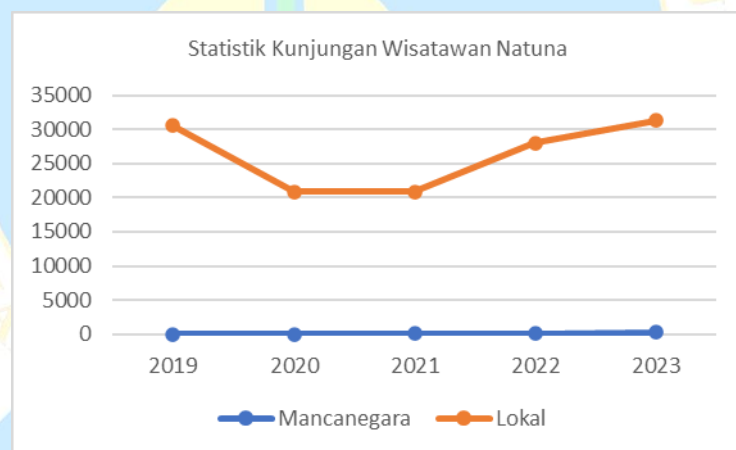
diinformasikan mengenai perkembangan proyek. Dan pemangku kepentingan yang tidak terlalu penting, yang memiliki kepentingan dan pengaruh rendah, sehingga perhatian terhadapnya dapat diminimalkan. Dengan menggunakan matriks ini, organisasi dapat merumuskan strategi komunikasi dan keterlibatan yang lebih efektif untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan proyek (Adiansyah et al., 2024).

Geopark Natuna memiliki luas wilayah sekitar 141.901,02 hektar, yang terdiri dari 13 kecamatan dan 75 desa/kelurahan, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/GL.01/MEM.G/2023 di Natuna terdapat 15 lokasi warisan geologi, 5 diantaranya (Pulau Senua, Gunung Ranai, Batu Kasah, Pulau Akar, dan Pulau Setanau) telah ditetapkan sebagai geosite (Ryannaldo & Intan Ratih, 2024). Wilayah ini memiliki keanekaragaman geologi yang tinggi, dengan formasi batuan yang berusia jutaan tahun, gua-gua karst yang indah, dan pantai-pantai yang eksotis.

Geopark Natuna juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, dengan berbagai jenis flora dan fauna endemik. Keberadaan spesies-spesies tersebut tidak hanya menambah nilai ekologis, tetapi juga memberikan potensi untuk penelitian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat lokal di Geopark Natuna memiliki budaya yang khas, dengan tradisi maritim yang kuat dan kearifan lokal yang tinggi. Dalam hal ini Geopark Natuna memerlukan pengelolaan dengan peran-peran pemangku kepentingan didalamnya untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan, dengan

mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan keanekaragaman geologi dan hayati yang ada di Geopark Natuna (*Profil Geopark Natuna*, n.d.). Prinsip utama pariwisata berkelanjutan adalah kemampuannya dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal (Rampai, 2023). Pariwisata berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga harus memastikan adanya distribusi manfaat sosio-ekonomi yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan guna menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal secara jangka panjang (Astuti, N. W. W., Dkk, 2024).

Gambar 1. 4 Data Statistik Kunjungan Wisatawan Natuna Pada 2019-2023



Sumber : (*Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna*, 2023.)

Pengelolaan Geopark Natuna masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah memiliki kepentingan dan peran yang berbeda-beda dalam pengelolaan geopark. Peran masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil merupakan pilar fundamental dalam membangun daya saing sebuah destinasi,

karena mereka mampu menghadirkan produk dan layanan yang memiliki nilai autentisitas serta keunikan khas daerah bagi para wisatawan (Susanty, S., Dkk, 2024). Selain itu, Geopark Natuna juga menghadapi keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengelola geopark. Masyarakat lokal juga memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep geopark. Banyak masyarakat lokal yang belum memahami manfaat geopark bagi mereka (Mustajadli & Junriana, 2023). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan geopark, sehingga koordinasi antar pemangku kepentingan pun kurang dan dapat menimbulkan konflik serta menghambat pengelolaan geopark yang efektif (Ryannaldo & Intan Ratih, 2024) . Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai geopark, serta memperkuat koordinasi anantara semua pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah diperoleh, sehingga selaku rumus permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pemetaan, peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna?
2. Bagaimana model pengembangan Geopark yang ideal menurut pemangku kepentingan yang terhubung dengan Geopark Natuna?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna, dan juga untuk memahami peran, kepentingan, dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas model pengembangan Geopark yang ideal menurut pemangku kepentingan yang terhubung dalam pengelolaan Geopark Natuna agar pengelolaannya efektif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma berpikir dalam penelitian tentang pemetaan pemangku kepentingan selanjutnya. Penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait aspek pemetaan dalam pemangku kepentingan itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pemikiran peneliti selanjutnya dan juga pembaca penelitian ini, dan menjadi referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian karya ilmiah serta sebagai bahan untuk proses perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam 5 bab. Pada bab 1 dalam penelitian ini menjelaskan fenomena masalah yang terjadi dan berkaitan dengan topik

penelitian ini yaitu tentang pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna. Di dalam bab 1 ini terdapat latar belakang yang disusun dari umum ke khusus. Pada bab ini peneliti juga menyajikan fakta dan artikel ilmiah terdahulu yang menjelaskan terkait topik penelitian yang akan peneliti lakukan, sehingga peneliti mengambil topik penelitian mengenai pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna di Kabupaten Natuna berdasarkan fakta dan sumber ilmiah terdahulu. Pada bab ini juga menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian dengan topik tersebut. Selain itu juga terdapat fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana pemetaan, peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan yang berkaitan dalam pengelolaan Geopark Natuna dan juga bagaimana model pengembangan Geopark yang ideal bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Pada bab 2 terdapat kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang menjadi literatur review yang digunakan untuk menjadi penguatan penelitian dengan topik ini dilakukan. Didalam bab ini juga terdapat teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Stakeholder Mapping*. Pada bab 2 ini juga terdapat kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan juga terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga pada bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

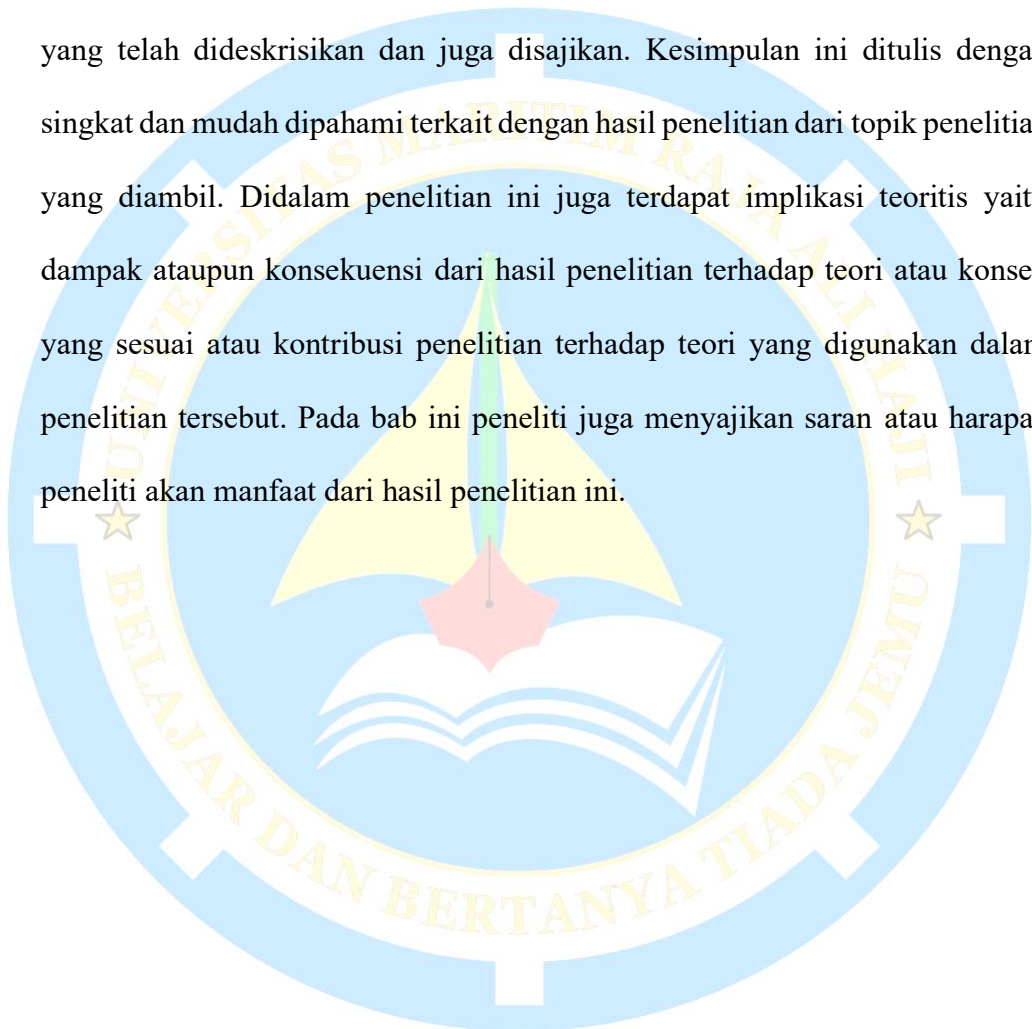
Pada bab 3 berisi metode penelitian yang menjelaskan jenis dari penelitian ini. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena melalui

penelitian mendalam. Pada bab ini juga menjelaskan objek dan lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, informan atau narasumber untuk mendapatkan data penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Dijelaskan juga didalam bab ini mengenai triangulasi data yaitu agar data yang didapat asli dan dapat dipercaya, konsiderasi etik yang menjamin kerahasiaan data yang didapatkan. Diakhir bab ini juga terdapat jadwal penelitian yang menggambarkan waktu kegiatan penelitian dilaksanakan.

Bab 4 menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang artinya pada bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan terkait pemetaan pemangku kepentingan yang berkaitan terhadap pengelolaan Geopark Natuna dan juga pembahasan jawaban dari rumusan masalah. Pada sub bab pertama di bab ini menjelaskan konteks historis mengenai Geopark Natuna pada Geosite Tapak Natuna dan juga Alif Stone. Dalam bab ini juga akan menjelaskan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar Geosite tersebut. Pada sub bab selanjutnya menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan Geopark Natuna dan juga lembaga-lembaga atau pemangku kepentingan apa saja yang ikut mengelola Geopark tersebut. Selanjutnya pada bab ini juga akan menjelaskan peran dan juga tanggung jawab pemangku kepentingan yang bersangkutan dalam pengelolaan Geopark Natuna dan juga Sumber daya apa saja yang berpengaruh dalam mengelola Geopark Natuna tersebut. Pada sub bab selanjutnya di dalam bab ini akan menjelaskan

model pengembangan yang ideal dalam pengelolaan Geopark Natuna tersebut. Pada bab ini akan diakhiri dengan pembahasan sesuai dengan teori dan juga penelitian terdahulu dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah didapatkan peneliti.

Bab 5 dalam penelitian ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan juga disajikan. Kesimpulan ini ditulis dengan singkat dan mudah dipahami terkait dengan hasil penelitian dari topik penelitian yang diambil. Didalam penelitian ini juga terdapat implikasi teoritis yaitu dampak ataupun konsekuensi dari hasil penelitian terhadap teori atau konsep yang sesuai atau kontribusi penelitian terhadap teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada bab ini peneliti juga menyajikan saran atau harapan peneliti akan manfaat dari hasil penelitian ini.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjadi bahan referensi dan menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	Pemetaan Peran Serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram dengan Pendekatan <i>Stakeholder Analysis</i> . (Adiansyah et al., 2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat DLH Kota Mataram, Perkim Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, dan PUPR Kota Mataram di kuadran I yang bertanggung jawab dalam mengelola RTH publik di Kota Mataram.	Penelitian ini memetakan bagaimana stakeholder terlibat dalam pemeliharaan RTH Kota Mataram.
2.	Strategi Pengembangan Geotrail dalam Upaya Pengembangan Geowisata di Geopark Natuna, Kabupaten Natuna. (Ramzis & Eka Puspita, 2024)	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Geotrail di Geopark Natuna menawarkan peluang besar untuk pengembangan geowisata yang berkelanjutan.	Penelitian ini mengidentifikasi potensi atraksi geowisata yang ada pada Geopark Natuna, mengidentifikasi hubungan antar elemen atraksi geowisata, serta menemukan konsep geotrail di Geopark Natuna.
3.	Rencana Aksi Badan Pengelola Kawasan	Penelitian ini menjelaskan bahwa	Penelitian ini melihat memberikan

	Geopark Kabupaten Natuna dalam Pengembangan Pariwisata Menuju UNESCO Global Geopark (UGGp). (Mustajadli & Junriana, 2023)	dari dimensi pedoman pelaksanaan ditemukan masih banyak temuan dari rencana aksi yang telah direncanakan, hal ini disebabkan oleh kelemahan di sektor anggaran yang masih mengandalkan dana CSR.	pengetahuan <i>Action Plan</i> dari BPKGN sebagai badan yang berwenang yang direncanakan dalam pengelolaan geopark untuk meningkatkan status geopark nasional Natuna menjadi <i>UNESCO Global Geopark</i> .
4.	<i>Geotourism Potensial on Geoheritage in Natuna Geopark</i> . (Ryannaldo & Intan Ratih, 2024)	Penelitian ini menunjukkan terdapat lima situs geoheritage yang layak untuk dikembangkan menjadi objek dan daya tarik geowisata.	Penelitian ini menilai potensi geowisata, terutama dari aspek warisan geologi.
5.	<i>Collaborative Mapping on Sustainable Development Goals in Latin America UNESCO Global Geopark: A Methodological Discussion</i> . (Rosado-González et al., 2023)	Penelitian ini mengatakan bahwa memungkinkan untuk menentukan strategi baru yang terlibat, dalam distribusi spesial yang lebih homogen.	Penelitian ini mengidentifikasi dan mendiskusikan distribusi spesial dan teritorial dari konsep “geopark”.
6.	<i>Evaluation of Geosites from the Perspective of Geopark Management: the Example of Proposed Zemplin Geopark</i> . (Molokáč et al., 2023)	Penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi semacam itu di seluruh fase proses pembentukan geopark.	Penelitian ini mengevaluasi geosite dari sudut pandang manajemen geopark dengan mempertimbangkan kebutuhan geopark tersebut.
7.	<i>Structure of Sustainable Management of Geopark through Multi-Criteria Methods</i> (Kornecká et al., 2024)	Penelitian ini mendefinisikan tiga bidang utama manajemen, seperti manajemen pemasaran, manajemen kerja sama, dan manajemen destinasi.	Penelitian ini mengklarifikasi isu-isu pengelolaan geopark, dan mendefinisikan wilayah pengelolaan yang berasal dari fungsi-fungsi esensial geopark.

8.	<i>Stakeholder Mapping dalam Formulasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau.</i> (Sartika & Yogopriyatno, 2024)	Penelitian ini menunjukkan dominasi aktor pemerintah dalam proses formulasi kebijakan, sementara keterlibatan aktor non-pemerintah dan masyarakat masih terbatas.	Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran serta posisi pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau.
9.	<i>A Method for Stakeholder Mapping in Connection Implementation of a Development Project.</i> (Styk & Bogacz, 2022)	Penelitian ini menyajikan algoritma yang dimulai dengan identifikasi kelompok pemangku kepentingan, melalui penentuan tingkat kepentingan dan pengaruh, diakhiri dengan pembangunan matriks yang menunjukkan perlunya melakukan kegiatan komunikasi tertentu.	Penelitian ini menyajikan metode pemetaan pemangku kepentingan yang merupakan ide metodis independen yang dapat diimplementasikan di perusahaan mana pun.
10.	Pemetaan dan Analisis Pemangku Kepentingan Terbarukan Industri Energi di Indonesia. (<i>Pemetaan Dan Analisis Pemangku Kepentingan Industri Energi Terbarukan Di Indonesia, 2023.</i>)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sempurna, mengingat industri energi terbarukan masih cukup minim, terutama dalam kondisi penurunan harga minyak saat ini.	Penelitian ini memberikan analisis pemangku kepentingan terhadap para pelaku di sektor energi terbarukan dan berkelanjutan di Indonesia secara keseluruhan.
11.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Obyek Wisata Bantaran Sungai Bedog Dusun Santan Kabupaten Bantul. (Tisnawati & Setyowati, 2024)	Penelitian ini mengidentifikasi struktur organisasi yang lebih efektif, peningkatan keterampilan manajerial pengelola, serta terbentuknya rencana aksi kolaboratif antar pemangku	Penelitian ini meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok pengelola pariwisata melalui pendampingan strategis agar mampu mengelola potensi wisata bantaran sungai

		kepentingan dalam mempromosikan destinasi wisata lokal.	secara mandiri dan berkelanjutan.
12.	Implementasi <i>Community-Based Tourism</i> Sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. (Tohopi et al., 2025)	Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh penguatan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal, serta optimalisasi manajemen strategi yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.	Penelitian ini mengeksplorasi implementasi konsep <i>Community-Based Tourism</i> (CBT) sebagai strategi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
13.	Analisis <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo. (Masrurun & Nastiti, 2023)	Penelitian ini memetakan aktor-aktor ke dalam matriks <i>Power-Interest</i> , mengidentifikasi dominasi peran pemerintah daerah sebagai aktor kunci (<i>key players</i>), serta mengungkap adanya tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antar-lembaga yang menghambat optimalisasi pengembangan kawasan.	Penelitian ini mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mendeskripsikan hubungan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kawasan strategis pariwisata guna memperkuat daya saing destinasi.
14.	Pengembangan Geopark Nasional Indonesia Menuju <i>UNESCO Global Geopark</i> Sebagai Diplomasi <i>Geotourism</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi menjadi <i>UNESCO Global Geopark</i> efektif dalam meningkatkan standar perlindungan warisan	Penelitian ini menganalisis urgensi dan peluang pengembangan status Geopark Nasional menjadi <i>UNESCO Global Geoparks</i>

	Indonesia. (Hutabarat, 2023)	geologi, memperluas jejaring internasional, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat melalui promosi <i>geotourism</i> yang lebih masif.	(UGGp) sebagai instrumen diplomasi pariwisata dan strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan di Indonesia.
15.	<i>New Era Of Tourism: Innovative Transformation Through Industry 4.0 And Sustainability.</i> (Bratić et al., 2025)	Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi seperti <i>Big Data</i> , <i>Internet of Things</i> (IoT), dan kecerdasan buatan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman wisatawan, tetapi juga menjadi alat krusial dalam memantau serta mengurangi dampak lingkungan demi tercapainya pariwisata berkelanjutan.	Penelitian ini meninjau literatur mengenai integrasi teknologi Industri 4.0 dengan prinsip keberlanjutan dalam sektor pariwisata guna memahami bagaimana transformasi digital dapat menciptakan model pariwisata yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sumber : (Olahan Peneliti, 2025)

Tabel penelitian terdahulu diatas menunjukkan fokus yang kuat pada pengelolaan Geopark Natuna, meliputi analisis potensi geowisata dan strategi pengembangan geotrail (Ramzis & Eka Puspita, 2024; Ryannaldo & Intan Ratih, 2024), serta evaluasi rencana aksi menuju UNESCO Global Geopark (UGGp) yang terkendala masalah pendanaan (Mustajadli & Junriana, 2023). Studi lain membahas aspek manajerial Geopark secara umum, seperti evaluasi geosite dan struktur manajemen berkelanjutan. Secara terpisah, sejumlah penelitian menggunakan pendekatan Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Mapping*) dalam konteks pengelolaan RTH, sampah, dan energi terbarukan, yang umumnya

menyoroti peran dominan pemerintah (Adiansyah et al., 2024; Sartika & Yogopriyatno, 2024). GAP utama yang teridentifikasi adalah belum adanya penelitian komprehensif yang secara eksplisit menerapkan dan menganalisis peran serta keterlibatan pemangku kepentingan (termasuk non-pemerintah) secara detail dalam konteks pengelolaan dan pengembangan Geopark Natuna, terutama setelah tantangan pendanaan yang terungkap. Oleh karena itu, Novelty yang dapat diangkat adalah analisis mendalam mengenai dinamika, posisi, dan strategi keterlibatan pemangku kepentingan (misalnya menggunakan matriks kekuasaan-kepentingan) untuk mengoptimalkan pendanaan non-pemerintah dan implementasi program di Geopark Natuna menuju UGGp, menghubungkan metodologi *stakeholder mapping* (Styk & Bogacz, 2022) dengan isu pengembangan Geopark.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Stakeholder Mapping

(Styk & Bogacz, 2022) mengatakan bahwa metode pemetaan dalam standar memiliki tingkat keumuman yang tinggi, tanpa mengusulkan algoritma tindakan atau alat yang terperinci untuk digunakan. Oleh karena itu para ahli tersebut mengembangkan system bertahap yang diusulkan dalam standar, untuk menguraikannya secara lebih rinci dan untuk menyesuaikan alat dengan kebutuhan melibatkan pemangku kepentingan dalam hal operasional, terutama dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan lokal. Ada beberapa tahap pemetaan pemangku kepentingan pada saat yang sama, berfungsi sebagai panduan untuk proses ini. Langkah 1 menyangkut penentuan area pemetaan, yaitu demarkasi area proyek tempat penelitian akan dilakukan. Langkah 2 melibatkan demarkasi

kelompok pemangku kepentingan di area penelitian. Kemudian, pada Langkah 3, diusulkan untuk membangun alat yang dengannya pemetaan akan dilakukan dengan cara standar, memastikan pengulangan kegiatan dan hasilnya akan memungkinkan definisi yang lebih mudah tentang cara melibatkan pemangku kepentingan. Langkah 4 terdiri dari menetapkan tingkat dampak dan minat kepada kelompok pemangku kepentingan, di mana awalnya tingkat minat dan dampak pemangku kepentingan harus ditentukan dan kemudian, atas dasar ini, matriks harus dibangun yang menyajikan kedua set informasi ini, berkat itu tingkat keterlibatan masing-masing kelompok akan diketahui. Langkah terakhir, kelima dari algoritma yang diusulkan adalah meringkas studi dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan menarik yang efektif.

a. Penentuan Wilayah Pemetaan

Penentuan area pemetaan sangat tergantung pada proyek yang dilakukannya pemetaan. Area dasar, ketat, adalah area fungsi proyek bersama dengan apa yang disebut "area bantalan pengaman" yang dipahami sebagai area di sekitar lokasi proyek, yang radiusnya harus berkisar dari beberapa hingga beberapa kilometer dalam kasus proyek lokal. Solusi terbaik adalah menandai area proyek lokal di peta dan kemudian menggambar area aman dengan radius tertentu. Seluruh area kemudian diterima untuk dianalisis.

Gambar 2. 1 Algoritma yang diusulkan untuk pemetaan pemangku kepentingan lokal

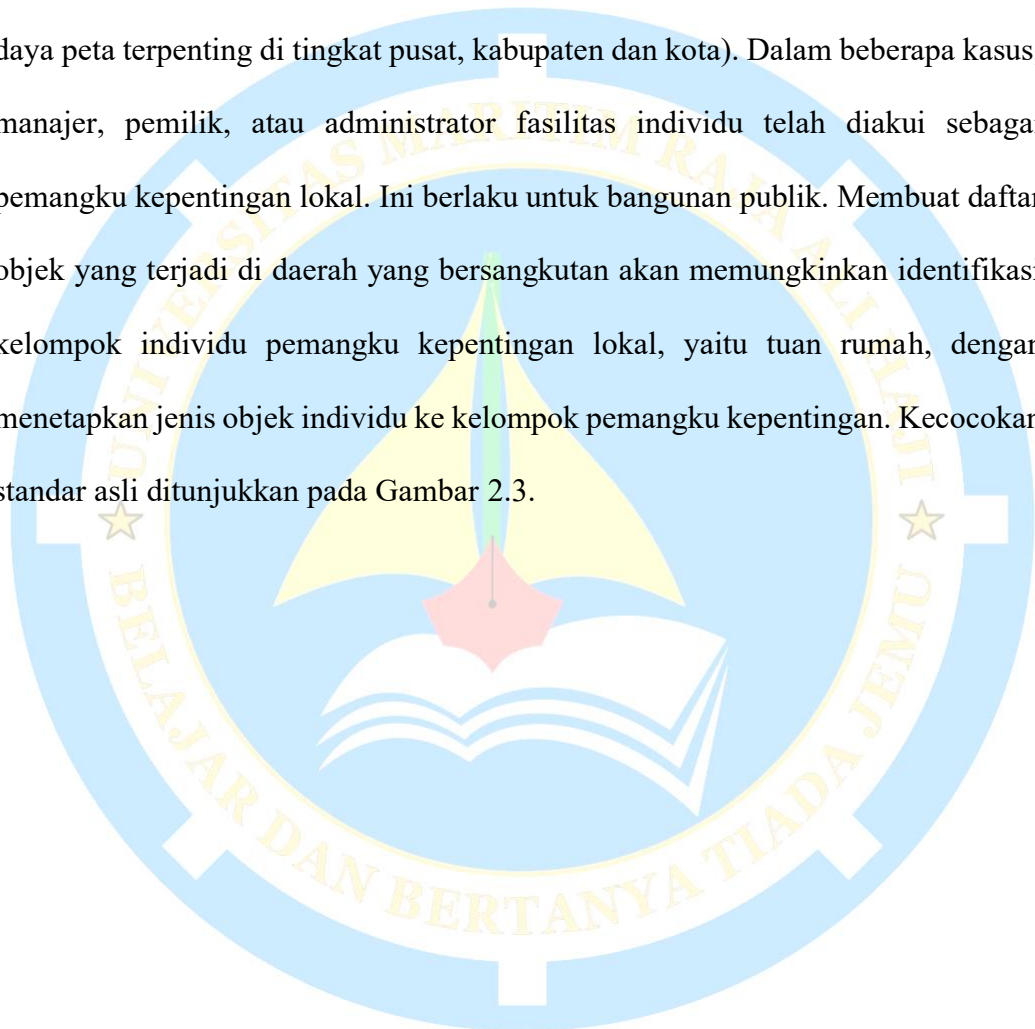


Sumber : (Styk & Bogacz, 2022)

b. Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan

Di seluruh area yang diplot, kelompok pemangku kepentingan diidentifikasi. Tindakan ini harus dimulai dengan identifikasi jenis objek yang terjadi di daerah tersebut dan didasarkan pada dokumen yang ada, seperti, misalnya: kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam keseluruhan strategi organisasi (yaitu, pemangku kepentingan strategis), rencana penggunaan lahan lokal, atau laporan (misalnya, tentang dampak organisasi terhadap lingkungan). Para penulis juga mengusulkan untuk menggunakan daftar objek standar yang diusulkan (Gambar 2.2), yang merupakan hasil analisis yang dilakukan sebagai bagian dari studi tentang akumulasi objek di area operasi tertentu dari salah satu perusahaan

pertambangan terkemuka di Polandia, yang dipesan oleh perusahaan ini. Objek yang dimaksud diidentifikasi berdasarkan informasi tentang kualifikasi generik yang digunakan oleh Kantor Statistik Pusat Polandia, yang juga konsisten dengan sistematika pajak Kantor Statistik Eropa. Hal ini juga tercermin dalam sistem Geoportal (portal milik Kantor Pusat Geodesi dan Kartografi, menyajikan sumber daya peta terpenting di tingkat pusat, kabupaten dan kota). Dalam beberapa kasus, manajer, pemilik, atau administrator fasilitas individu telah diakui sebagai pemangku kepentingan lokal. Ini berlaku untuk bangunan publik. Membuat daftar objek yang terjadi di daerah yang bersangkutan akan memungkinkan identifikasi kelompok individu pemangku kepentingan lokal, yaitu tuan rumah, dengan menetapkan jenis objek individu ke kelompok pemangku kepentingan. Kecocokan standar asli ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 2 Daftar objek yang terjadi di area pemetaan

1	Residential buildings	8	Sports and recreation facilities
2	Public buildings	9	Enterprises and stores
3	Schools	10	Churches and chapels
4	Kindergartens and nurseries	11	Roads
5	Fire brigades	12	Environmental protection
6	Culture centers	13	Monuments
7	County, municipal and city / town governments	14	Water courses

Sumber : (Styk & Bogacz, 2022)

Gambar 2. 3 Contoh penetapan jenis objek ke host

Facility type	HOST
Residential buildings	Residents
County, municipal and city / town governments	Local administration
Culture centers	

Sumber : (Styk & Bogacz, 2022)

c. Pengembangan Alat Pemetaan

Matriks/tabel (dibuat menggunakan perangkat lunak apa pun) adalah alat universal yang diusulkan oleh penulis seperlunya dalam proses pemetaan, yang, menurut mereka, dapat disesuaikan oleh organisasi mana pun dengan kebutuhannya sendiri dan dengan kekhususan proyek. Namun, penting bahwa tabel ini memiliki judul yang sesuai yang akan distandarisasi dan akan memungkinkan kompilasi yang

konsisten. Sebagai bagian dari alat, penulis mengusulkan untuk memasukkan informasi dasar di bagian header—nama proyek, lokasi utama proyek, cakupan (area dasar dinyatakan dalam kilometer persegi atau hektar)—dan, di bagian yang sesuai, item berikut: nama kota, jenis objek, tuan rumah, akumulasi di area tersebut, perwakilan pemangku kepentingan (data pribadi, telepon, email, alamat), deskripsi, komentar.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke tabel. Di era Internet, memperoleh informasi yang disebutkan di atas biasanya tidak menjadi masalah dan ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum yang diposting, misalnya, di situs web perusahaan yang dianalisis atau media lokal, di jejaring sosial perusahaan yang dianalisis dan komunitas lokal atau di media atau forum Internet lokal atau tematik, di mana masalah yang terkait dengan perusahaan yang dipertimbangkan dapat didiskusikan. Jika terjadi kekurangan informasi, harus ditentukan apakah data ini penting untuk hasil dalam hal studi keseluruhan dan, jika perlu, penelitian lapangan harus dilakukan, misalnya, melalui percakapan langsung dengan karyawan kantor kota, menghitung objek, terlibat dalam dialog dengan pemilik atau pemimpin opini di bidang ini.

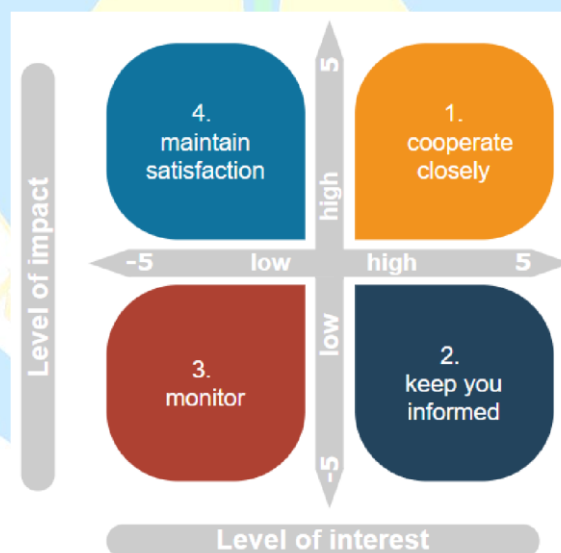
d. Pemetaan

Studi ini membutuhkan penentuan tingkat minat dan dampak pemangku kepentingan dan, kemudian, kompilasi ringkasan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana melibatkan pemangku kepentingan. Para penulis mengusulkan

untuk menggunakan matriks yang dikembangkan oleh G. Johnson dan K. Scholes (Gambar 2.4), yang membagi pemangku kepentingan menjadi empat kelompok :

- Pemangku kepentingan utama yang sangat tertarik dengan situasi di perusahaan dan memiliki dampak yang sangat besar terhadapnya
- Pemangku kepentingan yang sangat tertarik dengan situasi di perusahaan tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadapnya
- Pemangku kepentingan yang tidak tertarik dengan situasi perusahaan dan memiliki pengaruh minimal terhadapnya
- Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perusahaan tetapi tidak tertarik dengan situasinya

Gambar 2. 4 Matriks G.Johnson dan K. Scholes



Sumber : (Styk & Bogacz, 2022)

Matriks G. Johnson dan K. Scholes memiliki skala mulai dari -5 hingga $+5$ pada kedua sumbu yang masing-masing menunjukkan tingkat minat dan tingkat

dampak, di mana -5 berarti tidak ada dampak atau minat dalam bentuk apa pun dan $+5$ berarti tingkat dampak atau minat yang tinggi.

Berdasarkan matriks G. Johnson dan K. Scholes yang, seperti yang disebutkan sebelumnya, membagi pemangku kepentingan menjadi empat kelompok dalam hal tingkat dampak dan minat mereka (Gambar 2.4), pengetahuan diperoleh tentang pendekatan yang efektif terhadap masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Atas dasar ini, dimungkinkan untuk membuat rencana untuk keterlibatan masing-masing kelompok, tergantung pada posisi mereka dalam matriks. Kelompok-kelompok berikut dibedakan dalam matriks:

- Kelompok 1, dampak tinggi dan minat tinggi : ini adalah pemangku kepentingan utama yang harus menjalin kerja sama erat karena paling sering, pemangku kepentingan ini adalah sumber risiko terbesar bagi proyek. Komunikasi yang tepat dan kerja sama yang erat memungkinkan kita untuk meminimalkan risiko ini atau bahkan mengubahnya menjadi “aset”.
- Kelompok 2, dampak rendah dan minat tinggi : para pemangku kepentingan ini harus diberi tahu tentang kegiatan yang dilakukan karena hasil proyek itu sendiri relatif netral. Kelompok ini tidak menimbulkan masalah tetapi, karena dampaknya yang tinggi, kepuasan mereka harus menjadi perhatian. Dimungkinkan juga untuk menggunakan hubungan dengan kelompok ini untuk mengelola atau membangun hubungan dengan kelompok lain.

- Kelompok 3, dampak rendah dan minat rendah : para pemangku kepentingan ini harus diberi tahu tentang kemajuan proyek dan dipantau kemungkinan perubahan sikap mereka.
- Kelompok 4, dampak tinggi dan minat rendah : pemangku kepentingan ini harus tetap puas karena mereka dapat memberikan informasi tentang tahap akhir proyek.

Berdasarkan informasi ini, akan lebih mudah dan lebih efektif untuk menentukan jenis kegiatan dan memilih saluran komunikasi dengan masing-masing pemangku kepentingan.

2.2.2 *Public-Private Partnership (PPPs)*

Istilah *Public-Private Partnership* (PPPs) (Klaus Felsing, 2008) menggambarkan berbagai kemungkinan hubungan antara entitas publik dan swasta dalam konteks infrastruktur dan layanan lainnya. Istilah lain yang digunakan untuk jenis kegiatan ini adalah partisipasi sektor swasta (PSP) dan privatisasi. Meskipun ketiga istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, namun terdapat perbedaan. KPS menyajikan kerangka kerja yang-sambil melibatkan sektor swasta-mengakui dan menyusun peran pemerintah dalam memastikan bahwa kewajiban sosial terpenuhi dan keberhasilan reformasi sektor dan investasi publik tercapai. KPS yang kuat mengalokasikan tugas, kewajiban, dan risiko di antara mitra publik dan swasta dengan cara yang optimal. Mitra publik dalam KPS adalah entitas pemerintah, termasuk kementerian, departemen, kotamadya, atau badan usaha milik negara. Mitra swasta dapat berasal dari lokal atau internasional dan dapat mencakup bisnis atau investor dengan keahlian teknis atau keuangan yang relevan

dengan proyek. Dalam perkembangannya, KPS juga dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan/atau organisasi berbasis masyarakat (Ormas) yang mewakili para pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari proyek tersebut. KPS yang efektif mengakui bahwa sektor publik dan swasta masing-masing memiliki keunggulan tertentu, relatif terhadap yang lain, dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kontribusi pemerintah dalam PPP dapat berupa modal untuk investasi (tersedia melalui pendapatan pajak), pengalihan aset, atau komitmen lain atau kontribusi barang dan jasa yang mendukung kemitraan. Pemerintah juga memberikan tanggung jawab sosial, kesadaran lingkungan, pengetahuan lokal, dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan politik. Peran sektor swasta dalam kemitraan ini adalah memanfaatkan keahliannya dalam bidang perdagangan, manajemen, operasi, dan inovasi untuk menjalankan bisnis secara efisien. Mitra swasta juga dapat memberikan kontribusi modal investasi tergantung pada bentuk kontrak. Struktur kemitraan harus dirancang untuk mengalokasikan risiko kepada mitra yang paling mampu mengelola risiko tersebut dan dengan demikian meminimalkan biaya sekaligus meningkatkan kinerja (Klaus Felsing, 2008).

Teori PPPs (Klaus Felsing, 2008) ini memiliki beberapa indikator yang tersedia untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dengan cermat kapasitas lokal yang tersedia untuk mengimplementasikan opsi-opsi yang lebih kompleks. Masing-masing indikator memiliki karakteristik yang berbeda untuk dinilai berdasarkan tujuan reformasi sektor. 6 indikator diantaranya adalah :

- a. *Service contracts* (kontrak layanan)
- b. *Management contracts* (kontrak manajemen)
- c. *Affermage or lease contracts* (kontrak afiliasi atau sewa)
- d. *Build-Operate-Transfer (BOT) and similar arrangements* (bangun-gunaserah (BOT) dan pengaturan serupa)
- e. *Concessions* (konsesi)
- f. *Join ventures* (patungan)
- a. *Service Contracts* (Kontrak Layanan)

Di bawah kontrak jasa, pemerintah (otoritas publik) mempekerjakan perusahaan atau entitas swasta untuk melaksanakan satu atau lebih tugas atau layanan tertentu untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1-3 tahun. Otoritas publik tetap menjadi penyedia utama layanan infrastruktur dan hanya mengontrak sebagian operasinya kepada mitra swasta. Mitra swasta harus melakukan layanan dengan biaya yang disepakati dan biasanya harus memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh sektor publik. Pemerintah umumnya menggunakan prosedur penawaran kompetitif untuk memberikan kontrak layanan, yang cenderung bekerja dengan baik mengingat periode terbatas dan sifat kontrak ini yang didefinisikan secara sempit.

Di bawah kontrak layanan, pemerintah membayar mitra swasta biaya yang telah ditentukan untuk layanan tersebut, yang dapat didasarkan pada biaya satu kali, biaya satuan, atau dasar lainnya. Oleh karena itu, keuntungan kontraktor meningkat jika dapat mengurangi biaya operasionalnya, sekaligus memenuhi standar layanan yang diperlukan. Salah satu opsi pembiayaan

melibatkan formula biaya-plus-biaya, di mana biaya seperti tenaga kerja ditetapkan, dan mitra swasta berpartisipasi dalam sistem bagi hasil. Mitra pribadi biasanya tidak berinteraksi dengan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendanai investasi modal apa pun yang diperlukan untuk memperluas atau meningkatkan sistem.

Kontrak layanan biasanya paling cocok di mana layanan dapat didefinisikan dengan jelas dalam kontrak, tingkat permintaan cukup pasti, dan kinerja dapat dipantau dengan mudah. Kontrak layanan memberikan opsi berisiko relatif rendah untuk memperluas peran sektor swasta. Kontrak layanan dapat berdampak cepat dan substansial pada operasi dan efisiensi sistem, dan menyediakan kendaraan untuk transfer teknologi dan pengembangan kapasitas manajerial. Kontrak layanan seringkali bersifat jangka pendek, memungkinkan persaingan berulang di sektor ini. Hambatan masuk juga rendah mengingat hanya layanan diskrit yang ditawarkan. Penawaran mempertahankan tekanan pada kontraktor untuk mempertahankan biaya rendah, sementara hambatan masuk yang rendah mendorong partisipasi dalam kompetisi.

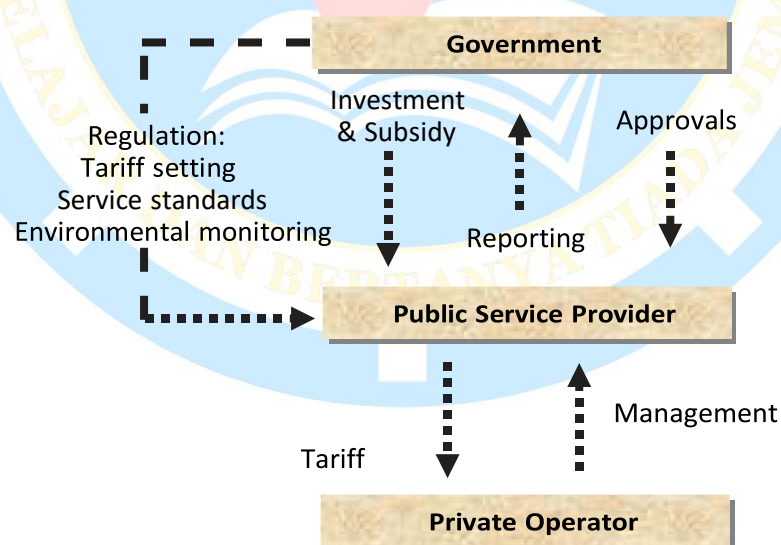
Kontrak jasa tidak cocok jika tujuan utamanya adalah untuk menarik investasi modal. Kontrak dapat meningkatkan efisiensi dan dengan demikian melepaskan beberapa pendapatan untuk tujuan lain, tetapi kontraktor tidak berkewajiban untuk memberikan pembiayaan. Efektivitas kontraktor dapat, pada kenyataannya, terganggu jika sumber pembiayaan lain (dari pemerintah atau donor, misalnya) tidak terwujud. Fakta bahwa aktivitas kontraktor bersifat terpisah dan terpisah dari operasi perusahaan yang lebih luas dapat berarti bahwa

tidak ada dampak yang lebih luas atau lebih dalam pada operasi sistem, hanya perbaikan yang diskrit dan terbatas. Sektor publik tetap bertanggung jawab atas penetapan tarif dan aset, yang keduanya rentan secara politik dan penting untuk mempertahankan sistem.

b. *Management Contracts* (Kontrak Manajemen)

Kontrak manajemen memperluas layanan yang akan dikontrak untuk mencakup sebagian atau semua manajemen dan pengoperasian layanan publik (yaitu, utilitas, rumah sakit, otoritas pelabuhan, dll.). Meskipun kewajiban akhir untuk penyediaan layanan tetap berada di sektor publik, kontrol dan wewenang manajemen harian diberikan kepada mitra atau kontraktor swasta. Dalam kebanyakan kasus, mitra swasta menyediakan modal kerja tetapi tidak ada pembiayaan untuk investasi.

Gambar 2. 5 Struktur Kontrak Manajemen



Sumber : (Klaus Felsing, 2008)

Kontraktor swasta dibayar tarif yang telah ditentukan untuk tenaga kerja dan biaya operasional lainnya yang diantisipasi. Untuk memberikan insentif untuk peningkatan kinerja, kontraktor dibayar jumlah tambahan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Atau, kontraktor manajemen dapat dibayar bagian dari keuntungan. Sektor publik mempertahankan kewajiban untuk investasi modal besar, terutama yang terkait dengan perluasan atau peningkatan sistem secara substansial. Kontrak tersebut dapat menentukan kegiatan diskrit yang akan didanai oleh sektor swasta. Mitra swasta berinteraksi dengan pelanggan, dan sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan tarif. Namun, kontrak manajemen biasanya akan meningkatkan sistem keuangan dan manajemen perusahaan dan keputusan mengenai tingkat layanan dan prioritas dapat dibuat secara lebih komersial.

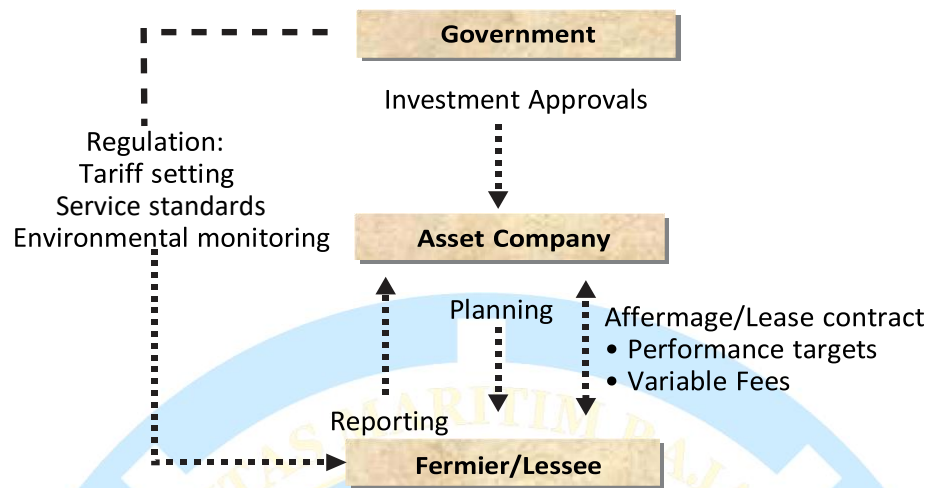
Keuntungan utama dari opsi ini adalah bahwa banyak keuntungan operasional yang dihasilkan dari manajemen sektor swasta dapat dibuat tanpa mentransfer aset ke sektor swasta. Kontrak tidak terlalu sulit untuk dikembangkan daripada yang lain dan bisa kurang kontroversial. Kontraknya juga relatif murah karena lebih sedikit staf yang dikirim ke utilitas dari operator swasta. Kontrak manajemen juga dapat dilihat sebagai pengaturan sementara, memungkinkan perbaikan sederhana sementara kontrak dan struktur yang lebih komprehensif dikembangkan. Demikian pula, kontrak manajemen dapat disusun untuk secara bertahap melibatkan keterlibatan sektor swasta yang semakin luas dari waktu ke waktu dan seiring kemajuan yang ditunjukkan.

Pemisahan antara kewajiban untuk layanan dan manajemen, di satu sisi, dan perencanaan pembiayaan dan ekspansi, di sisi lain, adalah hal yang rumit. Ada risiko bahwa kontraktor manajemen tidak menikmati otonomi atau otoritas (atas angkatan kerja, misalnya) yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang mendalam dan langgeng. Jika operator dibayar sebagian dari keuntungan atau diberikan pembayaran insentif, pengamanan diperlukan untuk mencegah inflasi pencapaian yang dilaporkan atau pemeliharaan sistem yang kurang untuk meningkatkan keuntungan.

c. *Affermage or Lease Contracts* (Kontrak Afiliasi atau Sewa)

Di bawah kontrak sewa, mitra swasta bertanggung jawab atas layanan secara keseluruhan dan menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan kualitas dan standar layanan. Kecuali untuk investasi baru dan pengganti, yang tetap menjadi tanggung jawab otoritas publik, operator menyediakan layanan dengan biaya dan risikonya. Durasi kontrak sewa biasanya selama 10 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Tanggung jawab untuk penyediaan layanan dialihkan dari sektor publik ke sektor swasta dan risiko keuangan untuk operasi dan pemeliharaan ditanggung sepenuhnya oleh operator sektor swasta. Secara khusus, operator bertanggung jawab atas kerugian dan hutang konsumen yang belum dibayar. Sewa tidak melibatkan penjualan aset ke sektor swasta.

Gambar 2. 6 Struktur Kontrak Sewa



Sumber : (Klaus Felsing, 2008)

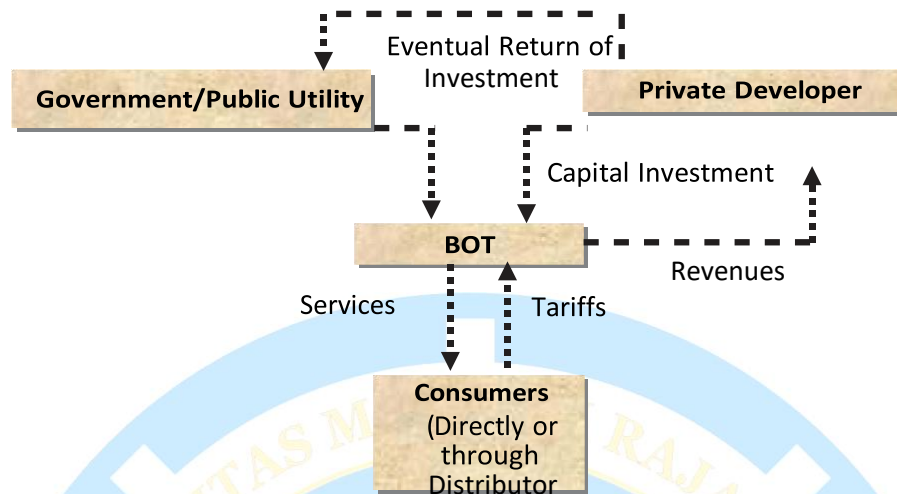
Di bawah pengaturan ini, pembentukan awal sistem dibiayai oleh otoritas publik dan dikontrak dengan perusahaan swasta untuk operasi dan pemeliharaan. Bagian dari tarif ditransfer ke otoritas publik untuk melayani pinjaman yang diajukan untuk membiayai perluasan sistem. Affermage mirip, tetapi tidak identik, dengan kontrak sewa. Tidak seperti sewa di mana sektor swasta mempertahankan pendapatan yang dikumpulkan dari pelanggan dan melakukan pembayaran sewa tertentu kepada otoritas kontraktor, affermage memungkinkan sektor swasta untuk mengumpulkan pendapatan dari pelanggan, membayar otoritas kontraktor biaya affermage, dan mempertahankan sisa pendapatan. Hubungan bisa lebih menarik bagi mitra pribadi karena mengurangi beberapa risiko yang terkait dengan pemulihan penjualan berbiaya rendah. Biaya affermage biasanya merupakan tarif yang disepakati per setiap unit yang terjual.

Di bawah kontrak sewa dan *affermage*, keuntungan mitra swasta bergantung pada penjualan dan biaya utilitas. Keuntungan utama dari opsi ini adalah memberikan insentif bagi operator untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan penjualan yang lebih tinggi. Kelemahan utama adalah risiko manajemen mengurangi tingkat pemeliharaan aset berumur panjang, terutama di tahun-tahun akhir kontrak, untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, mitra swasta memberikan biaya untuk menutupi biaya penggunaan aset meskipun mitra swasta tidak memberikan modal investasi. Masalah utama dalam beralih dari kontrak layanan dan manajemen ke sewa adalah bahwa pendapatan kontraktor berasal dari pembayaran pelanggan dan, karenanya, pertanyaan tentang tingkat tarif menjadi semakin sensitif. Ini mungkin memerlukan penataan dan revisi pengaturan tarif yang kompleks. Selain itu, tanggung jawab investasi modal tetap berada di tangan pemerintah dan tidak ada modal investasi swasta yang dimobilisasi.

d. *Build-Operate-Transfer and Similar Arrangements* (Membangun-Mengoperasikan-Transfer dan Pengaturan Serupa)

BOT dan pengaturan serupa adalah semacam konsesi khusus di mana perusahaan swasta atau konsorsium membiayai dan mengembangkan proyek infrastruktur baru atau komponen utama sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 2. 7 Struktur Kontrak BOT



Sumber : (Klaus Felsing, 2008)

Di bawah BOT, mitra swasta menyediakan modal yang diperlukan untuk membangun fasilitas baru. Yang penting, operator swasta sekarang memiliki aset untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh kontrak—cukup untuk memberi waktu kepada pengembang untuk memulihkan biaya investasi melalui biaya pengguna. Sektor publik setuju untuk membeli tingkat output minimum yang dihasilkan oleh fasilitas, yang cukup untuk memungkinkan operator memulihkan biayanya selama operasi. Kesulitan muncul jika sektor publik telah melebih-lebihkan permintaan dan menemukan dirinya membeli output di bawah perjanjian semacam itu ("ambil-atau-bayar") ketika permintaan tidak ada. Atau, utilitas distribusi mungkin membayar biaya kapasitas dan biaya konsumsi, sehingga berbagi risiko permintaan antara mitra publik dan swasta. BOT umumnya membutuhkan paket pembiayaan yang rumit untuk mencapai jumlah pembiayaan yang besar dan periode pembayaran yang panjang yang diperlukan.

Pada akhir kontrak, sektor publik mengambil alih kepemilikan tetapi dapat memilih untuk memikul tanggung jawab operasional, mengontrak tanggung jawab operasi kepada pengembang, atau memberikan kontrak baru kepada mitra baru. Perbedaan antara pengaturan tipe BOT dan konsesi—seperti yang digunakan di sini—adalah bahwa konsesi umumnya melibatkan perluasan dan pengoperasian sistem yang ada, sedangkan BOT umumnya melibatkan investasi "greenfield" besar yang membutuhkan pembiayaan luar yang substansial, baik untuk ekuitas maupun utang. Namun, dalam praktiknya, kontrak konsesi dapat mencakup pengembangan komponen baru utama serta perluasan sistem yang ada, dan BOT terkadang melibatkan perluasan fasilitas yang ada.

★ Ada banyak variasi pada struktur BOT dasar termasuk *build-transfer-operate* (BTO) di mana transfer ke pemilik publik terjadi pada akhir konstruksi daripada akhir kontrak dan *build-own-operate* (BOO) di mana pengembang membangun dan mengoperasikan fasilitas tanpa mengalihkan kepemilikan ke sektor publik. Di bawah kontrak desain-bangun-operasi (DBO), kepemilikan tidak pernah berada di tangan pribadi. Sebagai gantinya, satu kontrak disewakan untuk desain, konstruksi, dan pengoperasian proyek infrastruktur. Pertanyaan tentang kepemilikan dan waktu transfer umumnya ditentukan oleh hukum setempat dan kondisi pembiayaan, dan jumlah kemungkinan permutasi besar. Dengan pendekatan desain-bangun-keuangan-operasi (DBFO), tanggung jawab untuk merancang, membangun, membiayai, dan mengoperasikan dibundel bersama dan dialihkan ke mitra sektor swasta. Pengaturan DBFO sangat

bervariasi dalam hal tingkat tanggung jawab keuangan yang dialihkan ke mitra swasta.

BOT telah banyak digunakan untuk menarik pembiayaan swasta untuk pembangunan atau renovasi infrastruktur. Perjanjian BOT cenderung mengurangi risiko komersial bagi mitra swasta karena seringkali hanya ada satu pelanggan, yaitu pemerintah. Namun mitra pribadi harus yakin bahwa perjanjian pembelian akan dihormati. BOT memiliki aplikasi khusus proyek sehingga berpotensi menjadi kendaraan yang baik untuk investasi tertentu, tetapi dengan dampak yang lebih kecil pada kinerja sistem secara keseluruhan. Mungkin sulit untuk menghubungkan peningkatan produksi yang disebabkan oleh BOT dengan peningkatan yang sepadan di sisi permintaan. Sementara biaya konstruksi modal awal dapat dikurangi melalui pengalaman sektor swasta, utang swasta mungkin merupakan pengganti yang mahal untuk pembiayaan publik di mana perjanjian ambil-atau-bayar ada. Manfaat persaingan terbatas pada proses penawaran awal dan kontrak ini sering dinegosiasikan ulang selama masa hidupnya. Dokumen dan proses tender membutuhkan desain yang cermat dan waktu yang memadai.

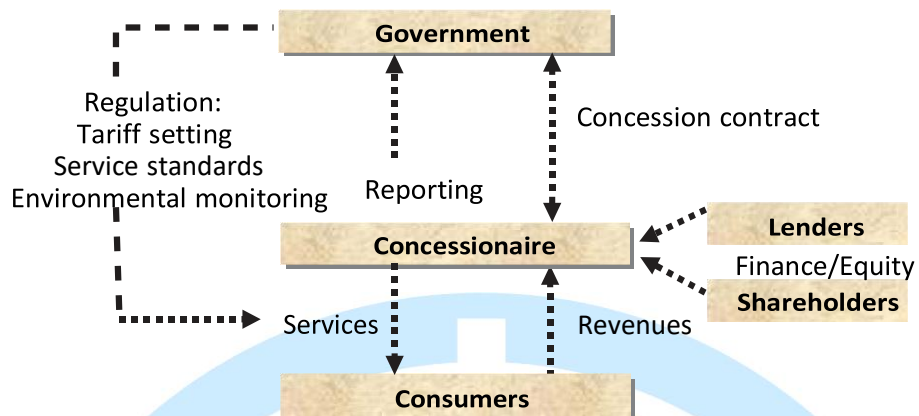
e. *Concessions* (Konsesi)

Konsesi membuat operator sektor swasta (pemegang konsesi) bertanggung jawab atas penyampaian penuh layanan di area tertentu, termasuk operasi, pemeliharaan, pengumpulan, pengelolaan, dan konstruksi dan rehabilitasi sistem. Yang penting, operator sekarang bertanggung jawab atas semua investasi modal. Meskipun operator sektor swasta bertanggung jawab

untuk menyediakan aset, aset tersebut dimiliki publik bahkan selama periode konsesi. Sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan standar kinerja dan memastikan bahwa pemegang konsesi memenuhinya. Intinya, peran sektor publik bergeser dari penyedia layanan menjadi mengatur harga dan kualitas layanan.

Pemegang konsesi memungut tarif langsung dari pengguna sistem. Tarif biasanya ditetapkan oleh kontrak konsesi, yang juga mencakup ketentuan tentang bagaimana itu bisa berubah seiring waktu. Dalam kasus yang jarang terjadi, pemerintah dapat memilih untuk memberikan dukungan pembiayaan untuk membantu pemegang konsesi mendanai belanja modalnya. Pemegang konsesi bertanggung jawab atas setiap investasi modal yang diperlukan untuk membangun, meningkatkan, atau memperluas sistem, dan untuk membiayai investasi tersebut dari sumber dayanya dan dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna sistem. Pemegang konsesi juga bertanggung jawab atas modal kerja. Kontrak konsesi biasanya berlaku selama 25-30 tahun sehingga operator memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan modal yang diinvestasikan dan mendapatkan pengembalian yang sesuai selama masa konsesi. Otoritas publik dapat berkontribusi pada biaya investasi modal jika perlu. Ini dapat berupa "subsidi" investasi (pembiayaan kesenjangan viabilitas) untuk mencapai kelayakan komersial konsesi. Atau, pemerintah dapat diberi kompensasi atas kontribusinya dengan menerima bagian yang sepadan dari tarif yang dikumpulkan.

Gambar 2. 8 Struktur Kontrak Konsesi



Sumber : (Klaus Felsing, 2008)

Konsesi adalah cara yang efektif untuk menarik dana swasta yang diperlukan untuk mendanai konstruksi baru atau merehabilitasi fasilitas yang ada. Keuntungan utama dari pengaturan konsesi adalah memberikan insentif kepada operator untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik karena peningkatan efisiensi diterjemahkan ke dalam peningkatan keuntungan dan pengembalian ke pemegang konsesi. Pengalihan paket lengkap tanggung jawab operasi dan pembiayaan memungkinkan pemegang konsesi untuk memprioritaskan dan berinovasi sesuai keinginan yang dianggap paling efektif.

Kelemahan utama termasuk kompleksitas kontrak yang diperlukan untuk menentukan aktivitas operator. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas regulasi mereka dalam kaitannya dengan tarif dan pemantauan kinerja. Selanjutnya, jangka panjang kontrak (diperlukan untuk memulihkan biaya investasi yang substansial) memperumit proses penawaran dan desain kontrak, mengingat kesulitan dalam mengantisipasi peristiwa selama periode 25 tahun. Kelemahan ini dapat diatasi dengan mengizinkan tinjauan berkala terhadap

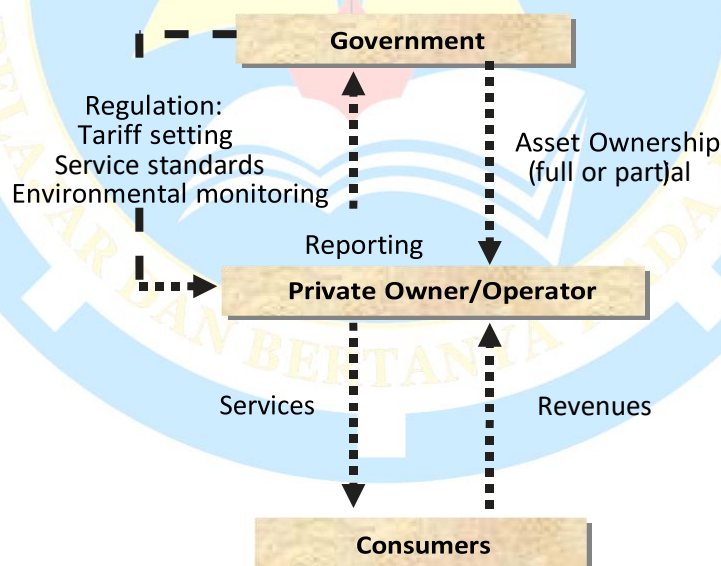
persyaratan kontrak tertentu dalam konteks lingkungan yang berkembang. Ada risiko tambahan bahwa operator hanya akan berinvestasi dalam aset baru di mana ia mengharapkan pengembalian dalam sisa periode kontrak kecuali ketentuan untuk peristiwa ini ditetapkan dalam kontrak. Karena sifat jangka panjang dan komprehensif dari kontrak, mereka dapat menjadi kontroversial secara politik dan sulit untuk diatur. Dikatakan bahwa konsesi hanya memberikan persaingan terbatas mengingat terbatasnya jumlah operator yang memenuhi syarat untuk jaringan infrastruktur utama. Ada juga kekhawatiran bahwa konsesi tidak menetapkan persyaratan monopoli tetapi memberikan ruang bagi operator tambahan di mana ini adalah kepentingan terbaik kelompok konsumen tertentu dan pemegang konsesi tidak dapat memberikan layanan yang setara.

f. *Join Venture* (Patungan)

Usaha patungan adalah alternatif untuk privatisasi penuh di mana infrastruktur dimiliki bersama dan dioperasikan oleh sektor publik dan operator swasta. Di bawah usaha patungan, mitra sektor publik dan swasta dapat membentuk perusahaan baru atau mengambil alih kepemilikan bersama dari perusahaan yang ada melalui penjualan saham kepada satu atau beberapa investor swasta. Perusahaan juga dapat terdaftar di bursa efek. Persyaratan utama dari struktur ini adalah tata kelola perusahaan yang baik, khususnya kemampuan perusahaan untuk menjaga independensi dari pemerintah. Ini penting karena pemerintah adalah pemilik bagian dan regulator, dan pejabat mungkin tergoda untuk ikut campur dalam bisnis perusahaan untuk mencapai

tujuan politik. Namun, dari posisinya sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki kepentingan terhadap profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan dan dapat bekerja untuk memuluskan rintangan politik. Mitra swasta mengambil peran operasional dan dewan direksi umumnya mencerminkan komposisi kepemilikan saham atau perwakilan ahli. Struktur usaha patungan sering disertai dengan kontrak tambahan (konsesi atau perjanjian kinerja) yang menentukan harapan perusahaan. Usaha patungan juga membutuhkan waktu untuk mengembangkan dan memberikan kesempatan yang cukup besar bagi mitra publik dan swasta untuk dialog dan kerja sama sebelum proyek dilaksanakan. Di bawah struktur usaha patungan, baik mitra publik maupun swasta harus bersedia berinvestasi di perusahaan dan berbagi risiko tertentu.

Gambar 2. 9 Struktur Kontrak Patungan

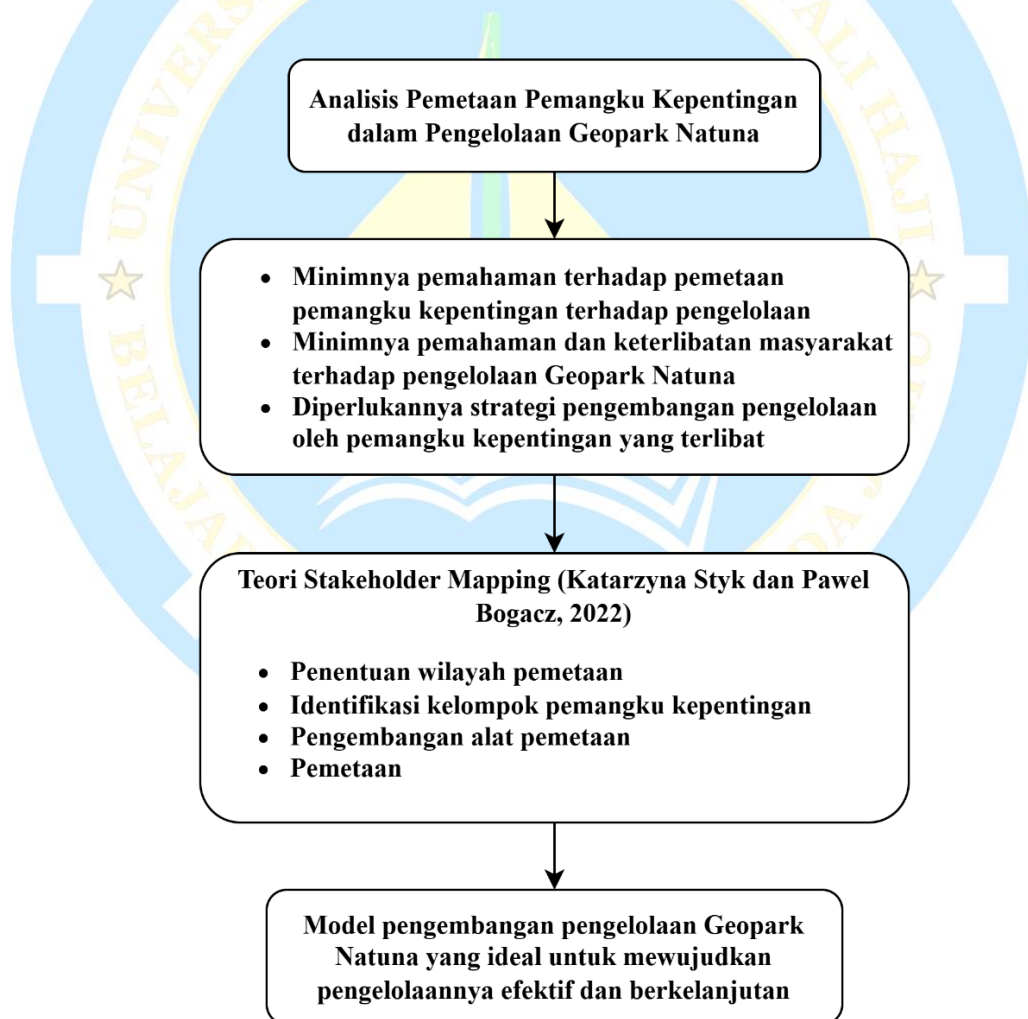


Sumber : (Klaus Felsing, 2008)

Usaha patungan adalah kemitraan nyata dari sektor publik dan swasta yang mencocokkan keunggulan sektor swasta dengan masalah sosial dan

pengetahuan lokal sektor publik. Di bawah usaha patungan, semua mitra telah berinvestasi di perusahaan dan memiliki kepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan insentif untuk efisiensi. Peran ganda pemerintah sebagai pemilik dan regulator dapat menyebabkan konflik kepentingan. Usaha patungan juga memiliki kecenderungan untuk dinegosiasikan secara langsung atau mengikuti jalur pengadaan yang kurang formal, yang dapat menyebabkan kekhawatiran akan korupsi.

2.2.3 Kerangka Pemikiran



2.3 Definisi Konsep

Konsep dasar yang menjadi Batasan dalam penelitian ini mengenai *stakeholder mapping* (pemetaan pemangku kepentingan) (Styk & Bogacz, 2022). Peneliti membatasi fokus ini pada, analisis pemetaan pemangku kepentingan termasuk masyarakat setempat dan pemahaman peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang bersangkutan dalam menyusun strategi untuk mewujudkan pengelolaan Geopark Natuna yang berkelanjutan.

Komponen kerangka kerja *stakeholder mapping* (pemetaan pemangku kepentingan) (Styk & Bogacz, 2022) mencakup penentuan wilayah pemetaan, identifikasi kelompok pemangku kepentingan, pengembangan alat pemetaan, dan pemetaan.

1. Penentuan wilayah pemetaan, dalam konteks Geopark Natuna, penentuan wilayah pemetaan sangat penting untuk mengidentifikasi area spesifik yang akan dianalisis. Dalam hal ini Geopark Natuna akan menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan dalam pengelolaan kawasan tersebut terlibat.
2. Identifikasi kelompok pemangku kepentingan, peneliti akan mengidentifikasi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Tahap ini untuk memahami siapa saja yang memiliki kepentingan dan

pengaruh dalam pengelolaan Geopark, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

3. Pengembangan alat pemetaan, membantu dalam mengorganisir dan menyajikan informasi tentang pemangku kepentingan. Alat pemetaan bisa berupa matriks atau table yang mencakup data tentang peran, tanggung jawab, dan tingkat pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna. Tahap ini memudahkan analisis dan visualisasi hubungan antar pemangku kepentingan.
4. Pemetaan, melibatkan analisis posisi dan pengaruh pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Dengan menggunakan metode yang tepat akan menghasilkan pemetaan yang menunjukkan bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dan berkolaborasi dalam pengelolaan Geopark Natuna. Hasil pemetaan ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika pengelolaan dan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2023). Penelitian kualitatif menggunakan beberapa jenis diantaranya yaitu fenomenologi, etnografi, etnometodologi, *grounded research* dan studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dan detail dengan memusatkan perhatian pada satu kasus atau sejumlah kasus yang terbatas. Dalam teori-teori yang mendukung pendekatan ini, terdapat fokus pada kasus tunggal atau sejumlah kasus terbatas, yang memungkinkan peneliti untuk merinci informasi dan konteks yang relevan. Dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus ini, memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terkait dengan fenomena tersebut. Pendekatan ini diterapkan sangat luas, dan dapat ditemui dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu arsitektur, sosial, bisnis, kedokteran, Pendidikan, dan lingkungan. Dengan memahami dasar-dasar pendekatan studi kasus dan aplikasinya dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di dunia nyata (Poltak & Widjaja, 2024).

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis, observasi, dan pengumpulan data. Pendekatan penelitian kualitatif bergantung pada bukti kualitatif daripada dasar kerja statistik. Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data secara menyeluruh untuk menjelaskan lebih lanjut tentang fenomena. Penelitian kualitatif (Creswell, J. W., & Creswell, J. D., 2023) adalah sarana yang efektif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna. Penelitian ini juga tidak berfokus pada jumlah populasi, jika data yang diperlukan telah mencukupi dan dapat mendeskripsikan fenomena penelitian, maka sampling tambahan tidak diperlukan lagi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menafsirkan data non-numerik melalui pengumpulan dan analisis data. Dengan melakukan penelitian pada populasi atau tempat yang ditargetkan, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan sosial berdasarkan pandangan dari para partisipan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik mengenai pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna dengan fokus penelitian menganalisis pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola Geopark Natuna. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Natuna dan sekitarnya.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pemetaan pemangku kepentingan termasuk masyarakat setempat dan pemahaman peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang bersangkutan dalam menyusun model pengembangan yang ideal untuk mewujudkan pengelolaan Geopark Natuna yang berkelanjutan sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam pengelolaan Geopark Natuna.

3.4 Sumber Data

Proses mengumpulkan informasi yang diperlukan disebut juga dengan sumber data. Data primer dan data sekunder dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

1. Data primer adalah sumber data asli atau utama yang dikumpulkan langsung oleh pengumpul data melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai subjek yang relevan untuk mendapatkan data primer.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dapat berasal dari laporan tertulis, seperti jurnal, artikel, berita, internet, buku, dan penelitian pustaka.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan disebut juga dengan teknik pengumpulan data. Langkah ini penting untuk dilakukan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (Sugiyono, 2017).

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan di lapangan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Dalam metode ini, peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam masalah tersebut.
2. Wawancara, metode pengumpulan data di mana peneliti berbicara dengan narasumber. Wawancara adalah percakapan yang diarahkan oleh salah seorang untuk memperoleh keterangan, biasanya antara dua orang tetapi terkadang lebih. Penelitian ini menggunakan informan terpilih yang memiliki karakteristik unik atau pengetahuan mendalam dan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, wawancara tidak terstruktur digunakan.
3. Dokumentasi diperlukan untuk menunjukkan bahwa data penelitian benar dan asli. Serta dapat memperlihatkan dan menggambarkan keadaan di lokasi penelitian. Dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data untuk mempelajari atau menafsirkan masalah.
4. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

3.6 Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan ingin diteliti oleh peneliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) yang akan memberikan gambaran terkait pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna. Beberapa informan terkait dalam penelitian ini diantaranya.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

Kode Informan	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan/Pekerjaan	Jenis Data
MA	L	Kepala Dinas BP3D Kabupaten Natuna/Wakil Ketua 1 BPGN	Memberikan data utama tentang struktur organisasi, sejarah Geopark Natuna, strategi pengelolaan, dan kendala koordinasi antar lembaga.
H	L	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna/Wakil Ketua 3 BPGN	Memberikan informasi tentang Geopark Natuna, kebijakan pariwisata, promosi geopark, dan program pemerintah daerah.
Rn	L	Sekretaris 2 BPGN	Menguraikan tingkat partisipasi masyarakat, konsep geopark, persepsi terhadap geopark, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal.
A	L	Ketua NGYF	Menjelaskan keterlibatan antar aktor, pengelolaan geosite, konsep geopark, edukasi, dan strategi penguatan kapasitas SDM.
FF	L	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna	Menjelaskan sejarah Geopark Natuna, keterlibatan sektor swasta dan tantangan ekonomi lokal dalam mendukung pengelolaan geopark.
R	L	Pengelola Geosite/Masyarakat	Menjelaskan pengelolaan geosite dan partisipasi masyarakat dalam pengembangannya.

Sumber: (Olahan Peneliti, 2025)

Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Wawancara

No.	Rumusan Masalah	Operasionalisasi	Pertanyaan	Tujuan
1.	Bagaimana pemetaan, peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna?	- Identifikasi pemangku kepentingan beserta peran, tanggung jawab dan koordinasinya - Kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan - Tantangan serta evaluasi dan monitoring	- Siapa saja pihak-pihak yang terlibat beserta peran, tanggung jawab dan bagaimana koordinasinya dalam pengelolaan Geopark Natuna? - Apa kepentingan utama dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Geopark Natuna? - Apa tantangan utama yang dihadapi dan bagaimana mengevaluasi efektivitas dalam mengelola Geopark Natuna?	- Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna - Memahami tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna - Mengidentifikasi tantangan serta memahami metode evaluasi untuk menilai pengelolaan Geopark Natuna

2.	Bagaimana model pengembangan Geopark yang ideal menurut pemangku kepentingan yang terhubung dengan Geopark Natuna?	- Persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap bentuk pengelolaan Geopark Natuna	- Apa rekomendasi model tata kelola geopark menurut pemangku kepentingan yang terkait untuk pengelolaan Geopark Natuna yang lebih efektif dan berkelanjutan?	- Mengumpulkan saran dan rekomendasi untuk perkembangan pengelolaan Geopark
----	--	--	--	---

Sumber : (Olahan Peneliti, 2025)

3.7 Teknik Analisis Data

Praktik mencari dan mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi disebut analisis data. Menurut Sugiyono (2014) agar informasi mudah dipahami, proses ini memerlukan pengklasifikasian data, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyintesis, mengumpulkan pola, memutuskan hal yang penting dan perlu diteliti, serta menarik kesimpulan. Sedangkan menurut pendapat (Sugiyono, 2019), analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, di mana peneliti mengembangkan pola hubungan antar pemangku kepentingan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan guna menjawab fokus penelitian secara mendalam. Menurut (Creswell, 2007) Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis dimulai dengan mengumpulkan data, membuat hipotesis, dan kemudian mengumpulkan data lagi secara berulang-ulang untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau tidak. Dengan menggunakan teknik

triangulasi untuk mengumpulkan data yang dapat diulang. Dalam penelitian kualitatif, analisis data mencakup mereduksi data menjadi tema-tema melalui proses pengkodean dan pemadatan kode-kode, menyusun dan mempersiapkan data (yaitu data teks seperti dalam transkrip, atau data gambar seperti dalam gambar) untuk dianalisis, dan terakhir menggambarkan data. . dalam diagram, bagan, atau percakapan.

a. Analisis Data Model Spiral

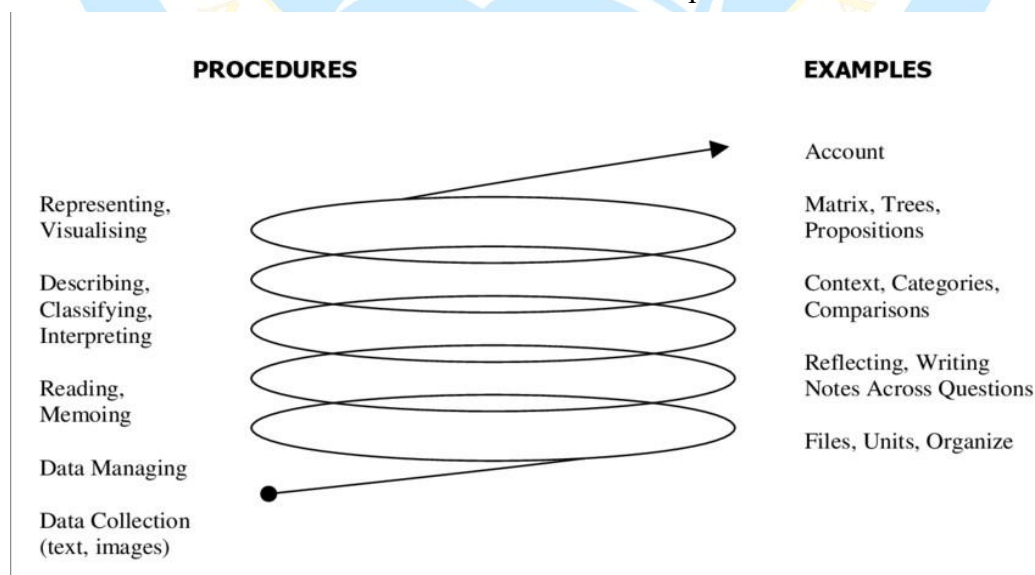
Analisis data kualitatif adalah proses yang dibuat khusus yang melibatkan langkah-langkah pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan yang saling terkait. Sering kali ini merupakan proses intuitif yang melibatkan belajar sambil melakukan, namun umumnya mengikuti kontur yang dapat direpresentasikan dalam gambar spiral. Proses ini, yang disebut analisis data spiral, melibatkan pergerakan dalam lingkaran analitik dan mencakup beberapa aspek seperti pengelolaan data, memahami keseluruhan *database*, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan. Dalam proses analisis data, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mengolah dan mempersiapkan data, langkah ini bergantung pada sumber informasi, langkah ini termasuk menyalin hasil wawancara menjadi teks, *scanning* materi, mengetik data lapangan, dan mengorganisir data ke berbagai jenis.
2. Membaca keseluruhan data, langkah pertama untuk memahami informasi secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail, langkah ini merupakan proses mengolah informasi atau materi menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya. Dalam proses ini, peneliti memilih kata-kata atau frasa yang penting dan membuat kode untuk menggabungkan data berdasarkan tema atau perspektif tertentu.
4. Menyajikan data, langkah ini yaitu tahap setelah data telah dikumpulkan dan dianalisis, peneliti harus menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan atau dokumen yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah.
5. Membuat interpretasi, dalam proses analisis data, peneliti harus memaknai lebih luas data yang ada.

Creswell mengelompokkan kedalam 4 langkah analisis setelah pengumpulan data dari 5 langkah yang ada. Proses analisis fenomenologi Creswell dikenal dengan *the data analysis spiral*.

Gambar 3. 1 Analisis Data Spiral



Sumber : (Creswell, 2007)

1. *Data Managing* (mengelola data), proses mengumpulkan data dan mengorganisirnya, kemudian mengelompokkannya (membuat file) berdasarkan topik pertanyaan.
2. *Reading & Memoing*, ini melibatkan membaca informasi yang telah dikategorikan berdasarkan tema pertanyaan, memberi anotasi pada pertanyaan setiap sumber secara spesifik, dan kemudian membuat kode.
3. *Describing, Classifying & Interpreting*, langkah pertama dalam proses mendeskripsikan melibatkan merangkum pengalaman sendiri dan menangkap esensi kejadian. Selanjutnya, kode-kode yang mengklasifikasikan data menurut tema atau sudut pandang tertentu dibuat.
4. *Representing & Visualizing*, proses menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, atau gambar untuk mempermudah penelitian.

Peneliti juga harus hati-hati dalam proses pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian, dan menghindari data yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti juga harus menyusun data sesuai dengan topik penelitian dan mencari pola dan tema-tema yang sama dalam data tersebut.

3.8 Triangulasi

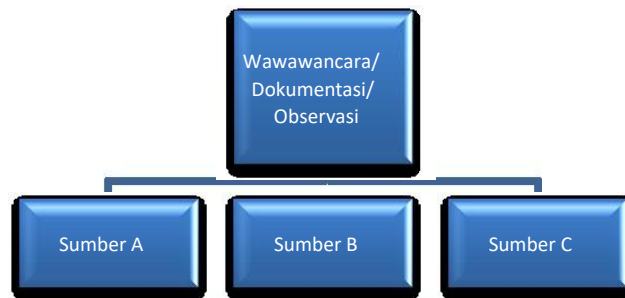
Dengan tujuan pertanggungjawaban, informasi dari riset yang diperoleh terlebih dulu butuh diuji dengan menguji keabsahan informasinya. Metode triangulasi ialah salah satu metode yang dicoba buat menguji suatu informasi dikatakan valid ataupun tidak terhadap informasi yang diperoleh dari riset. Metode triangulasi merupakan metode dalam pengumpulan informasi serta sumber yang

sudah terdapat. Sugiyono (2013) mengatakan, apabila triangulasi digunakan dalam suatu riset, hingga sesungguhnya periset sudah sekalian mengumpulkan informasi serta menguji daya dapat dipercaya informasi tersebut. Djam Satori & Komariah (2011) mengatakan bahwa triangulasi dapat dimaknai tentang sebuah usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu. Sehingga dengan dikerjakannya pengecekan hendak diharapkan terus menjadi menipiskan nilai bias dari hasil suatu riset bisa dicoba dengan menyamakan informasi serta data yang sudah diperoleh dengan perlengkapan serta waktu yang bermacam-macam (Alfansyur, 2020).

Adapun tiga teknik dalam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dimana triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Alfansyur, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dengan menggunakan triangulasi sumber dapat menguji data dari berbagai sumber informan yang datanya atau informasinya akan digunakan dalam penelitian. Dengan triangulasi teknik yang dapat meningkatkan kepercayaan data dengan cara mengecek data yang didapat dengan beberapa sumber.

Gambar 3. 2 Cara Melakukan Triangulasi Sumber



Sumber : (Alfansyur, 2020)

Melalui teknik triangulasi sumber dapat membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang didapatkan. Triangulasi sumber merupakan cross check data dengan sumber lain. Sedangkan triangulasi teknik sebagai kebalikan dari triangulasi sumber, dimana teknik ini digunakan untuk menentukan dan mencari kebenaran data pada sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk menilai kebenaran data.

Gambar 3. 3 Cara Melakukan Triangulasi Teknik



Sumber : (Alfansyur, 2020)

3.9 Konsiderasi Etik

Suatu penelitian penting dengan adanya konsiderasi etik karena mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak serta menjamin kerahasiaan berupa data maupun informasi pribadi partisipan atau narasumber dalam penelitian. Dengan adanya konsiderasi etik tersebut dapat menjamin privasi dan kerahasiaan informasi dari informan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menjamin kerahasiaan dan privasi dari informan penelitian. Data yang telah didapatkan dari informan akan dikelola dengan hati-hati dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Peneliti akan memastikan bahwa informasi yang privasi dari partisipan ataupun informan dalam penelitian akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip etika dalam penelitian. Penggunaan data dan juga analisis data akan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab, serta proses pengumpulan dan analisis akan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku. Hal ini guna menjaga integritas dan kepercayaan terhadap penelitian yang dilakukan. Peneliti menjamin setiap informan dapat mengakses hasil dari penelitian ini ketika informan memintanya.

3.10 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

[illegible]

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Konteks Historis Geopark Natuna

Geopark Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 29 November 2018 yang menandai babak baru dalam upaya pelestarian dan pengembangan potensi alam serta budaya di Kabupaten Natuna. Namun, perjalanan menuju status ini telah dimulai jauh sebelumnya. Menurut H. Hardinansyah, Kepala Dinas Pariwisata Natuna, Geopark Natuna memiliki keunikan yang sangat menonjol, bahkan disebut sebagai satu-satunya di Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Riau dan Kalimantan Barat. Keunikan yang dimiliki Geopark Natuna ini terletak pada tiga pilar utama yaitu *geodiversity* (keanekaragaman batuan), *biodiversity* (keanekaragaman hayati), dan *culture diversity* (keanekaragaman budaya). Secara geologis, Natuna memiliki bebatuan purba berusia hingga 188 juta tahun yang berasal dari kerak samudra, kerak benua, dan sungai purba, menjadikannya objek penelitian yang menarik. Dari sisi hayati, keberadaan Kekah Natuna (*Presbytis Natunae*), primata endemik yang hanya ditemukan di Pulau Bunguran, menjadi ikon penting. Sementara itu, kekayaan budaya Natuna tercermin dari tradisi Mendu, kesenian Alu, dan berbagai kuliner tradisional yang telah diakui secara nasional (*Profil Geopark Natuna*, n.d.).

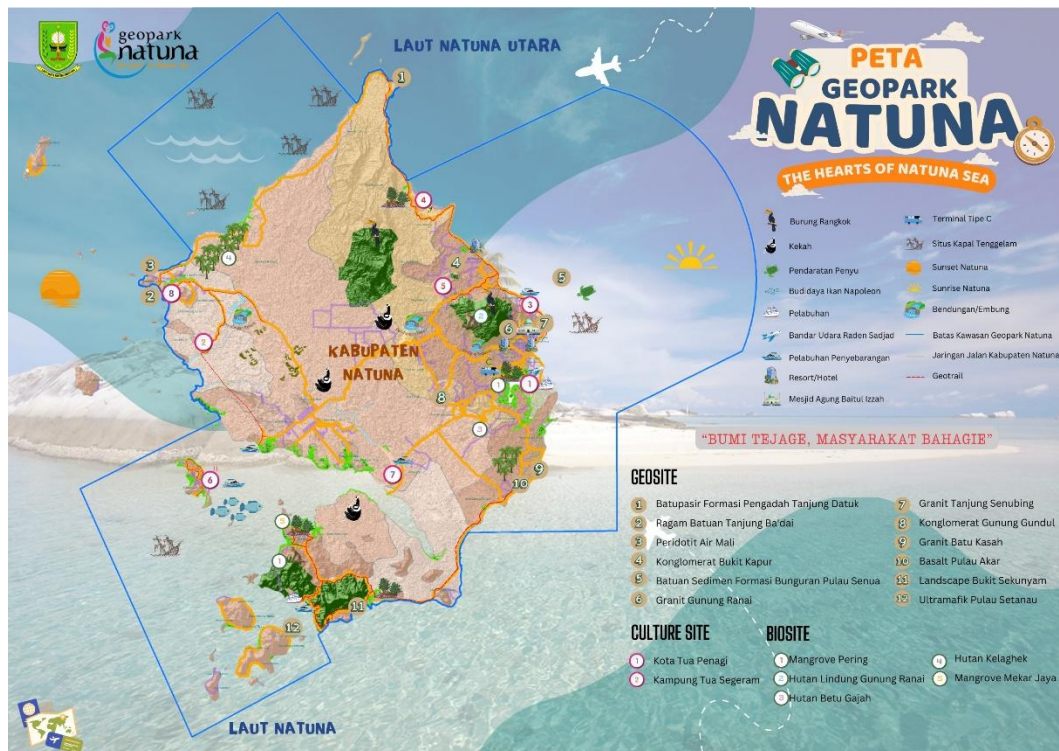
Gagasan mengenai Geopark Natuna sebenarnya telah muncul lebih awal dari ditetapkannya pada tahun 2018. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, mengungkapkan bahwa antara tahun 2014 hingga 2016, tim dari Litbang Geologi Bandung telah melakukan kajian mendalam di Natuna. Hasil kajian tersebut menyimpulkan keunikan geologi Natuna, khususnya di wilayah laut (*Ocean Geopark*), yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pada masa itu, konsep Geopark belum populer, sehingga usulan untuk mengembangkannya sebagai daya tarik daerah belum mendapat perhatian luas. Namun, pada tahun 2019, Geopark Natuna secara unik diusulkan oleh Kementerian Luar Negeri, bukan atas prakarsa Pemerintah Daerah. Latar belakang usulan ini didasari oleh pertimbangan geopolitik Natuna, sebagai upaya untuk melindungi wilayah tersebut dari ancaman eksternal, mengingat posisinya yang strategis di Laut Natuna Utara.

Sejak penetapannya, pengelolaan Geopark Natuna terus mengalami perkembangan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menjelaskan bahwa kondisi Geopark Natuna telah didorong sebanyak tiga kali untuk mencapai status UNESCO Global Geopark, namun masih terkendala aspek SDM dan sarana pendukung. Perubahan signifikan terlihat pada fasilitas penunjang di beberapa Geosite, seperti Batu Kasah dan Gunung Ranai, yang kini dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti mushala, kamar bilas, area parkir, dan gazebo. Namun, perjalanan pengembangan ini tidak selalu mulus. Pandemi COVID-19 pada akhir 2019 menyebabkan *refocusing* anggaran, yang sangat menghambat

program dan kegiatan Geopark. Selain itu, pemahaman masyarakat lokal terhadap konsep Geopark masih menjadi pekerjaan rumah, meskipun sosialisasi terus digencarkan. Tantangan utama lainnya adalah aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal, serta isu kepemilikan lahan di Geosite yang seringkali milik masyarakat, yang memerlukan pendekatan kerjasama alih-alih penjualan. Meskipun demikian, komitmen pimpinan daerah, khususnya Bupati, untuk terus menggaungkan Geopark sebagai ikon Natuna, memberikan harapan bagi pengembangan yang berkelanjutan.

Geopark Natuna memiliki 8 titik Geosite yang tersebar di berbagai lokasi, masing-masing menawarkan keunikan geologis, hayati, dan budaya tersendiri. Titik-titik Geosite ini meliputi Tanjung Datuk di bagian utara, Gunung Ranai, Senubing, Pulau Senua, Batu Kasah, Pulau Akar, Goa Kamak, dan Pulau Setanau. Dari 8 Geosite ini, Batu Kasah dan Gunung Ranai diidentifikasi sebagai yang paling unggul dan berkembang. Batu Kasah, khususnya, telah dikenal luas sebagai destinasi wisata massal dan laboratorium alam karena batuan granitnya yang berasal dari kerak benua, menjadikannya objek penelitian yang menarik. Interaksi masyarakat lokal di Batu Kasah juga dinilai baik, dengan adanya upaya pengelolaan yang lebih terorganisir dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan (Ryannaldo & Intan Ratih, 2024).

Gambar 4. 1 Peta Geopark Natuna



Sumber : (olahan data primer, 2025)

Dari 8 Geosite terdapat Batu Kasah dan Gunung Ranai yang menjadi geosite yang menonjol, namun masih terdapat pengembangan Geosite lainnya masih belum optimal. Pulau Akar dan Pulau Setanau, misalnya, memiliki batuan berusia 188 juta tahun yang sangat tua, namun pengelolaannya belum seoptimal Batu Kasah. Goa Kamak juga disebutkan memiliki akses yang terbatas. Meskipun setiap Geosite telah ditunjuk pengelolaannya, yang sebagian besar adalah warga lokal, pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pendukung belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dari seluruh Geosite belum sepenuhnya tergali dan dioptimalkan untuk tujuan konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan.

4.1.2 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Setempat

Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Geopark Natuna menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tujuan utama penetapan Geopark Natuna adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Geosite. Masyarakat didorong untuk menjadi pengelola, sehingga mereka bisa menghasilkan *Geoproduct* berupa kerajinan, kuliner, atau karya seni yang memanfaatkan kekayaan geologi, hayati, dan budaya lokal. Contoh nyata terlihat di Geosite Batu Kasah, Desa Cemaga, yang telah menunjukkan perkembangan signifikan. Masyarakat di sana telah merasakan manfaat ekonomi dengan membuka usaha jualan *Geoproduct* dan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai ladang ekonomi. Bahkan, Batu Kasah berhasil meraih juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tingkat nasional, menunjukkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, tantangan utama dalam pengembangan ekonomi adalah aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal, yang menyebabkan kunjungan wisatawan masih terbatas, sehingga pengelola Geosite belum sepenuhnya dapat hidup hanya dari aktivitas Geopark.

Secara sosial, pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal terhadap konsep Geopark masih bervariasi dan menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola. Meskipun sosialisasi terus dilakukan melalui program "Geopark to School" dan "School to Geopark" yang melibatkan anak sekolah dan mahasiswa, belum semua lapisan masyarakat sepenuhnya memahami esensi Geopark. Awalnya,

banyak masyarakat yang menganggap Geopark hanya sebagai urusan pariwisata, bukan sebagai tanggung jawab bersama untuk konservasi dan edukasi. Hal ini tercermin dari kendala dalam isu kepemilikan lahan di Geosite, di mana masyarakat cenderung ingin menjual tanah mereka daripada menjalin kerjasama pengelolaan. Namun, ada upaya untuk meningkatkan kesadaran ini, seperti yang dilakukan di Mekarjaya dengan Komunitas Mantau Kekah, yang secara mandiri menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian Kekah Natuna. Keterlibatan masyarakat sebagai pengelola Geosite, seperti di Gunung Ranai yang mulai menerapkan sistem parkir berbayar, menunjukkan adanya inisiatif untuk memanfaatkan potensi Geopark demi keberlangsungan ekonomi lokal.

Dari aspek budaya, masyarakat Natuna memiliki kekayaan yang luar biasa dan menjadi salah satu pilar penting Geopark. Keanekaragaman budaya ini mencakup tradisi Mendu, kesenian Alu (Betingkah Alu Selesung), Langlang Buana, Gasing, Syair, Sulu, Paskapal, Tari Zapin Tali, dan Tari Cik Abu. Selain itu, kuliner tradisional seperti Tabel, Mie Sagu, Pedek, dan Calok juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Natuna. Keunikan budaya Natuna terletak pada akulturasi budaya Melayu, Palembang, Cina, dan Vietnam. Pemanfaatan budaya ini untuk tujuan konservasi, edukasi, dan pariwisata dilakukan dengan menjadikannya atraksi wisata. Misalnya, permainan Alu dapat menjadi daya tarik wisata budaya, dan kuliner tradisional dapat menarik wisatawan minat khusus yang mencari pengalaman kuliner ekstrem. Upaya pelestarian budaya ini juga didukung dengan penambahan narasi filosofis di balik setiap tradisi atau kuliner, sehingga meningkatkan nilai

edukasi dan daya tarik bagi wisatawan. Pemerintah juga berupaya mengajukan keragaman budaya ini ke sidang Warisan Budaya Tak Benda Nasional, menunjukkan komitmen terhadap pelestarian dan promosi budaya lokal.

4.1.3 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar krusial dalam pengelolaan Geopark Natuna, namun sekaligus menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi pengembangannya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, secara eksplisit menyatakan bahwa Geopark Natuna "belum sanggup, belum mampu dari aspek SDM-nya" untuk mencapai status UNESCO Global Geopark. Keterbatasan ini tidak hanya mencakup kuantitas, tetapi juga kualitas dan pemahaman mendalam tentang konsep Geopark itu sendiri. Meskipun Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) telah dibentuk dan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterlibatan pihak di luar PNS masih menjadi isu. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa keterlibatan tersebut harus disertai dengan upah atau honor, yang berbeda dengan PNS yang secara otomatis terlibat sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan.

Pemahaman masyarakat lokal terhadap konsep Geopark juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pengelola SDM. Sekretaris 2 BPGN, berpendapat bahwa belum semua masyarakat sepenuhnya memahami Geopark, sehingga BPGN terus berupaya untuk "meng-OTG-kan" (Orang Tertular Geopark) masyarakat melalui berbagai program edukasi. Program "Geopark

Goes to School" dan "School to Geopark" adalah inisiatif untuk menanamkan pemahaman sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa. Namun, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu Geopark, bahkan mengira Geopark Natuna adalah nama pantai. Ia juga menggarisbawahi bahwa SDM pengelola di lapangan, khususnya masyarakat lokal, seringkali masih berpikir pragmatis terkait honor, dan belum sepenuhnya melihat potensi jangka panjang dari pengelolaan Geopark.

Tantangan SDM ini semakin kompleks mengingat karakteristik pekerjaan di Geopark yang seringkali tidak menjanjikan secara finansial dibandingkan dengan pekerjaan lain di Natuna, seperti nelayan. Akibatnya, pengelola Geosite, terutama di lokasi yang jarang dikunjungi, kesulitan untuk hidup hanya dari pengelolaan Geopark. Hal ini menyebabkan banyak Geosite yang belum dikelola secara optimal, kecuali beberapa seperti Batu Kasah dan Gunung Ranai yang sudah mulai menunjukkan perkembangan. Wakil Ketua 1 BPGN, menambahkan bahwa tantangan SDM juga mencakup ketersediaan tenaga ahli atau pakar Geopark, serta kesulitan dalam mempertahankan SDM lokal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan geologi namun dipaksa untuk terlibat dalam divisi geologi.

Berbagai rekomendasi dan upaya telah diidentifikasi untuk mengatasi keterbatasan SDM. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menyarankan peningkatan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu, program beasiswa bagi generasi muda Natuna yang kuliah di luar daerah dapat

dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian mereka ke Geopark, sehingga ketika kembali ke Natuna, mereka dapat menjadi agen penyebar pemahaman Geopark. Sekretaris 2 BPGN menekankan bahwa Geopark tidak hanya untuk orang geologi atau biologi, melainkan dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi dan komunikasi. Wakil Ketua 1 BPGN juga menyoroti pentingnya mendorong anak-anak muda untuk terlibat dalam pengelolaan Geopark, bahkan jika harus "dipaksakan" pada awalnya, agar mereka memahami potensi dan manfaatnya. Dengan demikian, pengembangan SDM yang komprehensif, mulai dari peningkatan pemahaman masyarakat hingga pembentukan tenaga ahli, menjadi kunci vital bagi keberlanjutan dan kemajuan Geopark Natuna.

4.1.4 Tata Kelola Geopark Natuna

Pengelolaan Geopark Natuna, sejak penetapannya sebagai Geopark Nasional pada 29 November 2018, didasarkan pada tiga pilar utama yaitu konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) menjadi entitas sentral dalam menjalankan fungsi-fungsi ini. Dalam aspek konservasi, fokus utama adalah perlindungan keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya. Zona inti Geopark, seperti bebatuan purba, dijaga ketat dari aktivitas yang merusak, termasuk penambangan. Upaya konservasi hayati terlihat pada perlindungan Kekah Natuna, primata endemik yang terancam punah, dengan pembangunan Rumah Mantau Kekah dan alokasi lahan khusus seluas 22 hektar. Konservasi budaya dilakukan melalui pelestarian tradisi dan kesenian lokal seperti Mendu dan Alu. Sementara itu,

pilar edukasi diimplementasikan melalui program "Geopark to School" dan "School to Geopark," yang membawa konsep Geopark langsung ke sekolah dan kampus, serta mengajak pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi Geosite guna pemahaman langsung.

BPGN melaksanakan fungsinya dengan mengadopsi pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima unsur pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta, akademisi, jurnalis, dan masyarakat. Struktur pengurus BPGN didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pariwisata, misalnya, bertanggung jawab atas promosi wisata dan menjadi wadah anggaran Geopark. Dinas Lingkungan Hidup mendukung konservasi dengan penyediaan bibit tanaman, sementara Dinas Pendidikan membantu dalam kegiatan edukasi di sekolah. Koordinasi antar-pemangku kepentingan ini dinilai cukup baik, dengan semua pihak mendukung upaya pengembangan Geopark. Namun, keterlibatan pihak di luar PNS masih menjadi tantangan, terutama karena adanya ekspektasi honorarium, yang berbeda dengan PNS yang secara otomatis terlibat.

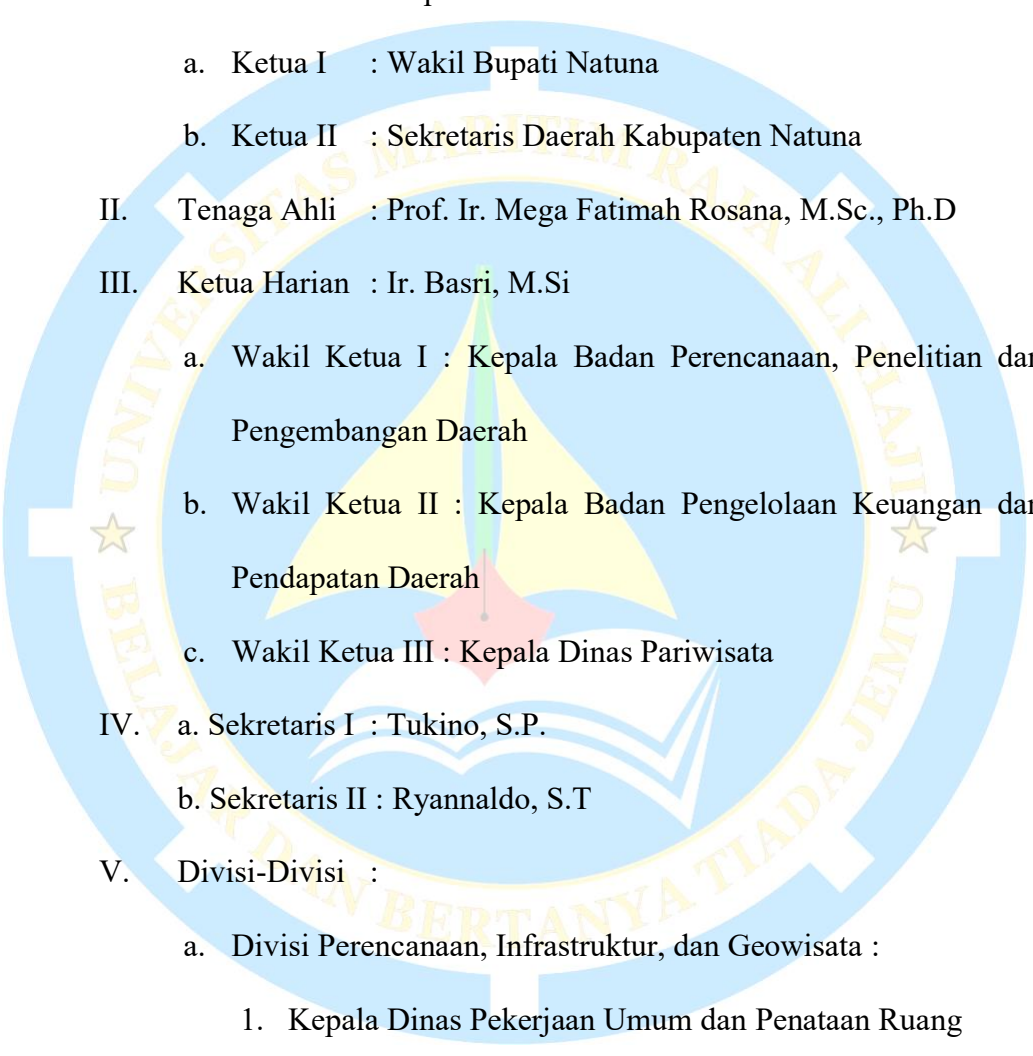
Pengelolaan Geopark Natuna menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi. Kendala utamanya adalah aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal, yang menyebabkan Geosite masih jarang dikunjungi wisatawan, sehingga pengelola di lapangan kesulitan untuk hidup hanya dari aktivitas Geopark. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran juga menjadi faktor penghambat.

Pemahaman masyarakat lokal terhadap konsep Geopark yang belum merata juga menjadi tantangan, terutama terkait isu kepemilikan lahan di Geosite yang seringkali milik masyarakat. Hal ini menyulitkan upaya pengembangan sarana dan prasarana, karena pihak swasta atau CSR (seperti SKK Migas) mensyaratkan lahan yang *clear and clear* sebelum memberikan bantuan.

Berbagai strategi telah dan akan terus diupayakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Pemerintah daerah juga berupaya membuka jalur akses transportasi dan mendorong kunjungan melalui program-program seperti *family gathering* OPD di Geosite. Model pengembangan ideal yang diharapkan adalah yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai ujung tombak pengelolaan, di mana mereka dapat merasakan dampak ekonomi berkelanjutan dari Geopark. Kemitraan dengan pihak swasta, meskipun saat ini belum optimal, diharapkan dapat ditingkatkan melalui skema CSR dan kerjasama yang lebih terstruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan promosi. Evaluasi dan monitoring berkala oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNJI) dan Badan Geologi Kementerian SDM juga menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan, dengan harapan Natuna dapat segera mencapai status UNESCO Global Geopark.

4.1.5 Struktur Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna

Struktur Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) Kabupaten Natuna yang terlampir pada keputusan Bupati Natuna Nomor 331 Tahun 2024 dengan masa bakti 2024-2026 :

- 
- I. Ketua Umum : Bupati Natuna
 - a. Ketua I : Wakil Bupati Natuna
 - b. Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
 - II. Tenaga Ahli : Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D
 - III. Ketua Harian : Ir. Basri, M.Si
 - a. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Pariwisata
 - IV.
 - a. Sekretaris I : Tukino, S.P.
 - b. Sekretaris II : Ryannaldo, S.T
 - V. Divisi-Divisi :
 - a. Divisi Perencanaan, Infrastruktur, dan Geowisata :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan
 - 3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR

5. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dispar

6. Sonny Yulianto, S.T

7. Sisworo Nugroho, S.Par

8. Ketua DPD HPI Natuna

b. Divisi Kerjasama, Kemitraan, Pendanaan dan Event :

1. Bobby Rozano

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

3. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

c. Divisi Budaya, Sosial dan Edukasi :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud

3. Destriyadi, M.A.

d. Divisi Teknologi Informasi, dan Promosi :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar

3. Dedi Yudia, S.A.P

4. Intan Ratih Kumaladewi, S.Hum

5. Arman Salim, S.A.P

e. Divisi Lingkungan, Penelitian, Konservasi dan Mitigasi
Bencana :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BP3D

4. Harmidi, S.A.P

5. Ulfitra, S.T

6. Cherman

f. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa DPMD

4. Julita Putri Santosa, S.S

5. Natuna *Geopark Youth Forum*

g. Divisi Pengembangan Geoproduk :

5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

6. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar

7. Mirna Susanti, S.E

8. Riska Handayani, S.IP

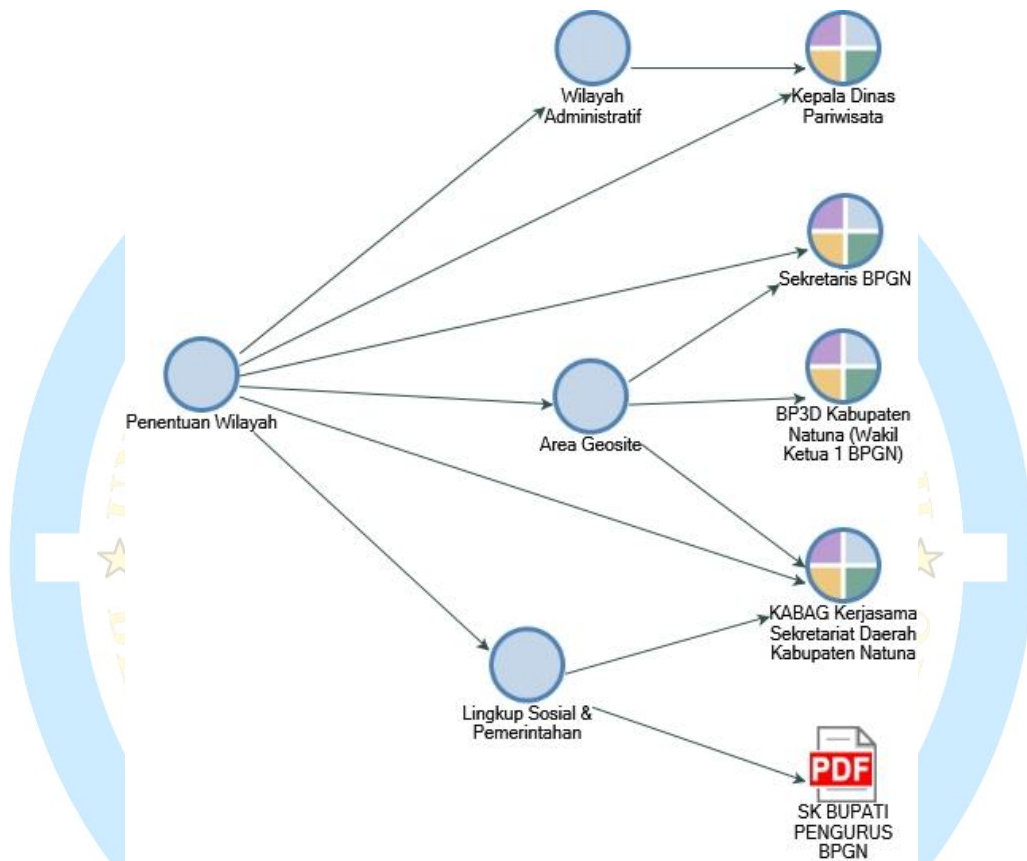
4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penentuan Wilayah Pemetaan

Penentuan wilayah pemetaan, dalam konteks Geopark Natuna, penentuan wilayah pemetaan sangat penting untuk mengidentifikasi area spesifik yang akan dianalisis. Dalam hal ini Geopark Natuna akan menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan dalam pengelolaan kawasan tersebut terlibat.

Penentuan wilayah dalam pengelolaan Geopark Natuna merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, mencakup aspek geologis, administratif, sosial-politik, serta regulasi tata ruang.

Gambar 4. 2 Gambar project map Pemetaan Wilayah



Sumber : hasil olah data Nvivo 12 pro

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang telah dikodekan ke dalam NVivo, kode Penentuan Wilayah terbagi menjadi tiga yaitu Wilayah Administratif, Area Geosite Strategis, dan Lingkup Sosial & Pemerintahan. Berikut uraian masing-masing aspek beserta kutipan asli dari para narasumber dan dokumen pendukung.

1. Wilayah Administratif

Aspek administratif menjadi faktor pembatas maupun pengaruh dalam pemetaan geosite. Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa tidak semua kawasan yang memiliki potensi geologi dapat diakui sebagai geosite, karena sudah mengalami perubahan fisik yang tidak sesuai dengan prinsip konservasi:

“Jadi sebetulnya tingkat bakal Geopark Natuna itu mulai dari Alif Stone, tapi Alif Stone itu tidak bisa dimasukkan salah satu Geosite Geopark karena disitu sudah dia buat jembatan, disemen jadi tidak bisa, bahkan di batu-batu misalnya di situ ada toilet, kadang-kadang orang taruh toren, tong oren itu di atas batu tidak boleh, jadi di zona inti itu tidak boleh sama sekali dirubah. Itu bedanya.” (Kepala Dinas Pariwisata, 2025)

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya kesesuaian kawasan dengan aturan zonasi kawasan inti, di mana intervensi fisik manusia dilarang keras, bahkan jika lokasi tersebut memiliki nilai geologi tinggi. Geopark Natuna masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Natuna sebagai bagian dari KSPN, dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan promosi pariwisata di wilayah tersebut. Selain itu, Natuna juga telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional yang menunjukkan kekayaan alam dan budaya yang unik di Natuna (*BINUS Tourism, 2024, n.d.*).

2. Area Geosite Strategis

Aspek ini merupakan fokus utama dari penetapan wilayah geopark. Sekretaris BPGN menjelaskan secara detail tentang karakteristik geologi

Natuna yang sangat khas, berupa keberadaan kerak benua dan kerak samudera dalam jarak yang sangat dekat:

“Geopark Natuna sejauh ini yang diteliti itu bebatuannya dari geologi itu adalah batuan kerak benua dan kerak samudera itu berdampingan, contoh nyatanya ada di batuan Batu Kasah sama batuan Pulau Akar, nah batuan Batu Kasah itu batu granit berasal dari kerak benua, kerak benua nanti bumi ini kan berlapis berlapis, lapis paling bawah itu kita sebut namanya kerak kerak lempeng lempeng benua, lempeng samudera, nah produk lempeng benua itu itu batu-batu granit, nanti bisa lihat di Batu Sindu, Batu Rusia, nah itu batu granit yang banyak tersebar dari selatan, Batu Kasah sampai Teluk Selahang dan di Gunung Ranai ada juga dari kerak samudera, kerak samudera kerak samudera itu lebih tua disini, contohnya Pulau Akar, bebatuan di Pulau Akar kenapa berdampingan karena jaraknya dekat Batu Kasah sama Pulau Akar paling jaraknya cuma 3 kilo, tapi perbedaan usia batuan nya beda beda, beda sekitar 60 juta tahun perbedaannya.” (Sekretaris II BPGN, 2025)

BP3D Natuna (Wakil Ketua 1 BPGN) juga menyebut lokasi geosite lain yang penting:

“Geodiversity kita memang ada cukup banyak formasi granit, ada beberapa tempat seperti Pulau Akar, Pulau Setanau.” (Wakil Ketua 1 BPGN, 2025)

Menurut Kepala Bagian Kerjasama menyoroti keterlibatan Badan Geologi dalam mengkaji titik-titik yang dapat ditetapkan sebagai geosite, termasuk Gunung Ranai yang dianggap simbolis:

“...waktu itu mulailah didatangkan lagi dari Badan Geologi untuk mengkaji kembali daerah-daerah, titik-titik mana yang memang bisa diurut sebagai geositenya. Apa semua, Gunung Ranai.” (Kepala Bagian Kerjasama, 2025)

3. Lingkup Sosial & Pemerintahan

Penentuan wilayah juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik dan kebijakan pemerintahan pusat. Kepala Bagian Kerjasama mengungkapkan bahwa inisiasi Geopark Natuna justru bukan berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri, dengan alasan geopolitik:

“Dan cukup unik Natuna ini, Geoparknya bukan prakarsa dari Pemda, tapi memang diusulkan oleh Kemenlu. Mungkin dari Pak Hardinansyah pun sudah menyampaikan juga. Nah, kenapa itu yang diusulkan Kemenlu? Karena mempertimbangkan geopolitik Natuna. Jadi, sebenarnya lebih kepada upaya untuk memprotek Natuna dari ancaman dari luar. Itu makanya ditetapkan sebagai Geopark Nasional di tahun 2017-1984. Sudah cukup lama sebenarnya.” (Kepala Bagian Kerjasama, 2025)

★ Dimensi sosial-politik ini kemudian dilembagakan dalam bentuk regulasi resmi, salah satunya adalah:

Keputusan Bupati Natuna Nomor 331 Tahun 2024

(Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 178

Tahun 2024 Tentang Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna)

Dokumen ini mencantumkan struktur organisasi BPGN, termasuk para kepala dinas dan bagian yang terlibat langsung dalam penataan wilayah Geopark. Peraturan ini menunjukkan bahwa penentuan wilayah dilakukan secara terstruktur, sah secara hukum, dan melibatkan OPD lintas sektor.

Pemetaan wilayah Geopark Natuna merupakan hasil dari sinergi antara kajian ilmiah geologi, pertimbangan teknis tata ruang, serta strategi pemerintahan baik di level lokal maupun nasional. Pemilihan lokasi geosite tidak hanya berdasarkan kelayakan ilmiah, tetapi juga mempertimbangkan keteraturan administratif dan kepentingan geopolitik. Keberhasilan penetapan wilayah ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi, koordinasi antarinstansi, dan legitimasi hukum yang mendasarinya.

4.2.2 Identifikasi Kelompok Kepentingan

Gambar 4. 3 Kerjasama antar *Stakeholder* melalui Konsep Pentahelik

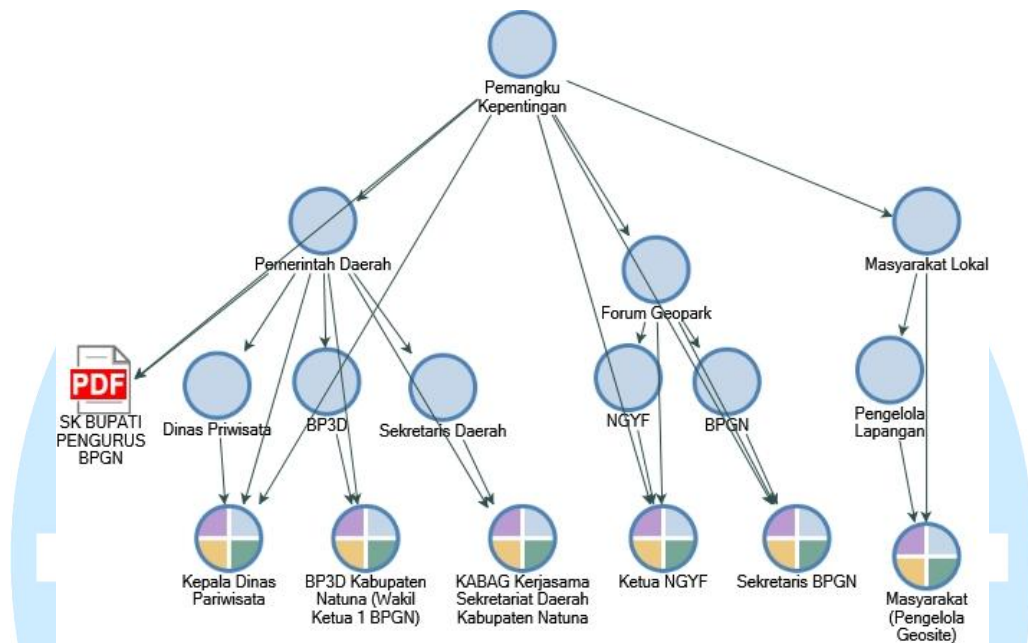


Sumber : (Olahan data primer, 2025)

Pengelolaan Geopark Nasional Natuna tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai aktor lintas sektor yang saling berinteraksi. Dalam pengembangan geopark, selain tiga pilar keragaman geologi, biologi, dan budaya, juga diperlukan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan

melalui konsep Pentahelik yang meliputi pemerintah, akademisi/institusi, komunitas, badan usaha, dan media. Dimana pemanfaatannya untuk mencapai tujuan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Gambar 4. 4 Gambar project map Identifikasi Kelompok Kepentingan



Sumber : hasil olah data Nvivo 12 pro

Berdasarkan pendekatan stakeholder mapping, ditemukan bahwa kolaborasi antara unsur pemerintah, komunitas, masyarakat lokal, serta mitra eksternal menjadi fondasi penting dalam tata kelola geopark. Dalam konteks ini, visualisasi struktur pemangku kepentingan dan data wawancara mendalam memberikan pemahaman holistik terhadap peran, relasi, serta dinamika antar aktor yang terlibat.

a) Struktur dan Peran Pemangku Kepentingan

1. Pemerintah Daerah sebagai Pilar Institusional

Pemerintah daerah merupakan aktor kunci yang memiliki otoritas formal dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan SK Bupati tentang Kepengurusan BPGN (Badan Pengelola Geopark Nasional) masa bakti 2024–2026, struktur kelembagaan dibentuk secara hierarkis dengan Bupati sebagai Ketua Umum dan berbagai kepala OPD sebagai penanggung jawab divisi-divisi tematik.

Tugas Pemerintah Daerah mencakup:

- a. Perencanaan dan Infrastruktur Geowisata (Dinas Pariwisata, PUPR, Perhubungan)
- b. Kemitraan dan Pendanaan (Dinas PMPTSP, Kabag Kerjasama)
- ★ c. Sosial, Edukasi, dan Budaya (Disdikbud, Dispar) ★
- d. Teknologi dan Promosi (Diskominfo, Bidang Pemasaran Pariwisata)
- e. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda (DPMD, Dispora)
- f. Lingkungan dan Mitigasi Bencana (DLH, BPBD, BP3D)
- g. Geoproduk dan Ekonomi Kreatif (Disperindagkop, Ekraf)

Kepala Dinas Pariwisata, sebagai bagian dari struktur ini, menekankan bahwa masyarakat sekitar perlu disosialisasikan dan dilibatkan secara aktif:

“Kalau untuk masyarakat yang awam terhadap pengetahuan jadi kita sosialisasikan bahkan masyarakat sekitar terutama itu kita libatkan, jadi libatkan sebagai pengelola nanti disitu...” (Kepala Dinas Pariwisata, 2025)

Hal ini mencerminkan pendekatan participatory governance yang mendorong keterlibatan langsung warga lokal

2. Forum Geopark: Aktor Kolaboratif dan Katalis Komunitas

Forum Geopark terdiri dari NGYF (Natuna Geopark Youth Forum) dan BPGN. NGYF berperan sebagai wadah partisipasi pemuda dalam membumikan konsep geopark kepada masyarakat. Ketua NGYF secara kultural menyebut proses ini sebagai “meng-OTG-kan pemuda” (Orang Tertular Geopark), yaitu:

“meng-OTG kan Pemuda, OTG itu Orang Tertular Geopark, dimana kami mengajak pemuda itu ikut berkontribusi dalam pengembangan Geopark Natuna.” (Ketua NGYF, 2025)

Pendekatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga  transformasional, menjadikan pemuda sebagai agen perubahan.

Di sisi lain, BPGN sebagai badan formal, memiliki fungsi koordinatif dan substantif dalam mengelola kawasan. Sekretaris BPGN menjelaskan:

“Geopark itu kawasan yang didalamnya ada unsur geologi, biologi, dan budaya yang dikelola secara terpadu untuk tujuan konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi berkelanjutan.” (Sekretaris 2 BPGN, 2025)

Pernyataan ini menegaskan paradigma integratif dan keberlanjutan dalam pengelolaan geopark.

3. Masyarakat Lokal sebagai Subjek Pemberdayaan

Masyarakat lokal, khususnya pengelola lapangan di geosite seperti Batu Kasah, merupakan elemen vital dalam operasionalisasi geopark. Partisipasi mereka bersifat langsung dan nyata:

“Alhamdulillah rame, kalau weekend pasti ada yang datang kalau di Batu Kasah ini nggak pernah kosong gitu pasti ada, setiap hari ada orang.” (Pengelola Geosite, 2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pengembangan, tetapi juga pelaku utama yang menjaga kesinambungan fungsi wisata alam dan budaya secara berkelanjutan.

Berdasarkan data wawancara dengan BP3D, disebutkan bahwa:

“Pemerintah mendorong... kalau tarik ulur memang di masyarakat ya biasalah tapi tidak punya persoalan yang serius...” (Wakil Ketua 1 BPGN, 2025)

Hal ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang umum terjadi dalam proses pemberdayaan, namun relatif terkendali karena intervensi koordinatif dari pemerintah.

4. Mitra Eksternal dan Jaringan Kolaboratif

Aspek kolaborasi lintas wilayah dan lembaga menjadi bagian penting dalam perluasan pengaruh geopark. Dua dokumen penting yang menjadi indikator hubungan eksternal adalah:

a. MoU antara BPGN dan Geopark Kebumen

Nota kesepahaman ini mencerminkan bentuk kerja sama strategis yang komprehensif antara dua entitas geopark nasional. Isi MoU meliputi pelestarian kawasan, pelatihan sumber daya manusia, penelitian, pemberdayaan masyarakat, promosi wisata, hingga pengembangan ekonomi.

Dokumen tersebut menegaskan bahwa:

“Para pihak telah dan akan terus mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat...” (sitasi)

Pernyataan ini menegaskan semangat co-management yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan geopark berstandar UNESCO

b. MoU dengan STAI Natuna

Kerja sama ini memperkuat aspek edukasi dan pembentukan kapasitas lokal, terutama dalam menyediakan dukungan akademik bagi pengembangan geopark berbasis ilmu pengetahuan dan agama. Ini penting dalam konteks sosio-kultural Natuna yang religius.

Struktur pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Nasional Natuna memperlihatkan pendekatan kolaboratif dan integratif antar unsur pemerintah, komunitas pemuda, masyarakat lokal, dan mitra eksternal. Peran setiap aktor

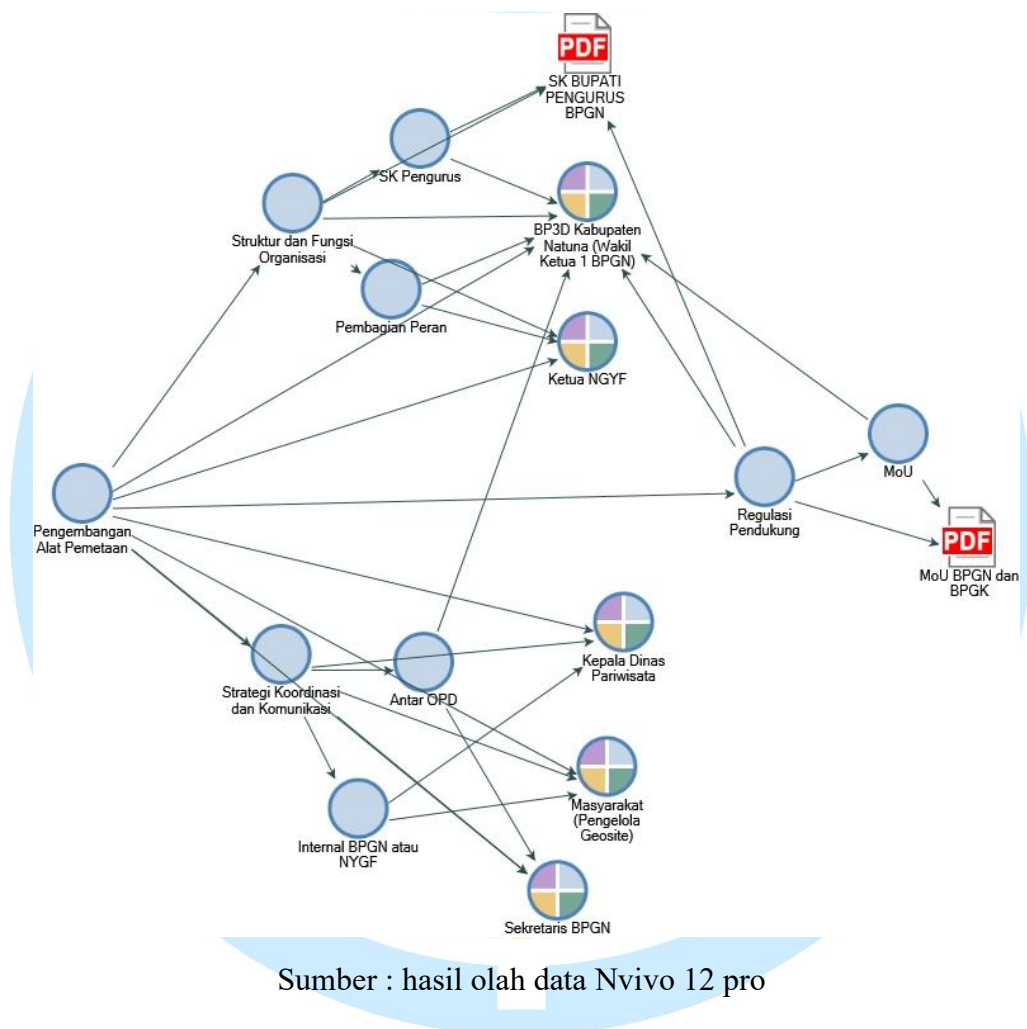
didefinisikan secara fungsional sesuai mandat dan keahliannya, namun tetap saling terhubung dalam satu visi keberlanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat, peran pemuda sebagai agen edukasi, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah dan pihak luar menunjukkan bahwa pengelolaan geopark tidak hanya sebatas pelestarian sumber daya alam, tetapi juga menjadi ruang pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan.



4.2.3 Pengembangan Alat Pemetaan

Keberhasilan pengelolaan geopark sangat ditentukan oleh keterlibatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Gambar 4. 5 Gambar project map Pengembangan Alat Pemetaan



Geopark Nasional Natuna memiliki konteks pemangku kepentingan tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah, tetapi juga komunitas, institusi pendidikan atau akademisi, media, hingga masyarakat lokal. Maka dari itu, penting untuk menyusun alat pemetaan pemangku kepentingan yang tidak

hanya menggambarkan struktur aktor, tetapi juga memetakan relasi, strategi komunikasi, serta kerangka regulatif yang membentuk dinamika tata kelola. Berbeda dari pendekatan teoretik yang umum, alat pemetaan ini dikembangkan berdasarkan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen. Tiga faktor utama menjadi dasar penyusunan alat ini, yaitu:

1. Struktur dan fungsi organisasi
2. Strategi koordinasi dan komunikasi
3. Regulasi pendukung

Berikut penjelasan terperinci

- a. Struktur dan Fungsi Organisasi

Aspek struktur menjadi penting untuk memetakan posisi formal para aktor dalam sistem pengelolaan geopark. Di Natuna, struktur ini secara resmi diatur melalui SK Bupati Natuna Nomor 660/2024, yang menetapkan pembentukan Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN).

Dalam struktur tersebut, unsur pimpinan terdiri dari:

1. Ketua Umum: Bupati Natuna
2. Wakil Ketua I: Wakil Bupati
3. Ketua Harian: Sekretaris Daerah

Struktur ini mencerminkan pendekatan top-down, dengan dominasi aktor pemerintah daerah. Namun, fungsi organisasi tidak berhenti pada tataran administratif. Fungsi substantif juga dijalankan oleh divisi-divisi tematik seperti:

1. Divisi Geowisata dan Konservasi
2. Divisi Edukasi dan Sosial Budaya
3. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda

Wakil Ketua I (BP3D) menjelaskan fungsi BPGN sebagai simpul koordinasi:

“BPGN itu ibarat simpul. Kami (BP3D) bantu menjembatani yang teknis dan masyarakat, supaya visi geopark itu bisa dibumikan.” (Wakil Ketua I BPGN, 2025)

Forum Geopark dan NGYF (Natuna Geopark Youth Forum) menjadi salah satu aktor non Struktural yang memainkan peran penting..

Ketua NGYF menyampaikan bahwa meskipun mereka tidak berada di jajaran pimpinan formal, peran mereka sangat nyata di lapangan:

“Kami yang turun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke desa. Kami menyebutnya meng-OTG-kan pemuda Orang Tertular Geopark.” (Ketua NGYF, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi organisasi tidak selalu sebanding dengan posisi struktural. Justru, aktor-aktor seperti NGYF dan pengelola geosite berperan langsung dalam operasionalisasi geopark di tingkat tapak.

b. Strategi Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi menjadi kunci keberlanjutan dalam pengelolaan geopark, terutama karena keterlibatan berbagai sektor. Di Natuna, pola koordinasi dibangun melalui pendekatan partisipatif yang menghubungkan birokrasi dengan komunitas. Dinas Pariwisata

menyampaikan bahwa mereka tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga menjadi fasilitator masyarakat:

“Kita libatkan masyarakat sekitar, terutama dalam pengelolaan geosite. Mereka punya pengetahuan lokal dan semangat menjaga.” (Kepala Dinas Pariwisata, 2025)

Forum Geopark juga mengambil peran sebagai simpul komunikasi horizontal. Keterlibatan mereka melintasi batas-batas institusional, termasuk membangun kemitraan dengan perguruan tinggi. Dalam wawancara, salah satu pengurus Forum Geopark menjelaskan:

“Kami jalin komunikasi dengan STAI Natuna, karena edukasi itu penting. Kalau masyarakat paham, mereka tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku.” (Ketua NGYF, 2025)

Strategi komunikasi yang dijalankan bersifat kontekstual dan berbasis jaringan informal. Salah satu pengelola geosite menyampaikan bahwa kedekatan personal kadang lebih efektif dibanding jalur formal:

“Kami kadang nggak nunggu surat resmi. Kalau ada kegiatan, tinggal WhatsApp kepala desa atau komunitas, langsung jalan.” (Pengelola Geosite, 2025)

Namun demikian, belum terdapat sistem komunikasi yang terstruktur dan terdokumentasi secara menyeluruh. Ini menjadi catatan penting dalam alat pemetaan: bahwa intensitas komunikasi sering tidak terekam dalam struktur, namun menentukan efektivitas kolaborasi

c. Regulasi Pendukung

Dimensi regulatif menjadi fondasi legal bagi keberlanjutan program geopark. Di Natuna, regulasi yang paling menonjol adalah SK Bupati

yang membentuk struktur pengurus BPGN. Dokumen ini memberikan legitimasi bagi pelaksanaan program, serta membagi peran kelembagaan secara resmi.

Sejumlah peran penting justru tidak memiliki dukungan regulatif yang kuat. NGYF, misalnya, menjalankan program edukasi dan promosi tanpa dasar hukum formal:

“Kita jalan dulu, regulasi menyusul. Kalau nunggu SK, bisa-bisa hilang momentumnya.” (Sekretaris 2 BPGN, 2025)

Kondisi serupa juga terjadi dalam pengelolaan geosite. Salah satu pengelola menyampaikan:

“Kami jaga lokasi, terima tamu, bersihkan area. Tapi belum ada surat atau SK dari dinas. Sementara kami jalan karena merasa punya tanggung jawab moral.” (Pengelola Geosite, 2025)

★ Inisiatif regulatif juga berkembang melalui bentuk MoU antar-lembaga, seperti antara: BPGN dan Geopark Kebumen → kerja sama konservasi, promosi, dan pertukaran pengalaman. Forum Geopark dan STAI Natuna → kerja sama edukasi dan pelatihan SDM lokal.

MoU ini menjadi bentuk regulasi non-pemerintah yang bersifat fleksibel dan kolaboratif. Meski tidak mengikat secara hukum formal, ia menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang diinisiasi dari bawah.

Pengembangan alat pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Nasional Natuna mengungkapkan bahwa struktur resmi hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan ekosistem tata kelola. Fungsi substantif, komunikasi informal, serta regulasi non-formal

memainkan peran yang sama pentingnya. Dengan menggabungkan ketiganya dalam satu kerangka, alat ini menjadi instrumen yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika lokal. Pendekatan semacam ini menjadi penting untuk direplikasi pada pengelolaan kawasan konservasi lainnya, di mana kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat keberhasilan.

Berdasarkan hasil dari analisis pemetaan aktor yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Natuna, peneliti mengidentifikasi posisi strategis setiap pihak berdasarkan struktur dan fungsi organisasi, strategi koordinasi dan komunikasi, dan regulasi pendukung yang hasilnya disajikan secara terpisah untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal. Secara rinci, tabel 4.1 menampilkan klasifikasi tingkat kekuasaan/pengaruh dan tingkat minat dari *Stakeholder* Internal yang berada di dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, sementara tabel 4.2 menyajikan hasil pemetaan yang sama untuk *Stakeholder* Eksternal yang berada di luar struktur pemerintahan namun memiliki keterlibatan signifikan dalam aktivitas Geopark.

Tabel 4. 1 Tingkat Dampak dan Minat *Stakeholder* Internal

No.	Kategori Pemangku Kepentingan	Peranan	Tingkat Kekuasaan		Tingkat Minat	
			Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1.	Bupati Kabupaten Natuna (Ketua Umum)	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
2.	Wakil Bupati Kabupaten Natuna	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓

3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
4.	Tenaga Ahli	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
5.	Ketua Harian	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
6.	Wakil Ketua I	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
7.	Wakil Ketua II	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
8.	Wakil Ketua III	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
9.	Sekretaris I	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
10.	Sekretaris II	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
11.	Divisi Perencanaan, Infrastruktur, dan Geowisata • Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kepala Dinas Perhubungan • Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah • Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR • Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dispar • Sonny Yulianto, S.T	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓

	• Sisworo Nugroho, S.Par • Ketua DPD HPI Natuna					
12.	Divisi Kerjasama, Kemitraan, Pendanaan dan Event • Bobby Rozano • Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
13.	Divisi Budaya, Sosial dan Edukasi • Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud • Destriyadi, M.A.	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
14.	Divisi Teknologi Informasi dan Promosi • Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika • Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar • Dedi Yudia, S.A.P • Intan Ratih Kumaladewi, S.Hum • Arman Salim, S.A.P	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
15.	Divisi Lingkungan, Penelitian, Konservasi dan Mitigasi Bencana • Kepala Dinas Lingkungan Hidup • Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓

	• Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BP3D • Harmidi, S.A.P • Ulfitra, S.t • Cherman					
16.	Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga • Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa DPMD • Julita Putri Santosa, S.S • Natuna Geopark Youth Forum	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓
17.	Divisi Pengembangan Geoproduk • Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro • Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar • Mirna Susanti, S.E • Riska Handayani, S.IP	Regulator, Pelaksana, dan Evaluator		✓		✓

Sumber : (Olahan Peneliti, 2025)

Tabel 4. 2 Tingkat Dampak dan Minat *Stakeholder* Eksternal

No.	Kategori Pemangku Kepentingan	Peranan	Tingkat Kekuasaan		Tingkat Minat	
			Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1.	Masyarakat	Pelaku Konservasi, Penyedia Jasa, dan Penerima Manfaat Utama	✓			✓
2.	Swasta	Mitra Investasi Strategis, Pengembang Infrastruktur, dan Penggerak Ekonomi Makro		✓		✓
3.	Media	Branding		✓	✓	
4.	Akademisi (STAI Natuna)		✓		✓	

Sumber : (Olahan Peneliti, 2025)

4.2.4 Pemetaan Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Geopark Nasional Natuna

Tata kelola Geopark juga penting untuk tidak hanya mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan peran struktural, tetapi juga berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka terhadap isu yang sedang dikelola. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik dan manajemen proyek partisipatif adalah pemetaan pengaruh berdasarkan dua dimensi: dampak (power/influence) dan minat (interest).

Pemetaan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk:

1. Menentukan strategi komunikasi yang tepat kepada tiap aktor,
2. Menyusun skala prioritas dalam pelibatan,

3. Menghindari konflik atau miskomunikasi dalam pelaksanaan program.

Pemetaan pengaruh ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil wawancara mendalam terhadap beberapa aktor kunci dalam konteks Geopark Nasional Natuna dan sesuai dengan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Analisis pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna didasarkan pada Matriks Dampak-Minat (*Power-Interest Matrix*), yang mengklasifikasikan aktor ke dalam empat kuadran strategis untuk menentukan cara interaksi yang paling tepat.

1. (*Key Players*) dampak tinggi dan minat tinggi, merupakan pemangku kepentingan utama yang harus menjalin kerja sama erat karena paling sering, pemangku kepentingan ini adalah sumber risiko terbesar bagi proyek.
2. (*Keep Informed*) dampak rendah dan minat tinggi, merupakan para pemangku kepentingan ini harus diberi tahu tentang kegiatan yang dilakukan karena hasil proyek itu sendiri relatif netral.
3. (*Monitor Only*) dampak rendah dan minat rendah, merupakan para pemangku kepentingan ini harus diberi tahu tentang kemajuan proyek dan dipantau kemungkinan perubahan sikap mereka.
4. (*Keep Satisfied*) dampak tinggi dan minat rendah, merupakan pemangku kepentingan ini harus tetap puas karena mereka dapat memberikan informasi tentang tahap akhir proyek.

Gambar 4. 6 Matriks Pengaruh Kepentingan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Geopark Natuna



Pemetaan pengaruh ini menunjukkan bahwa hasil pemetaan Matriks Johnson & Scholes yang menggabungkan *stakeholder* internal Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) dan *stakeholder* eksternal, ditemukan bahwa pemangku kepentingan terkonsentrasi di empat kuadran utama berdasarkan tingkat kekuasaan/pengaruh (*power*) dan tingkat minat (*interest*). Seluruh anggota BPGN Natuna dan Sektor Swasta berada di kuadran Pemain Kunci (*Key Players*) karena memiliki kekuasaan/pengaruh (*power*) Tinggi dan minat (*interest*) Tinggi. Kelompok ini merupakan penentu keberhasilan Geopark, sehingga strategi pengelolaan yang esensial adalah Kelola Secara Dekat (*Manage Closely*), memastikan partisipasi penuh, kolaborasi, dan konsensus dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Sementara itu,

Masyarakat Lokal yang memiliki minat (*interest*) Tinggi namun kekuasaan/pengaruh (*power*) Rendah dalam struktur formal, ditempatkan di kuadran Terus Informasikan (*Keep Informed*). Strategi BPGN terhadap Masyarakat adalah Beri Informasi Cukup dan Libatkan mereka dalam kegiatan operasional dan pemanfaatan manfaat ekonomi untuk menjaga dukungan berkelanjutan. Kemudian, Media yang kekuasaan/pengaruh (*power*) Tinggi (kemampuan membentuk opini publik) tetapi minat (*interest*) Rendah terhadap detail teknis berada di kuadran Jaga Kepuasan (*Keep Satisfied*). Strategi yang tepat adalah Jaga Kepuasan mereka dengan menyediakan informasi yang proaktif dan positif (melalui fungsi kehumasan) untuk memastikan citra Geopark yang positif di mata publik. Terakhir, Akademisi (STAI Natuna) yang memiliki kekuasaan/pengaruh (*power*) Rendah dan minat (*interest*) rendah sehingga memerlukan strategi Minimalkan Upaya (*Minimum Effort*) dengan pendekatan yang dilakukan adalah memantau mereka dari jarak jauh (*Monitor*) dan memastikan bahwa kebutuhan dasar atau informasi esensial mereka telah terpenuhi tanpa mengalokasikan sumber daya manajemen atau waktu yang berlebihan.

Hasil dari serangkaian wawancara dengan para pemangku kepentingan kunci, terlihat bahwa pengembangan Geopark Nasional Natuna tidak hanya dipandang sebagai upaya konservasi geologi, tetapi juga sebagai platform strategis untuk penguatan ekonomi lokal, promosi budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua 1 BPGN dari BP3D Kabupaten Natuna menekankan bahwa geopark dapat menjadi jalan masuk bagi pengembangan geoproduct, seperti potensi ekspor dari pulau-pulau lokal, serta keterlibatan sektor swasta melalui program CSR:

“...Pulau-pulau lokal itu bisa dikembangkan, kemudian membuka peluang untuk ekspor... ini adalah bentuk untuk mendekat dengan ekonomi di Geopark.” (Wakil Ketua 1 BPGN, 2025)

Hal ini menegaskan bahwa geopark dapat memainkan peran penting dalam mempertemukan konservasi dengan produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Hambatan struktural dan teknis tetap menjadi perhatian. Kepala Dinas Pariwisata misalnya, menggarisbawahi tantangan utama dalam aspek aksesibilitas

“Artinya Natuna punya potensi yang luar biasa, cuma aksesibilitas saja menjadi kendala.” (Kepala Dinas Pariwisata, 2025)

Di sisi lain, Sekretaris BPGN mengungkap adanya peluang sinergi antara keindahan alam dan kekayaan budaya Natuna yang dapat dioptimalkan sebagai atraksi pariwisata terpadu:

“...karena keindahan alam akan berpadu dengan budaya, itu komposisi yang sangat pas.” (Sekretaris 2 BPGN, 2025)

Terakhir, perspektif dari Kabag Kerja Sama Sekretariat Daerah memperkuat pandangan bahwa Geopark Natuna harus dilihat tidak sekadar sebagai proyek wisata, tetapi sebagai proyek berbasis sains dan pengetahuan:

“Osen Geopark ini lebih kepada saintifik.” (Kepala Bagian Kerjasama, 2025)

Dapat disimpulkan bahwa Geopark Nasional Natuna memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Namun, perlu adanya penyelarasan antara visi saintifik, strategi ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan untuk menjadikan geopark sebagai lokomotif pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan ini.

4.3 Model Pengembangan Geopark Natuna Menurut Pemangku Kepentingan

Geopark Natuna juga perlu model pengembangan yang ideal dalam pengelolaannya agar efektif dan juga berkelanjutan. Beberapa pemangku kepentingan yang terhubung dalam pengelolaan, memberikan model yang ideal untuk mengembangkan Geopark Natuna. Dengan adanya tantangan untuk model pengembangan Geopark Natuna menurut pemangku kepentingan perlu diperkuat dengan beberapa strategi agar model pengembangannya dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

4.3.1 Model Pengembangan Geopark Natuna Secara Fundamental

Model pengembangan Geopark Natuna secara fundamental berlandaskan pada konsep tiga pilar utama: konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata Natuna, menegaskan bahwa ketiga pilar ini menjadi tujuan utama dan menjadi kerangka kerja operasional utama pengelolaan Geopark. Pertama, Konservasi difokuskan pada perlindungan terpadu terhadap tiga warisan utama: *geoheritage* (keanekaragaman geologi berupa bebatuan purba dan bentang alam unik), *bioheritage* (keanekaragaman

hayati, seperti primata endemik Kekah Natuna), dan *cultural heritage* (kekayaan budaya lokal). Strategi konservasi ini sangat menekankan perlindungan *in-situ* di setiap *geosite* Natuna untuk mempertahankan integritas kawasan dari potensi kerusakan akibat pembangunan atau eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Kedua, Edukasi berfungsi sebagai instrumen vital dalam membangun kesadaran dan dukungan publik. Pilar ini diwujudkan melalui program-program penyadartahuan yang terintegrasi, seperti "Geopark to School" dan "School to Geopark". Program ini bertujuan meningkatkan literasi geologi dan lingkungan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mereka memahami nilai strategis Geopark. Edukasi juga diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan lokal, yang pada gilirannya akan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi dan pengembangan kawasan.

Ketiga, Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan diarahkan untuk memastikan bahwa penetapan Geopark memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pilar ini diimplementasikan melalui pengembangan Geotourism dan penciptaan *Geoproduct*, yang mencakup kerajinan, kuliner, dan jasa lokal. Strategi ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui diversifikasi mata pencaharian, mengubah mereka dari sekadar objek menjadi subjek pengelola *Geosite*. Dengan demikian, model ini menekankan bahwa Geopark bukan semata-mata kawasan pariwisata, melainkan sebuah kawasan yang dikelola secara

terpadu berdasarkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan, memastikan bahwa pelestarian alam dan geologi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi regional. Model tri-pilar ini, pada intinya, merupakan cetak biru bagi Natuna untuk mencapai pengakuan internasional UGG sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.3.2 Model Pengembangan Geopark Natuna dengan Pendekatan Pentahelix

Model pengembangan Geopark Natuna mengadopsi pendekatan Pentahelix dalam implementasinya, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, jurnalis, dan masyarakat. Sekretaris 2 BPGN, menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam regulasi dan dukungan kebijakan, akademisi dalam penelitian dan edukasi, jurnalis dalam promosi, dan masyarakat sebagai ujung tombak pengelolaan di lapangan. Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) menjadi koordinator utama dalam mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan ini. Meskipun demikian, dominasi PNS dalam struktur BPGN menunjukkan bahwa model ini masih sangat bergantung pada inisiatif dan dukungan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat lokal, meskipun diakui sebagai kunci, masih perlu didorong lebih lanjut agar mereka dapat secara mandiri mengelola Geosite dan merasakan dampak ekonomi secara langsung, seperti yang telah berhasil dilakukan di Geosite Batu Kasah.

Model pengembangan ini menghadapi kendala signifikan yang menghambat optimalisasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bagian

Kerjasama Sekretariat Kabupaten Natuna sama-sama menyoroti masalah aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal sebagai hambatan utama kunjungan wisatawan, yang secara langsung berdampak pada keberlanjutan ekonomi Geosite. Keterbatasan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemahaman, serta kendala anggaran, juga menjadi tantangan serius. Selain itu, isu kepemilikan lahan di Geosite yang mayoritas milik masyarakat, seringkali menghambat masuknya investasi atau bantuan dari pihak swasta (CSR) yang mensyaratkan lahan yang *clear and clear*. Wakil Ketua 1 BPGN, menambahkan bahwa pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang Geopark dan kecenderungan untuk berpikir instan dalam hal ekonomi, juga menjadi tantangan dalam mendorong partisipasi aktif mereka.

★ Dapat disimpulkan dari tantangan tersebut, model pengembangan Geopark Natuna ke depan perlu diperkuat dengan beberapa strategi. Pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kedua, pengembangan kemitraan yang lebih optimal dengan sektor swasta, tidak hanya melalui CSR, tetapi juga melalui skema investasi yang lebih terstruktur untuk pembangunan infrastruktur dan promosi. Ketiga, penguatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan dan program beasiswa yang mengarahkan penelitian ke Geopark. Keempat, fokus pada pengembangan Geosite yang sudah ada dan menunjukkan potensi, sambil terus berupaya mengatasi kendala di Geosite lainnya. Idealnya, model pengembangan ini harus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama

yang diberdayakan, sehingga mereka dapat secara mandiri mengelola dan merasakan manfaat ekonomi dari Geopark, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, bukan sebagai pelaksana tunggal. Tujuannya adalah mencapai status UNESCO Global Geopark, yang akan membawa nilai internasional dan mendorong penelitian serta kunjungan wisatawan secara lebih luas.

4.4 Pembahasan

Geopark Natuna, yang secara resmi ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada 29 November 2018, memiliki sejarah panjang yang melampaui tanggal penetapan formalnya. Gagasan pengembangan Geopark ini telah muncul sejak tahun 2014-2016, ketika tim Litbang Geologi Bandung melakukan kajian mendalam yang mengidentifikasi keunikan geologi Natuna, khususnya sebagai *Ocean Geopark*. Temuan ini, yang menyoroti keberadaan bebatuan purba berusia hingga 188 juta tahun dari kerak samudra, kerak benua, dan sungai purba, menegaskan potensi geologis Natuna yang luar biasa. Keberadaan formasi geologi yang beragam, seperti granit di Batu Kasah dan batuan yang lebih tua di Pulau Akar, menunjukkan kekayaan geodiversitas yang menjadi fondasi utama Geopark. Namun, pada masa itu, konsep Geopark belum sepopuler sekarang, sehingga inisiatif pengembangan belum mendapat perhatian luas dari pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi ilmiah telah teridentifikasi, kesadaran dan prioritas kebijakan lokal belum sepenuhnya selaras dengan visi Geopark.

Uniknya, dorongan signifikan untuk penetapan Geopark Natuna justru datang dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 2019. Motivasi di balik inisiatif ini bersifat geopolitik, yaitu sebagai upaya strategis untuk memproteksi wilayah Natuna dari ancaman eksternal, mengingat posisinya yang sangat strategis di Laut Natuna Utara dan berbatasan dengan tujuh negara. Pernyataan dari Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Natuna yang menyebutkan bahwa Geopark Natuna diusulkan oleh Kemenlu untuk mempertimbangkan geopolitik Natuna, serta upaya untuk memproteksi Natuna dari ancaman luar, menggarisbawahi dimensi keamanan dan kedaulatan yang melekat pada status Geopark ini. Ini adalah karakteristik unik Geopark Natuna yang membedakannya dari Geopark lain, di mana penetapan seringkali murni didasarkan pada nilai geologis dan ekologis. Integrasi antara tujuan konservasi alam dan budaya dengan kepentingan geostrategis ini menjadi karakteristik unik Geopark Natuna yang membedakannya dari Geopark lain.

Sejak penetapannya, pengelolaan Geopark Natuna terus berupaya berkembang, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Upaya untuk mencapai status UNESCO Global Geopark telah dilakukan sebanyak tiga kali, namun masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan sarana pendukung. Perubahan signifikan terlihat pada fasilitas penunjang di beberapa Geosite, seperti Batu Kasah dan Gunung Ranai, yang kini dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti musala, kamar bilas, area parkir, dan gazebo. Namun, perjalanan pengembangan ini tidak selalu

mulus. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan, menyebabkan *refocusing* anggaran yang menghambat program Geopark. Tantangan lain yang menonjol adalah pemahaman masyarakat lokal yang belum merata tentang konsep Geopark, isu kepemilikan lahan di Geosite yang mayoritas milik masyarakat, serta aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal. Meskipun demikian, komitmen kuat dari pimpinan daerah, khususnya Bupati, untuk menjadikan Geopark sebagai ikon Natuna, memberikan optimisme bagi pengembangan berkelanjutan di masa depan. Komitmen ini tercermin dari upaya Bupati yang "menggaungkan Geopark ini sebagai ikon ke Bupati Natuna" di berbagai kesempatan.

Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Geopark Natuna menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan melalui konsep ekonomi berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar Geopark. Keterlibatan Masyarakat sebagai pengelola Geosite dan produsen *Geoproduct* (kerajinan, kuliner, karya seni) merupakan strategi utama untuk memberdayakan ekonomi lokal. Konsep *Geoproduct* ini dirancang untuk memanfaatkan kekayaan geologi, hayati, dan budaya lokal, menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Keberhasilan Geosite Batu Kasah yang meraih juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tingkat nasional menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi langsung. Masyarakat di Batu Kasah telah merasakan dampak positif dengan membuka usaha jualan *Geoproduct* dan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber

penghidupan. Namun, tantangan aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal masih membatasi kunjungan wisatawan, sehingga pengelola Geosite belum sepenuhnya dapat bergantung pada aktivitas Geopark sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi ekonomi ada, implementasinya masih memerlukan dukungan infrastruktur dan promosi yang lebih masif, serta diversifikasi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal.

Secara sosial, pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal terhadap konsep Geopark masih bervariasi dan menjadi pekerjaan rumah yang signifikan bagi pengelola. Meskipun program "Geopark to School" dan "School to Geopark" telah digencarkan untuk meningkatkan pemahaman, masih banyak masyarakat yang menganggap Geopark hanya sebagai urusan pariwisata, bukan sebagai tanggung jawab bersama untuk konservasi dan edukasi. Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata yang menyebutkan bahwa "mereka menganggap Geopark itu pariwisata awalnya seperti itu" mengkonfirmasi adanya mispersepsi ini. Persepsi ini tercermin dari kendala kepemilikan lahan di Geosite, di mana masyarakat cenderung memilih menjual tanah daripada menjalin kerjasama pengelolaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi pengelola Geopark dengan pemahaman dan prioritas ekonomi masyarakat lokal. Namun, inisiatif seperti Komunitas Mantau Kekah di Mekarjaya yang secara mandiri menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian Kekah Natuna, serta sistem parkir berbayar di Gunung Ranai yang mulai diterapkan oleh masyarakat,

menunjukkan adanya upaya mandiri dari masyarakat untuk berpartisipasi dan memanfaatkan potensi Geopark. Ini adalah indikator positif bahwa kesadaran mulai tumbuh, meskipun belum merata.

Geopark Natuna sangat kaya dengan tradisi dan kesenian lokal seperti Mendu, kesenian Alu (Betingkah Alu Selesung), Langlang Buana, Gasing, Syair, Sulu, Paskapal, Tari Zapin Tali, dan Tari Cik Abu, serta kuliner tradisional seperti Tabel, Mie Sagu, Pedek, dan Calok. Keunikan budaya Natuna yang merupakan akulturasi budaya Melayu, Palembang, Cina, dan Vietnam menjadi daya tarik tersendiri dari aspek budayanya. Pemanfaatan budaya ini sebagai atraksi wisata, seperti permainan Alu dan kuliner tradisional, tidak hanya bertujuan untuk promosi pariwisata tetapi juga untuk konservasi dan edukasi. Penambahan narasi filosofis di balik setiap tradisi dan kuliner meningkatkan nilai edukasi dan daya tarik bagi wisatawan. Upaya pemerintah untuk mengajukan keragaman budaya ini ke sidang Warisan Budaya Tak Benda Nasional menunjukkan komitmen terhadap pelestarian dan promosi budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas Geopark. Hal ini sejalan dengan pilar *cultural diversity* yang menjadi salah satu fondasi Geopark.

Pengelolaan Geopark Natuna didasarkan pada tiga pilar utama: konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan, dengan Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) sebagai koordinator sentral. BPGN mengadopsi pendekatan Pentahelik, yang melibatkan lima unsur pemangku kepentingan: pemerintah, swasta, akademisi, jurnalis, dan masyarakat. Struktur BPGN

didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dinas Pariwisata, misalnya, bertanggung jawab atas promosi dan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup untuk konservasi, dan Dinas Pendidikan untuk edukasi. Koordinasi antar-OPD dinilai cukup baik, menunjukkan sinergi internal pemerintah daerah dalam mendukung Geopark. Namun, keterlibatan pihak di luar PNS masih menjadi tantangan, terutama karena adanya ekspektasi honorarium, yang berbeda dengan keterlibatan PNS yang bersifat otomatis. Ini menciptakan hambatan dalam mobilisasi partisipasi yang lebih luas dari sektor non-pemerintah.

Konteks *stakeholder mapping* berdasarkan matriks Johnson dan Scholes, beberapa pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai *Key Players* (pengaruh tinggi, kepentingan tinggi). Bupati Natuna adalah contoh utama, menunjukkan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam menjadikan Geopark sebagai ikon daerah, didukung oleh otoritas kebijakan dan anggaran. Dinas Pariwisata, sebagai pelaksana utama, memiliki peran krusial dalam promosi dan koordinasi, dan secara eksplisit menyatakan bahwa "untuk anggaran Geopark itu biasa ditumpangkan di Dinas Pariwisata" dan "koordinasi antar pihak-pihak pemangku kepentingan jalan baik." Kementerian Luar Negeri juga termasuk *Key Player* karena kepentingan geostrategisnya dalam mendorong status Geopark Natuna. Komite Nasional Geopark Indonesia (KNJI) dan Badan Geologi Kementerian SDM juga memiliki pengaruh tinggi sebagai penentu status

dan keberlanjutan Geopark Nasional, melalui evaluasi berkala yang mereka lakukan.

Masyarakat lokal, meskipun memiliki kepentingan tinggi terhadap dampak ekonomi dan kelestarian lingkungan, saat ini berada pada kategori *Keep Informed*. Pernyataan dari BP3D Kabupaten Natuna yang menyebutkan bahwa "kalau masyarakat bisa saja kepentingannya tinggi tapi pengaruhnya rendah" mengkonfirmasi posisi ini. Pengaruh mereka dapat meningkat melalui kesadaran dan partisipasi aktif, namun masih terbatas dalam pengambilan keputusan kebijakan. Media, meskipun penting untuk promosi dan aksesibilitas, memiliki pengaruh yang lebih terbatas pada aspek sektoral mereka. Akademisi, seperti Universitas Padjadjaran dan STAI Natuna, berperan penting dalam kajian dan edukasi, namun pengaruhnya lebih bersifat konseptual dan penelitian. Sektor swasta, saat ini tergolong *Key Player* karena perannya sedikit begitu besar melalui investasi dan CSR.

Tantangan utama dalam pengelolaan Geopark Natuna meliputi aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal, keterbatasan SDM dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang konsep Geopark. Isu kepemilikan lahan di Geosite juga menjadi hambatan signifikan, karena pihak swasta atau CSR mensyaratkan lahan yang *clear and clear* sebelum memberikan bantuan. Untuk mengatasi ini, strategi yang diupayakan meliputi peningkatan sosialisasi dan pelatihan masyarakat, pembukaan jalur akses transportasi, dan peningkatan kemitraan dengan sektor swasta melalui

skema CSR dan investasi terstruktur. Evaluasi dan monitoring berkala oleh KNJI dan Badan Geologi Kementerian SDM menjadi instrumen penting untuk perbaikan berkelanjutan, dengan harapan Natuna dapat mencapai status UNESCO Global Geopark.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek krusial namun sekaligus menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan Geopark Natuna. Kepala Dinas Pariwisata secara eksplisit menyatakan bahwa Natuna "belum sanggup, belum mampu dari aspek SDM-nya" untuk mencapai status UNESCO Global Geopark. Keterbatasan ini tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan pemahaman mendalam tentang konsep Geopark. Meskipun BPGN diisi oleh PNS, keterlibatan pihak non-PNS masih terkendala oleh ekspektasi honorarium, yang berbeda dengan PNS yang terlibat secara otomatis. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam partisipasi dan komitmen antara aktor formal dan informal, menghambat mobilisasi potensi SDM secara optimal.

Pemahaman masyarakat lokal terhadap konsep Geopark juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meskipun program "Geopark Goes to School" dan "School to Geopark" telah diinisiasi untuk menanamkan pemahaman sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi Geopark, bahkan ada yang mengira Geopark Natuna adalah nama pantai. Pernyataan dari Sekretaris 2 BPGN yang menyebutkan bahwa BPGN terus berupaya untuk "meng-OTG-kan" (Orang Tertular Geopark) masyarakat melalui berbagai

program edukasi, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman ini. Keterbatasan ini diperparah oleh kecenderungan masyarakat lokal untuk berpikir pragmatis terkait honor, dan belum sepenuhnya melihat potensi jangka panjang dari pengelolaan Geopark. Karakteristik pekerjaan di Geopark yang seringkali tidak menjanjikan secara finansial dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti nelayan, menyebabkan pengelola Geosite kesulitan untuk hidup hanya dari aktivitas Geopark, sehingga banyak Geosite belum dikelola secara optimal. Tantangan SDM juga mencakup ketersediaan tenaga ahli atau pakar Geopark, serta kesulitan dalam mempertahankan SDM lokal yang tidak memiliki latar belakang geologi namun dipaksa terlibat dalam divisi geologi.

Mengatasi keterbatasan SDM ini, berbagai rekomendasi telah diidentifikasi. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan menjadi prioritas. Program beasiswa bagi generasi muda Natuna yang kuliah di luar daerah dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian mereka ke Geopark, sehingga mereka dapat menjadi agen penyebar pemahaman Geopark setelah kembali. Ryannaldo menekankan bahwa Geopark melibatkan berbagai disiplin ilmu, tidak hanya geologi atau biologi, termasuk ekonomi dan komunikasi, membuka peluang bagi SDM dari berbagai latar belakang. Wakil Ketua 1 BPGN juga menyoroti pentingnya mendorong anak-anak muda untuk terlibat dalam pengelolaan Geopark, bahkan jika harus "dipaksakan" pada awalnya, agar mereka

memahami potensi dan manfaatnya. Pengembangan SDM yang komprehensif, mulai dari peningkatan pemahaman masyarakat hingga pembentukan tenaga ahli, menjadi kunci vital bagi keberlanjutan dan kemajuan Geopark Natuna.

Model pengembangan Geopark Natuna secara fundamental berlandaskan pada tiga pilar utama: konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Konservasi difokuskan pada perlindungan keanekaragaman geologi (bebatuan purba), hayati (Kekah Natuna), dan budaya lokal. Edukasi diwujudkan melalui program "Geopark to School" dan "School to Geopark" untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang nilai-nilai Geopark. Pengembangan ekonomi berkelanjutan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui penciptaan *Geoproduct* dan keterlibatan mereka sebagai pengelola Geosite. Model ini menekankan bahwa Geopark bukan hanya tentang pariwisata, melainkan sebuah kawasan terpadu yang dikelola untuk tujuan perlindungan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Model pengembangan Geopark Natuna mengadopsi pendekatan Pentahelik, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, jurnalis, dan masyarakat dalam pengimplementasiannya. BPGN menjadi koordinator utama dalam mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan ini. Meskipun demikian, dominasi PNS dalam struktur BPGN menunjukkan bahwa model ini masih sangat bergantung pada inisiatif dan dukungan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat

lokal, meskipun diakui sebagai kunci, masih perlu didorong lebih lanjut agar mereka dapat secara mandiri mengelola Geosite dan merasakan dampak ekonomi secara langsung, seperti yang telah berhasil dilakukan di Geosite Batu Kasah.

Model pengembangan ini menghadapi kendala signifikan yang menghambat optimalisasi, seperti aksesibilitas dan biaya transportasi yang mahal, keterbatasan SDM dan anggaran, serta isu kepemilikan lahan di Geosite. Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang Geopark dan kecenderungan untuk berpikir instan dalam hal ekonomi juga menjadi tantangan. Melihat tantangan tersebut, model pengembangan Geopark Natuna ke depan perlu diperkuat dengan strategi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, pengembangan kemitraan yang lebih optimal dengan sektor swasta (melalui CSR dan investasi terstruktur), serta penguatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan dan program beasiswa. Idealnya, model pengembangan ini harus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang diberdayakan, dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, bukan sebagai pelaksana tunggal. Tujuannya adalah mencapai status UNESCO Global Geopark, yang akan membawa nilai internasional dan mendorong penelitian serta kunjungan wisatawan secara lebih luas.

Keterlibatan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pengelolaan Geopark Natuna masih sangat terbatas dan belum formal. Berdasarkan transkrip wawancara, tidak ada

indikasi eksplisit mengenai kontrak layanan (*service contracts*) formal dengan pihak swasta untuk operasional harian Geopark. Meskipun ada pembayaran kepada masyarakat lokal sebagai pengelola Geosite, mekanisme ini belum dijelaskan sebagai kontrak layanan formal dengan entitas swasta atau individu, melainkan lebih bersifat insentif atau upah langsung. Demikian pula, tidak ada bukti adanya kontrak manajemen (*management contracts*) di mana pihak swasta mengambil alih pengelolaan aset atau fasilitas Geopark secara keseluruhan; pengelolaan masih didominasi oleh BPGN yang merupakan badan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memegang kendali penuh atas operasional dan manajemen Geopark, dengan keterlibatan swasta yang bersifat parsial dan tidak terstruktur.

Model kerjasama yang paling menonjol dan mendekati skema PPP adalah perjanjian penggunaan lahan dengan masyarakat di Batu Kasah. Perjanjian kerjasama selama 10 tahun ini dilakukan untuk memenuhi syarat *clear and clear* lahan agar Geopark dapat menerima bantuan CSR dari SKK Migas. Meskipun bukan *affermage* atau *lease contracts* dalam arti sewa aset pemerintah kepada swasta, ini merupakan bentuk kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat untuk kepentingan publik/pariwisata yang memfasilitasi masuknya dana swasta. Ini adalah contoh bagaimana kendala kepemilikan lahan dapat diatasi melalui negosiasi dan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak, membuka pintu bagi investasi swasta. Namun, kendala serupa muncul di Geosite lain seperti Senubing, di mana

masyarakat menolak perjanjian serupa, menghambat potensi bantuan dari pihak swasta. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada kesediaan dan pemahaman masyarakat lokal.

Skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan konsesi (*concessions*) juga belum banyak diterapkan atau bahkan belum ada secara formal di Geopark Natuna. Pembangunan fasilitas seperti musala, gazebo, dan toilet di Senua pada tahun 2024 dilakukan setelah pembebasan lahan oleh pemerintah, tanpa disebutkan adanya keterlibatan skema BOT dengan swasta. Demikian pula, tidak ada indikasi adanya konsesi yang diberikan kepada pihak swasta untuk pengelolaan atau pengembangan Geopark secara jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi infrastruktur besar masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan belum ada mekanisme yang menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam skala besar dengan pengembalian jangka panjang.

Terakhir, pembentukan *joint ventures* (patungan) antara pemerintah dan pihak swasta juga belum terlihat dalam pengelolaan Geopark Natuna. Kemitraan yang ada lebih bersifat kerjasama antar lembaga pemerintah, dengan institusi pendidikan (STAI Natuna), dan potensi CSR dari BUMN/swasta seperti Pertamina dan SKK Migas, yang belum tentu berbentuk *joint venture* formal. Informan secara eksplisit menyatakan bahwa peran swasta "belum begitu berperan" dan bahwa "kalau di tempat lain, ketika kita ada event, sponsor banyak, di sini itu belum ada." Hal ini menegaskan bahwa model PPP yang lebih kompleks dan terstruktur belum

menjadi praktik umum di Geopark Natuna. Harapan ke depan adalah peran swasta dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam bentuk sponsor dan kemitraan yang lebih terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan promosi Geopark, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan pengembangan Geopark secara keseluruhan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik ini digunakan untuk perbandingan dengan hasil penelitian ini.

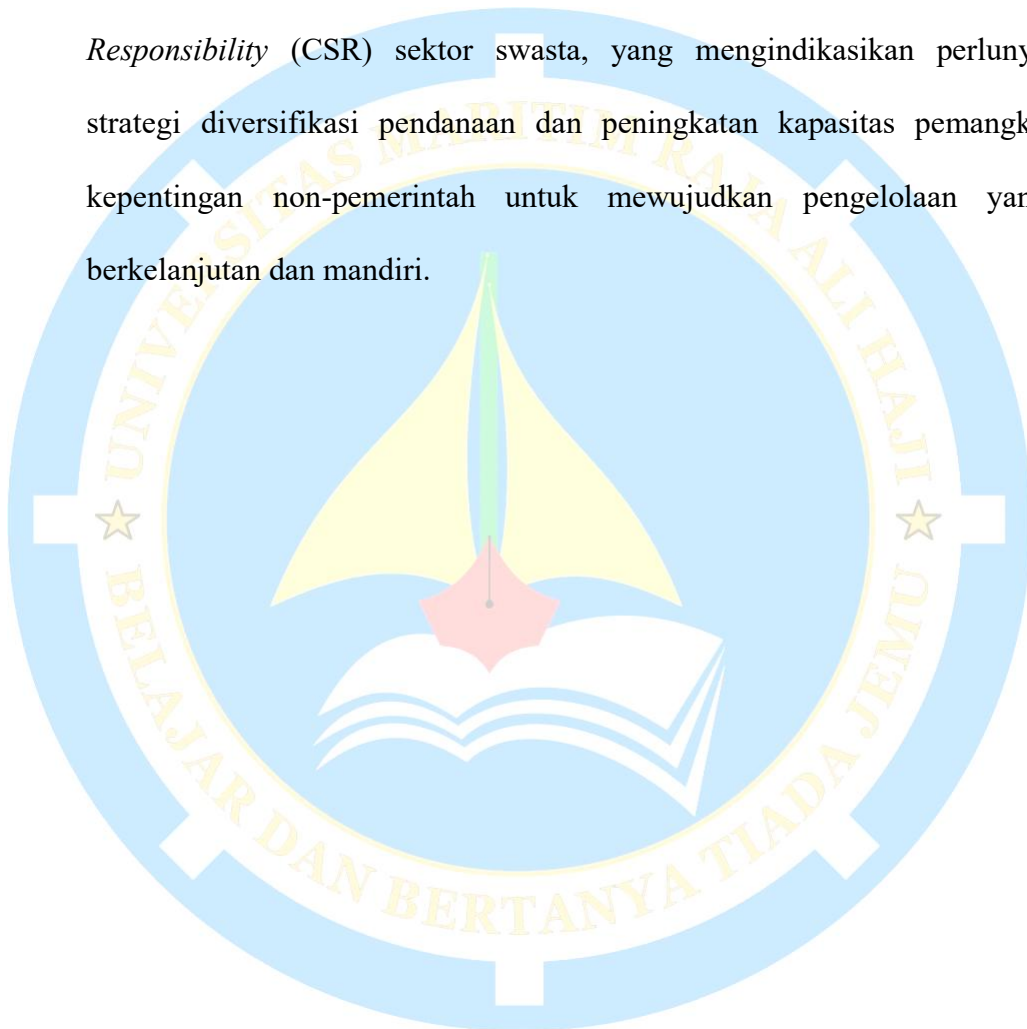
- a. Temuan bahwa BPGN (yang didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah/OPD), Bupati Natuna, Dinas Pariwisata, dan dinas lainnya yang termasuk ke dalam SK Bupati Natuna Nomor 331 Tahun 2024 merupakan Pemain Kunci (*Key Players*), hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu seperti (Adiansyah et al., 2024) Pengelolaan RTH di Mataram dan (Sartika & Yogopriyatno, 2024) Formulasi Kebijakan Persampahan di Lubuklinggau. Kedua penelitian tersebut juga menunjukkan adanya dominasi aktor pemerintah dalam proses kebijakan dan manajemen publik.
- b. Meskipun konsep Pentahelik (melibatkan lima unsur termasuk masyarakat dan swasta) diadopsi, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pihak di luar PNS (non-pemerintah) masih menjadi tantangan, terutama karena adanya ekspektasi honorarium. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Sartika & Yogopriyatno,

2024) yang menyoroti keterbatasan keterlibatan aktor non-pemerintah dan masyarakat. Posisi Masyarakat Lokal sebagai kelompok Terus Informasikan (Minat Tinggi, Pengaruh Rendah) semakin memperkuat tantangan dalam mengimplementasikan tata kelola kolaboratif secara merata dan penuh.

- c. Model pengembangan Geopark Natuna yang ideal berbasis pada tiga pilar (konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan), namun pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan anggaran ini sesuai dengan temuan (Mustajadli & Junriana, 2023) yang mengindikasikan bahwa rencana aksi BPKGN masih mengandalkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan Geopark harus terus memprioritaskan peningkatan kemitraan dengan sektor swasta melalui skema CSR dan investasi terstruktur.

Berdasarkan tiga perbandingan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola Geopark Natuna, meskipun secara konseptual mengadopsi model kolaboratif Pentahelik dan menggunakan kerangka teori *Stakeholder Mapping* untuk identifikasi, secara praktis masih menunjukkan dominasi yang kuat dari aktor pemerintah (*Key Players*), yang konsisten dengan pola manajemen publik di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari posisi Masyarakat Lokal yang

hanya dikategorikan sebagai pihak yang perlu "Terus Diinformasikan" (Minat Tinggi, Pengaruh Rendah), yang mencerminkan tantangan dalam mencapai partisipasi inklusif dan merata. Kemudian, keterbatasan anggaran dan SDM menempatkan model pengembangan Geopark menjadi sangat bergantung pada sumber daya eksternal seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) sektor swasta, yang mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi pendanaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan non-pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan mandiri.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Geopark harus didasarkan pada strategi kolaborasi yang spesifik sesuai dengan pemetaan aktor menggunakan Matriks Pengaruh-Minat (*Power-Interest Matrix*). Aktor utama atau Pemain Kunci yang wajib dikelola secara dekat (*Manage Closely*), karena memiliki pengaruh dan minat yang tinggi dalam tata kelola dan investasi, adalah Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) dan Sektor Swasta. Sementara itu, Masyarakat Lokal diklasifikasikan sebagai pihak yang harus terus diinformasikan (*Keep Informed*) karena minat tinggi mereka sebagai pelaku konservasi dan penerima manfaat utama, sedangkan Media harus dijaga kepuasannya (*Keep Satisfied*) mengingat pengaruhnya yang besar dalam membentuk citra publik. Berdasarkan pemetaan tersebut, model pengembangan Geopark Natuna yang ideal harus berlandaskan pada tiga pilar utama UNESCO Konservasi, Edukasi, dan Perekonomian Berkelanjutan yang diwujudkan melalui penguatan kolaborasi Pentahelix secara terstruktur. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas SDM lokal, optimalisasi Kemitraan Publik-Swasta (PPPs) untuk diversifikasi pendanaan, serta pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor yang kuat. Secara praktis, model ini juga memprioritaskan perbaikan aksesibilitas menuju *Geosite* dan pengembangan

geoproduct unggulan untuk mendukung promosi yang lebih agresif dan terarah di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian mengenai analisis pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Geopark Natuna ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang mencakup konteks historis, kondisi sosio-ekonomi dan budaya masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, serta model pengembangan yang diterapkan. Pertama, Geopark Natuna memiliki sejarah penetapan yang unik, tidak hanya didasarkan pada kekayaan geologis, hayati, dan budaya, tetapi juga didorong oleh pertimbangan geopolitik sebagai upaya strategis Kementerian Luar Negeri untuk memproteksi wilayah perbatasan. Keunikan ini membedakan Geopark Natuna dari Geopark lain dan memberikan dimensi keamanan serta kedaulatan pada pengelolaannya. Meskipun telah ditetapkan, Geopark Natuna masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai status UNESCO Global Geopark, terutama terkait keterbatasan SDM, sarana pendukung, aksesibilitas, dan biaya transportasi yang mahal.

Kedua, kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Geopark Natuna menunjukkan potensi besar melalui pengembangan *Geoproduct* dan keterlibatan sebagai pengelola Geosite, seperti yang berhasil ditunjukkan di Batu Kasah. Namun, tantangan aksesibilitas dan biaya transportasi masih membatasi dampak ekonomi secara luas. Secara sosial, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep Geopark masih bervariasi, seringkali hanya sebatas pariwisata, yang tercermin dari isu kepemilikan lahan dan ekspektasi ekonomi instan. Meskipun demikian, inisiatif mandiri masyarakat untuk berpartisipasi mulai

tumbuh. Dari aspek budaya, Geopark Natuna sangat kaya dengan tradisi dan kesenian lokal yang menjadi pilar penting dan dimanfaatkan untuk tujuan konservasi, edukasi, serta pariwisata.

Ketiga, tata kelola Geopark Natuna mengadopsi pendekatan Pentahelik dengan Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) sebagai koordinator sentral. Struktur BPGN didominasi oleh PNS dari berbagai OPD, menunjukkan sinergi internal pemerintah daerah yang cukup baik. Dalam pemetaan pemangku kepentingan, seluruh pemangku kepentingsn internal teridentifikasi sebagai *Key Players* dengan pengaruh dan minat tinggi. Sementara itu, masyarakat lokal, meskipun memiliki minat tinggi, masih berada pada kategori *Keep Informed* . Keterlibatan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) masih sangat terbatas dan belum formal, dengan sebagian besar investasi infrastruktur masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Keempat, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan krusial dalam pengelolaan Geopark Natuna, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun pemahaman mendalam tentang konsep Geopark. Pemahaman masyarakat yang belum merata dan ekspektasi honorarium menjadi hambatan dalam mobilisasi partisipasi non-PNS. Model pengembangan Geopark Natuna berlandaskan pada tiga pilar utama (konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan) dan pendekatan Pentahelix. Namun, optimalisasi model ini terhambat oleh kendala SDM, anggaran, aksesibilitas, dan isu kepemilikan lahan. Untuk mencapai keberlanjutan dan status UNESCO Global Geopark, diperlukan peningkatan

kesadaran masyarakat, pengembangan kemitraan optimal dengan swasta, serta penguatan kapasitas SDM lokal secara komprehensif.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teori

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoritis yang signifikan, khususnya terkait dengan teori *stakeholder mapping* dan konsep *Public-Private Partnership* (PPP) dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi seperti Geopark. Implikasi tersebut merupakan :

1. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan teori *stakeholder mapping*, khususnya matriks Johnson dan Scholes, dalam konteks pengelolaan Geopark yang multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi pemangku kepentingan tidak hanya berdasarkan posisi formal atau struktural, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika pengaruh dan kepentingan yang kompleks. Kasus Geopark Natuna menyoroti bahwa aktor-aktor non-struktural seperti masyarakat lokal, meskipun memiliki kepentingan tinggi, seringkali berada pada kuadran pengaruh rendah (*Keep Informed*). Ini mengindikasikan bahwa model *stakeholder mapping* perlu dilengkapi dengan analisis kualitatif mendalam mengenai faktor-faktor yang membatasi atau meningkatkan pengaruh suatu kelompok, seperti tingkat pemahaman, akses terhadap informasi, dan kapasitas mobilisasi. Implikasi teoritisnya adalah bahwa keberhasilan pengelolaan tidak hanya bergantung

pada identifikasi aktor kunci, tetapi juga pada strategi proaktif untuk meningkatkan kapasitas dan pengaruh pemangku kepentingan yang secara tradisional kurang berdaya, sehingga mereka dapat bergerak ke kuadran *Key Players*.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori *Public-Private Partnership* (PPP) dengan menunjukkan bahwa implementasi skema PPP dalam pengelolaan Geopark di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun teori PPP menawarkan berbagai model kerjasama (seperti *service contracts*, *management contracts*, BOT, konsesi, dan *joint ventures*), penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar model tersebut belum terimplementasi secara formal atau optimal di Geopark Natuna. Keterlibatan swasta masih didominasi oleh skema CSR yang bersifat ad-hoc atau perjanjian pemanfaatan lahan yang spesifik, bukan kemitraan jangka panjang yang terstruktur. Hal ini mengimplikasikan bahwa teori PPP perlu mempertimbangkan lebih jauh faktor-faktor kontekstual seperti isu kepemilikan lahan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kurangnya insentif bagi swasta, serta kapasitas kelembagaan lokal dalam merancang dan mengelola kontrak PPP yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan bahwa adaptasi model PPP yang lebih fleksibel dan bertahap mungkin lebih relevan untuk konteks Geopark, dimulai dari bentuk kerjasama yang lebih sederhana

sebelum beralih ke skema yang lebih kompleks dan membutuhkan investasi besar.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis yang relevan bagi pengelola Geopark Natuna, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mencapai pengelolaan Geopark yang efektif dan berkelanjutan. Implikasi tersebut merupakan :

1. Bagi Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) dan Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini menegaskan urgensi untuk memperkuat strategi komunikasi dan edukasi yang lebih terarah dan berkelanjutan kepada masyarakat lokal. Mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep Geopark, program sosialisasi tidak cukup hanya bersifat informatif, tetapi harus transformatif, menekankan manfaat ekonomi jangka panjang dan tanggung jawab konservasi. BPGN perlu mengembangkan modul pelatihan yang lebih komprehensif bagi pengelola Geosite lokal, tidak hanya terkait aspek teknis pengelolaan, tetapi juga manajemen keuangan, pemasaran *Geoproduct*, dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan aksesibilitas dan biaya transportasi ke Geosite, misalnya melalui pengembangan paket wisata terjangkau atau subsidi transportasi untuk wisatawan domestik.

2. Bagi Masyarakat Lokal dan Pengelola Geosite, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian. Masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya bergantung pada honorarium, tetapi juga mengembangkan inisiatif ekonomi kreatif berbasis *Geoproduct* yang inovatif dan memiliki nilai jual tinggi. Pengelola Geosite dapat membentuk koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengelola pendapatan secara kolektif dan menginvestasikannya kembali untuk pengembangan fasilitas. Penting juga untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Geosite sebagai aset bersama yang berkelanjutan.
3. Terkait Keterlibatan Sektor Swasta, penelitian ini menunjukkan bahwa model *Public-Private Partnership* (PPP) belum tergarap optimal. BPGN perlu proaktif dalam merumuskan skema PPP yang lebih menarik dan transparan bagi investor swasta, tidak hanya bergantung pada CSR. Ini bisa dimulai dengan proyek-proyek skala kecil yang memiliki potensi pengembalian investasi yang jelas, seperti pengembangan fasilitas penginapan ramah lingkungan, pusat informasi Geopark, atau layanan transportasi khusus. Pemerintah daerah juga perlu menyederhanakan regulasi dan proses perizinan yang berkaitan dengan investasi swasta di kawasan Geopark, serta memberikan insentif yang memadai untuk menarik minat investor.

4. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), disarankan untuk mengembangkan program beasiswa atau ikatan dinas bagi generasi muda Natuna untuk studi di bidang geologi, biologi, pariwisata, atau manajemen konservasi. Setelah lulus, mereka dapat kembali dan berkontribusi langsung dalam pengelolaan Geopark. Selain itu, BPGN dapat membentuk tim ahli multidisiplin yang melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai latar belakang ilmu (ekonomi, komunikasi, sosiologi, dll.) untuk memberikan masukan strategis dan membantu mengatasi tantangan yang kompleks. Penguatan kapasitas SDM ini akan menjadi kunci dalam mencapai status UNESCO Global Geopark dan memastikan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Natuna menuju keberlanjutan dan pencapaian status UNESCO Global Geopark :

1. Penguatan kapasitas SDM dan peningkatan pemahaman masyarakat, BPGN dan juga dinas terkait perlu merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih inovatif, interaktif, dan berkelanjutan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di tingkat komunitas. Gunakan media yang beragam dan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan esensi Geopark sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan, bukan hanya pariwisata. Libatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan. Kemudian

pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk program beasiswa bagi generasi muda Natuna yang berminat pada bidang geologi, biologi, ekowisata, atau manajemen konservasi. Setelah lulus, mereka dapat diwajibkan untuk berkontribusi dalam pengelolaan Geopark. Selenggarakan pelatihan rutin bagi pengelola Geosite lokal mengenai manajemen pariwisata, pengembangan *Geoproduct*, dan pelayanan prima. Dan BPGN juga dapat membentuk tim penasihat yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang (geologi, biologi, sosiologi, ekonomi, pariwisata, komunikasi) untuk memberikan masukan strategis dan membantu mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan Geopark.

2. Optimalisasi keterlibatan pemangku kepentingan dan model kemitraan, mendorong pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) atau koperasi di setiap Geosite untuk mengelola potensi ekonomi secara mandiri dan profesional. Fasilitasi mereka dalam pengembangan *Geoproduct* yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kemudian BPGN perlu menyusun proposal PPP yang jelas dan menarik bagi sektor swasta, tidak hanya bergantung pada CSR. Identifikasi proyek-proyek infrastruktur atau layanan yang dapat dikerjasamakan dengan swasta, seperti pengembangan fasilitas penginapan, pusat informasi, atau transportasi. Sediakan insentif fiskal atau non-fiskal bagi investor yang berinvestasi di Geopark. Dan pemerintah daerah harus proaktif dalam menyelesaikan isu kepemilikan lahan di Geosite yang masih menjadi milik masyarakat. Lakukan pendekatan persuasif dan negosiasi yang adil untuk mencapai kesepakatan kerjasama

pemanfaatan lahan jangka panjang, atau jika memungkinkan, lakukan pembebasan lahan secara bertahap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan promosi, pemerintah daerah perlu memprioritaskan perbaikan akses jalan menuju Geosite dan mengembangkan opsi transportasi yang lebih terjangkau dan efisien bagi wisatawan. Pertimbangkan kerjasama dengan maskapai penerbangan atau operator kapal untuk membuka rute baru atau memberikan diskon khusus ke Natuna. Kemudian Dinas Pariwisata dan BPGN harus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih agresif dan terarah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Manfaatkan media digital, *influencer*, dan pameran pariwisata untuk mempromosikan keunikan Geopark Natuna. Tekankan narasi geopolitik dan konservasi sebagai nilai tambah yang membedakan Geopark Natuna dari destinasi lain.
4. Penguatan tata kelola dan monitoring, BPGN perlu menyusun rencana induk pengelolaan Geopark Natuna yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan target yang jelas dan terukur untuk setiap pilar (konservasi, edukasi, ekonomi). Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja pengelolaan Geopark, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gunakan indikator yang jelas dan libatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian melakukan studi banding dan jalin kerjasama dengan Geopark lain yang telah berhasil mencapai status UNESCO Global

Geopark untuk belajar dari pengalaman terbaik mereka dalam pengelolaan, pengembangan, dan mobilisasi sumber daya.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Astuti, N. W. W., dkk. (2024). *Pariwisata Berkelanjutan Konsep dan Implementasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry dan research design: Choosing among five approaches (2nd ed)*. California: Sage Publications.
- Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Eddyono, F. (2021). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Klaus Felsing. (2008). *Public-Private Partnership (PPP) Handbook*. Filipina: Asian Development Bank.
- Kotler Philip., dkk. (2024). *Principles of Marketing: Nineteenth Edition*. Harlow: Pearson Education.
- Kurniansah, R., dkk. (2024). *Manajemen Pariwisata Pengelolaan Destinasi Wisata di Indonesia*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Nasution, S. (2025). *Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata*. Padang: Dunia Penerbitan Buku.
- Rampai, B. (2022). *Pemasaran Strategik Untuk Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Said, F., Haerul, & Farid, R. S. (2023). *Formulasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Geopark*. Makassar: ASHA Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono, D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Susanty, S., dkk. (2024). *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Bandung: Widina Media Utama.

World Bank Group. (2022). *Destination Management Handbook. A Guide to the Planning and Implementation of Destination Management*. Washington: World Bank Group.

JURNAL

Adiansyah, J. S., Johari, H. I., dan Muladi, A. (2024). Pemetaan Peran Serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Rth Publik Di Kota Mataram Dengan Pendekatan Stakeholder Analysis. *Geography : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 424. <https://doi.org/10.31764/geography.v12i1.17870>

Alfansyur, A. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>

Bratić, M., Marić Stanković, A., Pavlović, D., Pivac, T., Kovačić, S., Surla, T., Čerović, S., & Zlatanov, S. (2025). *New Era of Tourism: Innovative Transformation Through Industry 4.0 and Sustainability*. *Sustainability*, 17(9), 3841. <https://doi.org/10.3390/su17093841>

Hutabarat, L. F. (2023). Pengembangan Geopark Nasional Indonesia menuju UNESCO Global Geopark sebagai Diplomasi Geotourism Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(1), 94–106. <https://doi.org/10.26593/jihi.v19i1.6000.94-106>

Kornecká, E., Molokáč, M., Gregorová, B., Čech, V., Hronček, P., dan Javorská, M. (2024). *Structure of Sustainable Management of Geoparks through Multi-Criteria Methods*. *Sustainability*, 16(3), 983. <https://doi.org/10.3390/su16030983>

Masrurun, Z. Z., dan Nastiti, D. M. (2023). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*

Kepariwisata Indonesia, 17(1), 99–118.
<https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.99-118>

Molokáč, M., Babicová, Z., Pachinger, P., dan Kornecká, E. (2023). *Evaluation of Geosites from the Perspective of Geopark Management: The Example of Proposed Zemplín Geopark*. *Geoheritage*, 15(4), 129.
<https://doi.org/10.1007/s12371-023-00883-0>

Mustajadli, M., dan Junriana, J. (2023). Rencana Aksi Badan Pengelola Kawasan Geopark Kabupaten Natuna Dalam Pengembangan Pariwisata Menuju *Unesco Global Geopark (UGGp)*. *Governance*, 11(1), 26–39.
<https://doi.org/10.33558/governance.v11i1.5894>

Muzhaffar, M. I. (2022). Promosi Dan Edukasi Wisata Alam Geopark Tebing Keraton Melalui Animasi Motion Graphic. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(2), 112–124. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.v5i2.5832>.

Poltak, H., dan Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31–34.
<https://doi.org/10.59810/lejlace.v2i1.89>

Ramzis, N., dan Eka Puspita, R. (2024). Strategi Pengembangan Geotrail dalam Upaya Pengembangan Geowisata di Geopark Natuna, Kabupaten Natuna. *Syntax Idea*, 6(7), 3253–3258. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4183>

Rosado-González, E. M., Lourenço, J. M. M., Palacio-Prieto, J. L., dan Sá, A. A. (2023). *Collaborative mapping on sustainable development goals in Latin America UNESCO Global Geopark: A methodological discussion*. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 11(2), 203–220.
<https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2023.02.002>

Ryannaldo, dan Intan Ratih, K. (2024). Geotourism Potensial on Geoheritage in Natuna Geopark. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1424(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1424/1/012020>

Sartika, S., dan Yogopriyatno, J. (2024). Stakeholder Mapping dalam Formulasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau. *Iapa: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 375(1), 1032–1046.
<https://doi.org/10.30589/iapa.2024.1065>

Styk, K., dan Bogacz, P. (2022). *A Method for Stakeholder Mapping in Connection with the Implementation of a Development Project. Energies*, 15(4), 1592. <https://doi.org/10.3390/en15041592>

Tisnawati, E., dan Setyowati, E. (2024). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Obyek Wisata Bantaran Sungai Bedog Dusun Santan Kabupaten Bantul. *Besiru : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 218–229. <https://doi.org/10.62335/g57mcr92>

Tohopi, R., Ngabito, F. M., dan Mukdin, N. B. (2025). Implementasi *Community-Based Tourism* sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 159–171. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>

INTERNET

BINUS Tourism, 2024. (n.d.). Retrieved October 16, 2025, from <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=346b2e88870c4b12e172c5cb7d166cc10e89624bea61e05c37e89d1766a2aeb1JmltdHM9MTc2MDQ4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=32e0a34f-6052-6da5-1d3b-b5cf61536cce&psq=apakah+geopark+natuna+masuk+kspn%3f&u=a1aHR0cHM6Ly90b3VyaXNtLmJpbnVzLmFjLmlkLzIwMjQvMDgvMjYvbmF0dW5hLXJlc21pLW1lbmphZGkta2F3YXNhbi1zdHJhdGVnaXNtcGFyaXdp2F0YS1uYXNpb25hbC8&ntb=1>

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. (n.d.). Retrieved November 3, 2025, from <https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/>

Logo Geopark Natuna. (2020). <https://geoparknatuna.org/bpgn/>

Profil Geopark Natuna. (n.d.). Retrieved September 15, 2025, from <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0e0db9074b6f15f7c02c86fb2f199b78e0955c7536221c9ab2ce7c25852625e9JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=33a4a548-b696-6399-37bd-b329b7d3627e&psq=geopark+natuna&u=a1aHR0cHM6Ly9nZW9wYXJrLmRpbmFzcGFyaXdp2F0YS1uYXR1bmFrYWluZ28uaWQvc2VraWxhcycy10ZW50YW5nLWdlb3Bhcmstv&ntb=1>

LAMPIRAN

Lampiran 1 transkrip wawancara

A. Identitas informan

Nama : (H)

Pendidikan : S2 Magister Sains

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna/Wakil Ketua III BPGN

Peneliti	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Nurmadiyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tujuan saya disini untuk wawancara Bapak untuk menyelesaikan tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pengolahan Geopark Natuna. Baiklah langsung saja ya pak saya mau nanya sama Bapak, menurut Bapak bagaimana Geopark Natuna itu sendiri?
Informan	Jadi Geopark Natuna itu sebetulnya sangat-sangat unik. Jadi bahkan beberapa bupati Itu mengatakan kita jadi ikon karena satu-satunya di Kepri, kemudian di Riau, di Kalimantan Barat yang dekat berbatasan sama kita itu cuma satu-satunya yang punya Geopark Natuna. Jadi sangat-sangat menarik untuk dijual.
Peneliti	Yang membedakan Geopark Natuna sama kawasan Konservasi atau pariwisata lain itu apa Pak?
Informan	Kalau konservasi, itu ada konservasi perikanan. Kalau Geopark Natuna ada tiga hal, yang pertama karena kita memiliki Geodiversity jadi keanekaragaman berbatuan, kemudian kita juga punya Biodiversity keanekaragaman hayati, yang terakhir kita memiliki culturediversity. Jadi yang membedakan Geopark Natuna itu punya tiga tujuan yang pertama itu untuk konservasi jadi perlindungan semuanya kalau perikanan kan cuma konservasi perikanan aja kalau ini konservasi yang terutama di zona inti Itu tidak boleh diganggu-gugat sama sekali ketika zona inti itu kita rusak itu kita batal jadi Geopark, contoh misalnya Alif Stone, jadi sebetulnya tingkat bakal Geopark Natuna itu mulai dari Alif Stone

	tapi Alif Stone itu tidak bisa dimasukkan salah satu Geosite Geopark karena disitu sudah dia buat jembatan, disemen jadi tidak bisa, bahkan di batu-batu misalnya di situ ada toilet kadang-kadang orang taruh toren tong oren itu diatas batu tidak boleh, jadi di zona inti itu tidak boleh sama sekali dirubah, Itu bedanya.
Peneliti	Lalu bagaimana cara Bapak sendiri atau selaku dinas pariwisata untuk memberikan edukasi ke Masyarakat terkait Geopark Natuna ini Pak?
Informan	Jadi kalau dinas pariwisata jadi sosialisasi itu sudah dalam pelaksanaan, jadi kita ada namanya Badan Pengelolaan Geopark Natuna (BPGN) yang salah satunya jadi tujuan tadi kan pertama untuk konservasi, yang kedua itu kan untuk edukasi jadi untuk penelitian, untuk Pendidikan, jadi dia ada istilah Geopark to school jadi kita sosialisasi Geopark ke sekolah-sekolah, kemudian nanti ada school to Geopark jadi anak sekolah, mahasiswa itu kita bawa ke Geopark, jadi bentuk sosialisasi seperti itu. Tapi pada umumnya yang sosialisasi itu badan pengelolaan. Kemudian tujuan terakhir Konservasi edukasi ekonomi berkelanjutan, ketika ini jadi destinasi wisata itulah pariwisata masuk itu untuk kunjungan wisatawanannya, jadi seperti itu. Kalau untuk masyarakat yang awam terhadap pengetahuan jadi kita sosialisasikan bahkan masyarakat sekitar terutama itu kita libatkan, jadi libatkan sebagai pengelola nanti disitu disamping ada Bio, Culture, kalau Culture itu sudah masuk masyarakat jadi nanti ada istilah kalau di Geoparknya ada keterkaitan ada batunya ada hayatinya muncul budaya kehidupan masyarakat disitu dan di Geopark itu ada istilahnya Geoproduct, Geoproduct itu nanti dibuat masyarakat bisa kerajinan, bisa kuliner, bisa karya, bahkan nanti kita ada semacam event fashion show yang menggunakan beka-beka untuk kebersihan, menjaga lingkungan, jadi tema ada seperti itu menarik sekali sebenarnya Geopark.
Peneliti	Kalau untuk keragaman geologi, hayati, sama budaya yang paling menonjol di Geopark itu apa?
Informan	Kalau geologi jadi geologi kita itu punya bebatuan asalnya itu kerak samudera, kerak benua, sama sungai purba, jadi sungai purba itu ada di Tanjung Datuk, yang lainnya kerak benua sama kerak samudera yang usia bebatuannya itu sampai 188 juta tahun yang lalu, zaman jura. Jadi yang bebatuannya khas usia kerak samudera, jadi semacam kalau bisa lihat di pulau akar yang tertua itu di pulau akar sama pulau sutanau, jadi dia itu macam magma,

	magma itu sudah membeku jadi batu itu lain dari batu, kalau batu khas itu kan batu granit yang usia ada 56 Sampai 125 juta, jadi bebatuan itu unik, nah itulah. Kemudian untuk Biodiversity itu kita punya hewan endemik Natuna Kekah, bahasa latinnya Presbytis Natunae jadi satu-satunya di dunia, hanya ada di Natuna. Kalau macam Tarsius di Belitung kita punya di subi, tapi mungkin tempat lain sudah ada Natuna belum ada. Kemudian untuk kultur budayanya kalau bio nya yang betul-betul ikonik kita itu kekah dan banyak lagi yang lain sebetulnya di serasan itu ada katak sebesar kuku ibu jari kucing, banyak lagi kita kantung semar macam-macam unik di Gunung Ranai itu. Kalau untuk culturediversity kita punya mendu ayam sudur, saya pun belum tahu sebelumnya, tapi pernah kita tampilkan, tari topeng kehidupan Masyarakat, Ngempeng Midai, kita banyak lagi. Jadi macam itu.
Peneliti	Dari keanekaragaman tersebut, yang dimanfaatkan untuk tujuan konservasi dan edukasi dari pariwisata apa saja Pak?
Informan	Itulah keragaman bebatuan itu kita konservasi, terutama di zona inti itu tidak boleh memang ada tambang sepanjang pertambangan itu di luar zona inti it's oke nggak ada masalah. Kemudian untuk kekah di Mekadaya kita punya Rumah Mantau Kekah itu bentuk upaya kita untuk melindungi untuk konservasi. Kemudian baru-baru ini tapi belum diresmikan, jadi Bupati sudah mengarahkan masing-masing OPD itu kan memaparkan waktu (BNPP) Bandar Nasional Pengelolaan Perbatasan datang ke Natuna kemarin kita ada Reliyah di Serasan balik ke presentasi, jadi masing-masing apa nih saya angkat tu Geopark salah satunya Kekah, langsung sama Bupati dia kejar apa dasarnya, itu satu-satunya di dunia karena bahasa latinnya itu Presbytis Natunae dan sudah diakui, jadi selanjutnya kalau bisa kita buat konservasi dan Alhamdulillah Bupati ini kan cepat, kita sudah ada lokasi sekitar 22 Hektare khusus untuk konservasi kekah, jadi ini bentuk dari kepedulian, bentuk dari arah kebijakan dari pimpinan Natuna.
Peneliti	Kalau untuk kondisi Geopark sendiri, dari awal penetapan sampai saat ini itu gimana Pak?
Informan	Jadi awal penetapan kita itu sebagai kawasan Geopark Nasional 29 November 2018 yang lalu Itu di Pongkor di Bogor atau di Bali, saya belum disini jadi kondisinya sebetulnya kita itu sudah 3 kali didorong menuju UNESCO Global Geopark, artinya apa Geopark dunia kita ini belum sanggup belum mampu dari aspek SDM nya,

	kemudian apa dari aspek sarana pendukungnya, tapi Geopark kita ini terus berkembang jadi kita ikut jejaringnya, kita ikut konsorsium, seminar segala macam, dan ini sangat menarik bahwa kita itu menarik karena kita berbatasan dengan 7 negara, Thailand, Vietnam, Malaysia Barat, Timur kemudian Brunei juga bahkan Cina, karena kita kan merupakan jalur perdagangan dunia dari Asia ke Pasifik. Kemudian untuk budaya untuk peninggalan sejarah di Natuna, di Laut Natuna ini Ada 2, 36 titik BNKT bekas muatan barang, kapal tenggelam, jadi yang sudah diidentifikasi sama (KKP) Kementerian Perlawanan Perang ada 24 titik peninggalannya itu dari abad 9 Sampai abad 16 Dinasti Song, Dinasti Yuan, Dinasti Tang, Dinasti Meng. Jadi sangat-sangat luar biasa unik, karena perdagangan dunia dari Asia Pasifik itu sekarang masih kan, karena kita berada di ALKI 1, Selat Malaka 1A, Selat Karimata. Ada 5.000 Triliun sudah lah kapal bawa barang perdagang satu tahun unik luar biasa, jadi kita sebagai orang Natuna itu Tidak boleh biasa-biasa gitu lah.
Peneliti	Berarti ada perubahan signifikan dalam pengelolaan Geopark dari waktu ke waktu ya Pak?
Informan	Berubah, karena kan sebelumnya belum ada pengelola karena kita ini agak unik kalau kita agak unik dibandingkan Geopark tempat lain kayak Belitung, Belitung itu pariwisata ada sudah jalan, baru masuk jadi kita belum jalan pariwisatanya belum dijadikan destinasi kayak Tanjung Datuk dengan adanya Geopark jadi kita jadikan destinasi wisata dan kendala kita ini akses transportasi dan mahal, maksudnya bukan tidak berkembang tapi agak tersendat-sendat. 2018 kita ditetapkan sebagai Kawasan Geopark Nasional Natuna 2019 Akhir kita kena COVID, jadi COVID semua anggaran itu di refocusing, sehingga kita pun pusing. 2013-2014 baru kami mulai merangkap. 2015 kena pula efisiensi anggaran, jangankan nak buat program kegiatan, TPP pun tak cair. Jadi artinya, Geopark kita tetap akses cuma agak tersendat-sendat, jadi seperti itu. Apalagi Bupati baru, Beliau sangat kognet untuk ngembangkan Geopark ini, jadi dimana-mana beliau menggaungkan Geopark ini sebagai ikon ke Bupati Natuna.
Peneliti	Kalau untuk pemahaman Masyarakat lokal dengan konsep Geopark itu sudah sejauh mana Pak?
Informan	Kita terus sosialisasi, mungkin kita belum bisa seperti di Geopark Celetoh, Geopark di Batur Bali, karena disana destinasi perusahaan sudah jalan, kalau kita ini agak rumit karena destinasi

	itu Geopark itu belum merupakan destinasi wisata yang jadi destinasi wisata yang sudah jalan akses itu Batu Kasah Weekend, bahkan Batu Kasah itu Geopark Batu Kasah itu 2024 dia dapat (ADWI) Anugerah Desa Wisata Indonesia Nomor 2 kategori destinasi wisata Se-Indonesia, pertama kan 6.600 desa habis itu mengerucut jadi 500, 300, 150, 50, kita masuk 50 besar. Luar biasa Itu banyak bantuan dari Kementerian Perwisata, dari BI juga mereka kan banyak dapat drone, dapat tender, dapat sound system, dapat pedal, macam-macam, Alhamdulillah nomor 2 se-Indonesia. Artinya Natuna punya potensi yang luar biasa, cuma aksesibilitas saja menjadi kendala.
Peneliti	Berarti dari Geopark ini kan ada 7 Geosite kan Pak?
Informan	Iya, kita punya 8, Tanjung Datuk nanti Tanjung Datuk mulai dari Utara Tanjung Datuk, Gunung Ranai, Senubing, Pulau Senua, habis itu Batu Kasah, Pulau Akar, habis itu Goa Kamak itu aksesnya di portal, dipilih orang Goa Kamak, habis itu Pulau Setanau
Peneliti	Dari 8 itu yang paling unggul dan berkembang apa saja Pak?
Informan	Batu Kasah, Gunung Ranai. Nah Gunung Ranai juga apa nih sebetulnya hampir semualah, Cuma belum dikelola dengan baik, nah kita kan wisatawan kita kan itu pun wisata lokal, itu weekend di Batu Kasah, nah kalau wisatawan dari luar mereka pergi hampir ke semua tempat, Tanjung Datuk dia pergi, Mendaki Gunung Ranai, kemudian Senubing.
Peneliti	Berarti dari 8 Geosite yang paling unggul 2 itu dari awalnya terbentuk Geopark sudah ditunjukkan sebagai Geosite Pak?
Informan	Ada penelitian itu dari Universitas Padjadjaran itu kan dipimpin sama Profesor Mega, jadi diteliti, dikajinya sebelumnya. Sebelumnya juga cuma kan itu dia melihat untuk dijadikan Geosite, sebelumnya kita punya 20 lebih Potensi untuk dijadikan Geopark, dikaji itu berbatuannya kemudian hayatinya, kemudian budayanya, jadi seperti itu, nggak suka-suka dijadikan.
Peneliti	Kalau untuk interaksi Masyarakat lokal dengan Batu Kasah sama Gunung Ranai itu Pak sudah berinteraksi dengan baik belum?
Informan	Kalau Batu Kasah kan orang sudah kenal, kita sudah pasang plang juga, cuma kan belum terus berkembang, nanti mungkin ada kuliner khasnya, mungkin ada kulinernya, bentuk batunya, kemudian nanti ada souvenirnya.
Peneliti	Nah kan Bapak salah satu pemangku kepentingan dalam Geopark Natuna dalam pengelolaannya, nah keterlibatan pemangku

	kepentingan dalam mengelola Geopark itu sendiri bagaimana Pak?
Informan	Kita kalau disusunan pengurus dari SK pengurus BPG Ke Geopark Itu hampir semua itu PNS, mungkin berdasarkan tupoksi kalau kita lebih seperti itu, karena kalau kita melibatkan pihak di luar PNS itu kan agak riskan karena mereka perlu kerja karena kan ketika terbitkan SK mereka berpikir itu ada upah, ada honor, ada gaji, nah kalau pegawai ini secara otomatis terlibat bahkan semualah terlibat. Kemudian dari pihak kalau yang dari luar ada yang pemilik ownernya (NDR) Natuna Dive Resort juga.
Peneliti	Untuk peran sama tanggung jawabnya masing-masing itu Pak? Sesuai tupoksi kalau Bapak sendiri gimana?
Informan	Kalau kami kan lebih ke Pariwisata, bahkan untuk anggaran Geopark itu biasa ditumpangkan di Dinas Pariwisata. Untuk koordinasi antar pihak-pihak pemangku kepentingan jalan baik.
Peneliti	Menurut Bapak nih, dengan struktur pengurus Badan Pengelola Geopark Natuna sendiri sama (NGYF) Natuna Geopark Youth Forum itu sudah efektif dalam mengelola Geopark itu sendiri belum?
Informan	Kalau selama ini masih jalan cuman ya perlu lebih kita tingkatkan karena itu tadi keterbatasan jalan juga, kemudian mungkin know-how ilmu pengetahuan kita, jadi terkesan kita belum begitu focus. Semua ini tergantung pimpinan, pimpinan dalam hari ini Bupati Kita perlu dalam mengelola Geopark ini, kita perlukan pimpinan komit, konsisten.
Peneliti	Untuk pemangku kepentingan itu sendiri, ada kepentingan utama gak pak dalam mengelola?
Informan	Ya mungkin kepentingan utama kalau kami, kita berkepentingan Geopark itu kita jadikan destinasi wisata, baik wisata edukasi, konservasi, maupun wisata yang berkelanjutan. Artinya, wisata masal kalau konservasi kan terbatas kemudian edukasi kan untuk penelitian, mungkin ada mahasiswa geologi, kemudian kalau pantai seperti Batu Kasah itu kan wisata masal. Jadi ini kita berkepentingan, bahkan Geopark ini menjadi branding kita lah, maksudnya nilai jual promosi kita di luar satu-satunya di K3 itu cuma Natuna yang punya Geopark.
Peneliti	Pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam pengambilan Keputusan itu bagaimana Pak?
Informan	Semua mendukung, ketika misalnya Kominfo mungkin dari segi promosinya Kominfo itu mereka diaudit sama BPK mereka kan

	anggaran promosi di mereka, artinya udah 25% belum dari anggaran itu untuk promosi wisata dalam hari ini tentu Geopark kalau tidak temuan kemudian nanti dari Dinas Perhubungan itu kan kemudian kepentingannya untuk transportasi-transportasi misalnya laut, darat misalnya sekarang kan ke Selat Lampa nanti kan melalui Geosite Selat Lampa itu udah 4 kali satu hari ke Kelarik itu udah 2 kali yang dimana disana itu ada Geosite, Geopark, Natuna juga. OPD-OPD lain dinas-dinas, badan lainnya yang tidak semua mendukung, Kecamatan juga Kecamatan dukung Kecamatan, Desa dukung, bahkan desa misalnya di Mekarjaya, Mekarjaya itu biosite kita karena disitu kan ada mangrove yang bangun buat plantar dana desa, tidak ada dana-dana APBD kita, jadi mereka mandiri disana itu ada Komunitas Mantau Kekah, itu tidak ada kita bantu juga bahkan dengan ada komunitas itu kita usulkan dengan CSRnya Pertamina dapat ada rumah mantau kekahnya, jadi semua stakeholder itu jalan.
Peneliti	Untuk stakeholder itu sendiri sesuai struktur itu Pak, ada gak yang berkepentingan tinggi tapi pengaruhnya itu rendah atau sebaliknya?
Informan	Saya pikir ya sama, tidak ada yang terlalu tinggi dominan gitu, sama.
Peneliti	Berarti pengaruhnya sama-sama ya Pak?
Informan	Penting sama-sama penting kebersamaan paling gini, jadi kadang-kadang kendala kita karena Geopark ini Geosite itu dijadikan agak-agak kendala kita waktu sosialisasi tapi sekarang itu sudah oke karena mereka menganggap Geopark itu perwisata awalnya seperti itu. Itu enggak kami enggak tahu jadi macam-macam itu. Tapi sekarang sudah mulai kita sampaikan sama Bupati kita sampaikan sama Pak Sekda, Dinas lain juga. Pertama mereka pikir karena Geosite itu kan memang untuk orang wisata, mereka menganggap itu urusan perwisata, tapi sekarang sudah mulai sudah mulai paham.
Peneliti	Untuk tantangan utama yang dihadapi dalam melibatkan stakeholder yang lain itu untuk mengelola Geopark itu apa Pak?
Informan	Kita kendala kita karena ini aksesibilitas itu kata kuncinya sehingga Geosite yang kita miliki bukan hanya Geosite termasuk destinasi wisata Itu kan masih jarang dikunjungi untuk misalnya pengelola komunitas pengelola geosite itu sendiri itu kan enggak bisa karena mereka tidak bisa hidup hanya mengelola Geosite dan di Natuna kan masih ada pekerjaan yang lebih menjanjikan

	daripada ngurus itu, bagai pegi ngail misalnya itu yang masih sedikit kendala kita beda cuma ini Gunung Ranai sama Batu Kasah karena mereka sudah bisa hidup disitu jauh tempat lain berlapuk dan menunggu karena kunjungan wisata itu belum banyak karena itu lagi akses. Banyak sekali jadi kalau keindahan alam kita enggak ragukan saya keberitahu empat kali jauh lebih bagus kita, Lagoy itu tidak ada apa-apa Lagoy itu apa semua lagoy itu semua buatan dan keunggulannya dekat sama Singapura, sama dengan Batam, Batam itu orang bisa balik hari, di kita kan enggak bisa. Weekend penuh, orang enggak bisa ke sini karena transportasi itu tidak setiap waktu, tidak setiap hari, itu kendala kita.
Peneliti	kendala utamanya Pak dalam evaluasi dan monitor oleh pemerintah, efektivitas Geopark itu sendiri gimana Pak?
Informan	Jadi Tanggal 22 Sampai 26 Juli itu ada tim evaluasi dari pusat (KNJI) Komite Nasional Geopark Indonesia sama Badan Geologi Kementerian SDM itu mengevaluasi apakah Geopark Natuna ini lanjut atau tidak jadi Geopark. Tapi saya rasa InsyaAllah kita masih bahkan tahun depan rencana kita mau dorong menuju UNESCO Global Geopark, karena Natuna ini yang di samping kita itu punya apa? Cukup syarat untuk menjadi Geopark Nasional dan ada hal lain karena ini dari aspek Geopolitis dan Geostrategis Natuna ini di Laut Natuna Utara dulunya di Laut Cina Selatan jadi sebetulnya Natuna ini Ingin dijadikan yang dorong kita jadi geopark itu Kementerian Luar Negeri Jadi Natuna ini Ingin dijadikan seperti Guam sama Hawaii. Terintegrasi tiga hal pertahanan keamanan, perikanan, sama pariwisata, kalau tidak sebetulnya sudah jadi coba kena COVID kena apa lagi.
Peneliti	Nah untuk dalam mengevaluasi sama monitor itu Pak, indikator apa aja yang biasanya digunakan?
Informan	Indikator yang digunakan itu tadi, keberagaman biologi, kemudian hayati, kemudian budaya, kemudian juga keterlibatan masyarakat kesekitaran itu menikmati tak, paham tak, dari aspek kulinernya, keriaannya, kerajinannya. Jadi aktivitas ekonomi masyarakat bisa kita kembangkan, bisa kita libatkan karena ada istilahnya Geoproduct tadi, Geoproduct dia kan ada geologi, biologi kemudian budaya. Ada geoproduct, jadi produknya Geopark bagus sekali konsepnya.
Peneliti	Untuk menanggapi masukan sama keluhan dari pemangku kepentingan itu sendiri, ada mekanismenya Pak?

Informan	Ya mereka kapan-kapan bisa WR, kita bahkan kalau di pariwisata secara umum kita ada website-nya, bahkan kita ada evaluasi juga sama by website, by source.
Peneliti	Berarti untuk mengatasi tantangan sama evaluasi itu dari web itu sendiri?
Informan	Ya web, kemudian kita juga monitoring evaluasi ke lapangan. Memang kendala kita itu masih kurang sarana-perana pendukung. Karena kan di masing-masing Geosite itu mesti ada ya gazebonya, kemudian ada track-nya, jalan-nya gitu. Kan kita sudah bangun di Gunung Ranai, mungkin bisa pergi sampai ke air terjunnya. Ada toiletnya, ada tempat parkirnya, ada gazebonya. Artinya ada rest area-nya, ada gazebo. Nanti sampai ke air terjun itu ada gazebo. Jadi pelan-pelan.
Peneliti	Menurut Bapak, bentuk pengelolaan Geopark saat ini itu sudah sesuai dengan visi-misi Geopark sendiri belum Pak?
Informan	Mengarah kesana, tapi belum maksimal
Peneliti	Yang membuat belum maksimal itu apa Pak?
Informan	Ya karena SDM-nya, kemudian kendala anggarannya. SDM sma anggaran.
Peneliti	Dalam pengelolaan Geopark ini sudah ada aspek positif yang berjalan belum Pak?
Informan	Ya positifnya itu tadi, kita bisa jadikan Gunung Ranai itu sudah mulai dikunjungi. Bahkan kemarin, pernah hari Minggu sampai ratusan orang ke Gunung Ranai. Jadi positifnya pengelola Geopark itu dapat upah sebagai guide-nya, jadi seperti itu. Juga ke Senua, nanti mungkin pompong dari masyarakat bisa berdampak dengan ekonomi masyarakat.
Peneliti	Menurut Bapak ada nggak aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki?
Informan	Aspek yang perlu ditingkatkan saya rasa ini, kepemilikan lahan, karena hampir semua Geosite itu tanah milik masyarakat. Kemudian, kita perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahwa tanah, lahan yang mereka miliki di Geopark terutama, apalagi di zona inti itu, nggak usah dijual, tapi kita kerjasamakan. Jadi nanti, maksudnya tanah masyarakat nggak abis, tapi nanti masyarakat menikmati. Di Batu Kasah itu kita perjanjian kerjasama, karena kita mau dapat CSR-nya SKK Migas. SKK Migas itu syaratnya lahan itu harus clear and clear, itu kita perjanjian kerjasama 10 tahun. Kemudian di tempat lain, seperti Senubing, nggak mau. Jadi kita agak susah untuk mempanuh. Baik

	tanah APBD, kemudian tanah CSR, itu mereka tidak mau urusan dengan tanah, lahan. Mereka mau bantu ketika lahan sudah clear and clear. Termasuk Senua, Senua itu 2024 baru kita bangun. Kayak musolah, ada gazebo, ada toilet, karena kita bebaskan dulu walaupun sikit. Itu beberapa kendala kita. Memang kesadaran masyarakat kita masih rendah.
Peneliti	Menurut Bapak model pengembangan Geopark seperti apa yang ideal untuk Geopark agar lebih efektif dan berkelanjutan kedepan?
Informan	Kita berharap pengelola Geosite Geopark, kemudian masyarakat di sekitar Geosite itu, itu bisa berdampak ekonomi berkelanjutan. Jadi mereka bisa beraktivitas, ekonomi masyarakat juga bisa tumbuh dan berkembang. Mungkin kita cari modelnya, misalnya di Pulau Akar. Pulau Akar kan sebetulnya arah singgah sebentar lah. Mungkin ke depan nanti mereka bisa mancing, nanti mereka bisa kemah di pulau di depannya. Tapi basicnya itu batu kasah. Jadi intinya, ketika ekonomi masyarakat bisa masuk dengan adanya Geopark, saya pikir itulah tujuan kita. Di samping konservasi, edukasi, ekonomi masyarakat pun tumbuh berkembang.
Peneliti	Salam aini dalam pengelolaan Geopark itu sendiri ada peran kemitraan publik atau swasta tak Pak?
Informan	Kalau swasta mungkin belum begitu berperan. Karena kalau di tempat lain, ketika kita ada event, sponsor banyak, di sini itu belum ada. Jadi kita berharap peran seperti itulah. Ya paling peran-peran ini aja lah, kepala desa, jadi perangkat desa, perangkat kecamatan.
Peneliti	Ada jenis kontrak seperti BOT atau apa gitu Pak?
Informan	Kita kontrak, ya paling sama batu kasah itu saja. Kemudian kalau banyak kita, kalau kerjasama, kita kan mesti punya jejaring ini, jadi Geopark Natuna sama Geopark Belitung. Kita ada baik nasional maupun internasional. Kita rencana internasional itu sama Langkawi, Geopark Langkawi di Malaysia. Kalau sama ini BUMN, kemudian BUMD, belum. Kalau sama STAI sudah.
Peneliti	Dari Bapak sendiri ada rekomendasi nggak untuk mengatasi keterbatasan SDM-nya sama ekonominya, aksesnya gitu Pak?
Informan	Ini kita perlu sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan. Kemudian kita juga menghidupkan bagaimana di weekend, weekend itu ada transportasi khusus. Mungkin mulai dari Pantai Piwang, dari jam sekian ke sini. Dengan syarat mungkin nggak boleh bawa makanan. Jadi makan, minum, belilah di sana. Itu yang lagi kita

	bayar. Supaya setiap weekend itu, setiap Geosite itu dikunjungi. Kita punya program juga ke depan. Kita kan punya sekolah-sekolah. Nanti kita atur minggu ini sekolah mana berkunjung ke Geosite ini. Minggu depan sekolah mana, kemudian intansi mana. Jadi seperti itu, untuk menghidupkan pengelolaan Geosite.
Peneliti	Kemudian, bagaimana kontribusi Geopark Natuna ini dalam pelestarian lingkungan sama perkembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan?
Informan	Kalau pelestarian lingkungan, jelas. Jadi tujuan pertama sekali Geopark itu untuk konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan. Jadi jelas itu salah satu kewajiban. Kewajiban kita untuk perlindungan itu tanpa berusaha. Dan mulai kita inilah, kita kan banyak tuh stakeholder, ada DLH, kalau untuk bio itu kan mereka. Bahkan nanti ada rencana kita ke depan, seperti pohon-pohon yang tumbuh di Gunung Ranai itu, itu kita ada hologram. Jadi cukup kita scan, muncul. Kalau ini batang kayu besi, kayu belian. Misalnya maksimal tinggi dia, kegunaan dia untuk apa, ini kayu baharu, masih lengkap di Gunung Ranai. Ini nanti kantong semar. Jadi kita berharap seperti itu. Jadi di Geopark itu dikenal disebelah (OTG) Orang Tertular Geopark. Jadi kami dari badan Gunung Ranai Geopark itu berupaya itu menularkan Geopark itu kepada seluruh elemen masyarakat. Nanti istilah-istilah Geopark, juga di sekolah misalnya. Di sekolah ruangan-ruangan itu kita pakai untuk apa nih, nama Geosite Geopark. Ruangan Pulau Senua, Pulau Akar. Bahkan di sekolah-sekolah itu harus ada Duta Geopark. Itu-itu yang sedang kita bayangkan, Duta Geopark. Nanti ketika ada kunjungan, nanti anak SD bisa jelaskan pakai bahasa Inggris. Nanti ada Geopark Site di sekolah itu. Nanti ada satu ruangan, itu aktivitas Geopark. Mereka buat kerajinan, sedang nyamuk, jadi hal-hal seperti itu. Nanti kita kan bisa, nanti ke depan kami punya rencana nanti sekolah misalnya dari Pantai Piwang, atau dari Natuna Dive Resort, atau dari Jelita Sejuba, nanti mereka melukis. Melukis tentang ini lah, misalnya ada Geosite Pulau Senua, Geosite Tanjung Senubing, jadi itu-itu kita lombakan. Bahkan nanti kita ada apa, dulu kita pernah kita adakan lomba fotografer untuk Geopark. Nanti kita lomba buat semacam cerita tentang Geopark, melukis, habis itu fotografi. Bahkan kita ingin nanti mereka bawah laut, tanding foto, video bawah laut, video Geopark. Jadi sebetulnya keinginan kita banyak sekali, cuma di sini kan beda sama Batam, sama Tanjung Pinang. Dengan Batam

	itu, ya sudah seperti Jakarta, komunitas itu sudah terbentuk. Dan mereka itu bukan cari duit, tapi sudah pada tingkat aktualisasi diri. Bukan basic net, menurut apa ini lagi Mas Loh, Abraham Mas Loh, kalau kita di sini kan masih misalnya ketika kita pull, misalnya konsentrasi kita sama Geopark, enggak bisa makan hewan. Kalau di sana dia sudah punya, dia memang untuk aktualisasi diri. Kalau kita kan enggak, sehingga ada Geopark itu enggak ada yang ngunggu, karena dia enggak bisa hidup di situ, itulah upaya kita. Ada transportasi khusus, di weekend atau sabtu minggu, yang ke Geopark itu. Berapa satu orang, nanti jam berapa cepat lagi. Tapi dia tidak boleh bawa makanan, minuman, beli di situ, supaya hidup. Kalau bawa makanan enggak ada guna enggak untuk menghidupkan pengelola, sehingga pengelola itu betul-betul bisa hidup di situ, itu guna lah kita.
--	--

B. Identitas informan

Nama : (A)

Pendidikan : S1

Jabatan : Ketua NGYF

Peneliti	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Nurmadiyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tujuan saya disini untuk wawancara Abang untuk menyelesaikan tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pengolahan Geopark Natuna. Baiklah langsung saja ya Bang saya mau nanya sama Abang, menurut Abang bagaimana Geopark Natuna itu sendiri?
Informan	Jadi kalau dalamnya Geopark itu ke Pak Rian aja, karena dia kan secara BPGN-nya ya kan kalau kami kan sebagai dari youthnya nih, pemudanya jadi kalau kami tugasnya disini ya bagaimana kalau kami sebut meng-OTG kan Pemuda, OTG itu Orang Tertular Geopark, dimana kami mengajak pemuda itu ikut berkontribusi dalam pengembangan Geopark Natuna. Nah kalau dilihat Apa tadi pertanyaannya? Kalau dilihat Geopark itu sendiri gimana? Hari ini kan kalau kita lihat Natuna ini potensinya masih besar. Kedua, dari unsur-unsur yang ada kayak, apa namanya

	sudah dapat pengetahuan 7GZ, 7GZ sudah kan Itu kan salah satu potensi yang ada di Natuna, nah hari ini pemda kita ini kalau saya bilang kalau ingin ranahnya memajukan Natuna lewat Geopark itu bisa, tinggal gimana memfokuskan saja. Karena potensi-potensi yang ada di Geopark ini besar. Salah satu 7GZ itu, gimana dipengelola kalau kami di youth, bagaimana mensosialisasikan itu tadi gimana, apa aja sih Geopark Natuna itu, ada apa aja. Nah tugas-tugas kami seperti itu Kalau di youth ya pengembangannya.
Peneliti	Sejauh ini pemuda-pemuda Natuna ini dengan Geopark itu sendiri ada kontribusinya tak Bang?
Informan	Kontribusi mereka antusias, yang kedua kalau kontribusi yang nyata ini kita cuma minta setiap postingan tag aja, misal mereka ke Geosite Tanjung Datuk jalan-jalan, tapi tagnya ke Geopark, Itu kan bentuk promosinya juga bahwa Tanjung Datuk ini Geosite kita, atau ke Batu Kasah itu bentuk dukungannya. Kalau dukungan lain gak ada. Bentuk dukungannya kita supaya mereka paham aja dulu Geopark itu apa. Kemudian kalau di Geopark ini kan ada namanya tiga tujuannya, yang pertama konservasi, edukasi, sama pembedahan Masyarakat. Yang telah kami lakukan yang sering kami lakukan bentuknya edukasi pertama yang pentingnya, karena masyarakat belum paham Itu yang pertama. Kalau konservasi yang telah kami lakukan di tahun lalu sih kemah juga, tapi di Mekarjaya. Jadi di Natuna ada namanya Komunitas Mantau Kekah pernah dengar? Nah itu nama pemerintahnya ah diani jadi dia itu secara mandiri, belum ada ikatan dengan pemerintah. Awalnya secara mandiri kepedulian terhadap Kekah Natuna. Kekah Natuna kan ibaratnya ikon dijadikan ikon tapi dalam apa namanya bahasanya menjaganya masih kurang kepedulian ikon tapi untuk menjaganya kurang kayak contoh di Sisi Basisi ya tau? Sisi Basisi ya itu ada Kekah di kekang, di kekang dijadikan peliharaan. Sebenarnya gak boleh, udah kami sosialisasikan, mereka peduli aja jangan diganggu aja Kekah di alam udah bentuk hubungan, karena Geopark ada tiga unsur juga Biodiversity, Geodiversity, sama Culturediversity. Biodiversity Kekah masuk disitu bentuk kita gimana menyelesaikan itu, kepeduliannya, itulah peran kita.
Peneliti	Berarti Bang, untuk NGYF ini nggak turut ikut campur kali gitu ya?
Informan	Di pengelolaan ya ada yang namanya (BPGN) Badan Pengelola Geopark itu diisi oleh orang-orang yang punya kewenangan, bisa Dispar di bagian pariwisata mereka ngurus Geopark di segi

	pariwisata. Kemudian ada di OPD-OPD jenjangnya gitu, nah kami di NGYF membawahi bidang sebagai merangkul pemudanya itu tadi, Natuna Geopark Youth Forum. Jadi tugas kami, ranah kami ya di bagian itu aja, kami enggak bisa masuk ke ranah untuk mengurus itu, paling secara masukkan mungkin bisa. Kami mendapat temuan apa, memberikan masukan apa, itu mungkin bisa, tapi lebih ke pengelola BPGN itulah pengelolanya.
Peneliti	Kalau menurut Abang sejauh ini Masyarakat disini dengan Geopark itu kepeduliannya ada nggak?
Informan	Kalau dibilang 100% belum, tapi manfaatnya sudah ada. Contohnya di Cemaga, pariwisata Cemaga, Desa Cemaga itu kan ada dua Geositenya, Geosite Batu Kasah sama Geosite Pulau Akar. Yang paling berkembang itu Geosite Batu Kasah, disitu sudah ada manfaat yang dirasakan masyarakatnya, mereka bisa membuka apa namanya? Geoproduct, jualan disitu, memanfaatkan itu dan mereka juga sudah dapat word lah dari Kementerian Pariwisata RI dulu zamannya Pak Sandiaga Uno. Masyarakat sana sudah secara tidak langsung sudah mengetahui dan mereka mau mendukung itu, tapi kalau yang dari segi lain kami masih harus banyak memberikan sosialisasi edukasi pengetahuan tentang Geopark itu sih.
Peneliti	Menurut Abang, dari 8 Geosite itu yang unggul selama ini yang lebih berkembang yang mana?
Informan	Di Cemaga khusus yang di Batu Kasah yang paling secara pengelolaan kan tadi untuk konservasi, edukasi, sama kebudayaan masyarakat, nah mereka sudah 3 unsur itu sudah dapat kalau saya ngok dari segi edukasinya masyarakat sudah teredukasi bahwa cemaga itu masuk kawasan Geopark. Kemudian dari konservasi mereka turut menjaga Batu Kasah itu, gimana batu-batunya itu gak dijadikan batu bangunan. Dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat mereka sudah bisa memanfaatkan kawasan itu sebagai ladang ekonomi mereka, kalau yang lain masih jadi sebagai penikmat ibaratnya, kayak kami masyarakat ya kami menikmati sebagai buat jalan-jalan. Tapi masyarakat disana belum bisa memanfaatkan itu untuk sumber pendapatan mereka belum terkelola. Sekarang nih yang lagi digecor masyarakat itu pengelolanya yang di Gunung Ranai, nah sekarang pengelolanya bikin kayak ada parkir dibayar mau naik baru naik bayar, artinya mereka sudah mulai memikirkan bagaimana geositi dimanfaatkan untuk keberlangsungan masyarakat disitu juga.

Peneliti	Berarti dari 8 Geosite itu belum semuanya ada pengelolanya ya Bang?
Informan	Sudah ditunjuk pengelolanya, cuma pengembangannya belum optimal. Yang sudah benar-bener yang menurut aku benar-bener optimal itu ya di Cemaga itu. 7 geosite itu sudah ada pengelola semua, sudah dibentuk malah mereka sudah dapat pelatihan ke kemaren ke Kebumen atau kemana lupa, sudah diberangkatin ke salah satu Geopark yang sudah berjalan, yang sudah mandiri lah dijadikan kayak studi tour para pengelola ini diajak studi tour gimana Geopark di luar mengelolanya, dikasih lah tapi dalam mereka disininya masih perlu belajar. Nah yang sudah berkembang yang betul-betul jadi itu yang menurut saya ya karena wawancara saya, dari pandang saya.
Peneliti	Berarti itu di setiap titik Geosite kan sudah ada pengelolanya, pengelolanya itu dari masing-masing masyarakat setempat ya Bang?
Informan	Ya, diutamakan warga-warga lokal, dari masing-masing setiap pengelola itu ada dikasih dana atau segala macam buat mengelola. Nah itu ranah BPGN lah yang menjawab, gak tau kali itu, Karena mereka bisa dapat bantuan dari Kementerian, soalnya kayak di Cemaga itu mereka dapat bantuan tenda ada bantuan apa Namanya, tempat duduk wisata banyak mereka dapat bantuan dari kementerian.
Peneliti	Menurut Abang, gimana tantangan sama gimana caranya biar Geopark ini lebih dikenal orang dan wisatawan itu lebih mau ah datang ke Natuna ini?
Informan	Tantangan akses, pertama tiket mahal salah satu tantangan yang paling nyata di Natuna ya untuk mendatang ke wisatawan itu yang paling tantangan yang paling krusial akses, yang kedua tadi pemahaman masyarakat yang paling sulit di situ pemahaman Masyarakat, mereka mau menikmati tapi mereka gak mau membantu merawat, contoh kecil di Gunung Ranai, mereka mau menikmati wisatanya tapi menjaga bukan, buang sampah mereka masih kurang pemahaman itulah yang masih perlu kami gencarkan sosialisasi. Kemudian kesadaran diri itu yang paling penting kalau itu dari masyarakat sudah ada kesadaran diri lebih gampang dari Pendidikan. Dua itulah menurut saya.

C. Identitas informan

Nama : (Rn)

Pendidikan : S1

Jabatan : Sekretaris 2 BPGN

Peneliti	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Nurmadiyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tujuan saya disini untuk wawancara Bapak untuk menyelesaikan tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pengolahan Geopark Natuna. Baiklah langsung saja ya Pak saya mau nanya sama Bapak, menurut Bapak bagaimana Geopark Natuna itu sendiri?
Informan	Definisi, menurut saya Geopark itu sebuah Kawasan, sebuah kawasan yang didalamnya ada unsur geologi, ada unsur biologi, ada unsur budaya yang dikelola secara terpadu untuk tujuan konservasi atau perlindungan edukasi atau pendidikan serta peningkatan ekonomi nanti, tujuannya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Itu definisi singkatnya, tapi kalau misalnya dia, Geopark ini ada definisi resmi yang keluar di Perpres nomor 9 tahun 2019 nanti bisa dicek aja Perpres itu ya.
Peneliti	Yang membedakan Geopark Natuna ini sama destinasi pariwisata lainnya itu apa?
Informan	Perlu diketahui di awal, bahwa Geopark itu tidak hanya pariwisata, jadi tapi pariwisata bisa jadi bagian dari Geopark, pariwisata di Geopark itu masuk kalau di kementerian pariwisata itu masuk dalam ranah pariwisata minat khusus, karena tadi sesuai pengertian Geopark itu mencakup konservasi, edukasi dan peningkatan ekonomi. Nah, pariwisata itu masuknya di peningkatan ekonomi itu, jadi setelah peningkatan ekonomi kan banyak tuh bisa pariwisata, nanti pariwisata berkembang lagi di industri pariwisatanya, macam penginapan, hotel, rental mobil, jasa tour guide, segala macam. Jadi yang membedakannya adalah Itu tadi pariwisata, mungkin nanti bisa di pariwisata umum dan pariwisata minat khusus. Nah, jadi orang-orang yang ke geopark itu mereka berwisata karena Geopark itu terdapat nilai-nilai yang yang berbeda dari pariwisata umum. Pariwisata umum tuh

	semacam, ya kayak kita disini Pantai Teluk Selahang Pantai, Teluk Selahang itu termasuk wisata pariwisata umum lah, karena banyak orang kesana, tapi kalau misalnya Geopark Natuna dijadikan wisata itu kategorinya wisata minat khusus, karena nanti selain orang menikmati alamnya, orang juga akan beberapa dari mereka akan meneliti di geopark itu ada batuan, khususnya Natuna ya, ada batuan yang usianya 120 juta tahun, ada batuan yang usianya 30 juta tahun, ada batuan yang usianya 188 juta tahun. Jadi perbedaannya adalah wisata minat khusus dan wisata umum secara ini ya, pengertian gampang.
Peneliti	Untuk penerapan di Geopark sendiri terhadap edukasi sama pemberdayaan Masyarakat itu gimana?
Informan	Kalau di Geopark itu, di Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna, kita ada program namanya Geopark Goes to School, kalau di Komunitas Natuna Geopark nama kegiatannya Geo Education, itu kita ke sekolah-sekolah atau ke kampus, dan juga ke organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pelajar kita menerangkan tentang Geopark itu. Jadi pendidikan kita edukasinya sampai di situ. Jadi setelah Geopark Goes to School, kita ajak lagi mereka ke School to Geopark atau kalau Natuna Geopark Forum bikin kegiatan namanya Kemah Geopark, jadi setelah kita kasih materi di kelas, kita ajak mereka ke lokasi sambil menerangkan ini batuan harus ada sekian-sekian, setelah edukasi adalah tujuannya konservasi, jadi setelah mengetahui nilai batuan itu, nilai daerah itu, kita berharap mereka bisa melindungi situs itu dengan tidak seperti batu, kita tak memecahkan batu itu seperti ada nanti di situs biologi, di situs biologi mangrove dan kekah di Mekarjaya, kita tidak memburu kekah, kita tidak menebang mangrove secara berlebihan, seperti itu tujuan dari edukasi.
Peneliti	Untuk keanekaragaman geologi, hayati sama budaya yang paling menonjol di Geopark sendiri itu apa?
Informan	Geopark Natuna sejauh ini yang diteliti itu bebatuannya dari geologi itu adalah batuan kerak benua dan kerak samudera itu berdampingan, contoh nyatanya ada di batuan Batu Kasah sama batuan Pulau Akar, nah batuan Batu Kasah itu batu granit berasal dari kerak benua, kerak benua nanti bumi ini kan berlapis berlapis, lapis paling bawah itu kita sebut namanya kerak kerak lempeng lempeng benua, lempeng samudera, nah produk lempeng benua itu itu batu-batu granit, nanti bisa lihat di Batu Sindu, Batu Rusia, nah itu batu granit yang banyak tersebar dari selatan, Batu Kasah

	sampai Teluk Selahang dan di Gunung Ranai ada juga dari kerak samudera, kerak samudera kerak samudera itu lebih tua disini, contohnya Pulau Akar, bebatuan di Pulau Akar kenapa berdampingan karena jaraknya dekat Batu Kasah sama Pulau Akar paling jaraknya cuma 3 kilo, tapi perbedaan usia batuananya beda beda, beda sekitar 60 juta tahun perbedaannya, nah itu dari info dari peneliti Universitas Padjadjaran bandung, menyebut hal tersebut keunikannya disitu. Kalau keunikan biologinya kita punya satwa endemik kekah dengan nama ilmiahnya Presbytis Natunae, hewan itu hanya ada disini, maksudnya adalah definisinya Presbytis Natunae itu adalah primata yang menyerupai kerak, bulunya hitam, didada putih, terus ada di bagian mata putih sekeliling, jadi kayak orang pake kacamata, pake rompi dan pake kacamata berbulu hitam itu hanya ada disini, di Natuna dan di Pulau Bunguran, di Midai tak ada, di Serasan tak ada, tapi kalau bulu di warna abu-abu itu malahan di Bintan ada, jadi Presbytis Natunae tadi berbulu hitam, ada kacamata sama rompi, itu hanya ada disini di Pulau Bunguran, jadi makanya namanya Presbytis Natunae, coba kita lihat ya kalau you know nanti searching Presbytis di google akan banyak muncul akan banyak muncul saudara-saudara kekah, Presbytis Melakopos Melalopos, Presbytis Komata, Ruby, Cunda, Tomasi, nah ini mah apa, spesies Presbytis, tapi yang Natunae hanya di Natuna, kalau yang di Bintan itu saya lupa nama Presbytisnya, nah ini yang Bintan beda, coba perhatikan warnanya, warna di abu-abu, yang Natuna cenderung hitam, hitam pekat. Ini pun beda, ini bukan Kekah Natuna, ini salah nih ini bukan Kekah Natuna. Jadi Kekah Natuna itu anak Kekah Natuna warna putih saat bayi, tapi setelah besar bulu dia tumbuh jadi warna hitam kalau anaknya ya. Presbytis yang saya suka yang ini. Ini dia keren nih, rambutnya mohak, ini Tomasi. Ini ada di Sumatera, nanti di Kalimantan beda lagi, nanti di Semenanjung Malaysia itu hitam semua dia Kokah kata orang Malaysia Kokah pekerkah. Jadi sebutan kekah itu adalah untuk Presbytis Natunae, bahasa lokal itu dari unikan biologinya. Terus kita punya juga Mangrove ya, Mangrove tersebar di hampir semua tempat pesisir Air Payau, karena dia perpaduan sungai yang terendap lumpur terus timbul mangrove , terus hewan-hewan lain yang ada tapi belum diteliti Itu ada namanya Tarsius, itu adanya di Subi, Subi tapi belum masuk dalam kawasan Geopark, Subi sama Serasan, terus ada Lutung, itu primata-primata yang
--	--

	diindikasikan endemik. Endemik artinya hanya ada di satu tempat, terus dari budaya-budaya ini yang unik Natuna ini akulturasi budaya, karena dia bercampur Melayu Palembang ada disitu, Cina ada disitu, Vietnam ada disitu, kita punya keragaman budaya itu. Mendu contohnya, Mendu tau Mendu itu ceritanya di dalam cerita Mendu ada Gajah, Gajah dari mana? Kita tidak ada gajah kan di Natuna, indikasi dari Sumatera atau Thailand, Thailand kan dijulukinya Negeri Gajah Putih. Terus Mendu juga sudah masuk ke dalam (WBTB) Warisan budaya tak benda yang diakui oleh nasional, belum internasional. Masih nasional WBTB Mendu, kemudian kita punya kesenian Alu, nama resminya Betingkah Alu Selesung, sudah diakui juga oleh Nasional, kemudian ada Langlang Buana, Langlang Buana itu seperti Mendu juga dia teater, terus ada Gasing, Gasing itu yang sudah diakui, terus nanti pemerintah kita sedang mengupayakan untuk mengajukan keragaman budaya ini menuju sidang warisan budaya tak benda, biasanya setiap tahun diadakan oleh Kementerian. kalau dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekarang mungkin ranahnya di Kementerian Kementerian Kebudayaan. Terus banyak lagi ada Syair, ada Sulu, ada Paskapal kalau di Midai, Kemudian ada Tari Zapin Tali, Tari Cik Abu dari Kelarik banyak kalau budaya banyak, banyak sekali. Belum lagi makanan tradisional Tabel, Mie Sagu, apa lagi Pedek, Calok Itu.
Peneliti	Dari kenakarakteragaman yang tadi itu, untuk dimanfaatkan ketujuan konservasi, edukasi sama pariwisata itu bagaimana Pak?
Informan	Contohnya tadi misalnya, kita ambil satu contoh, jadi Alu itu kalau kita lestarikan permainan Alu itu banyaknya di Limaumanis. Pemain-pemain Alu itu adanya di Desa Limaumanis, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Jadi setelah kita konservasikan, kita melakukan upaya perlindungan itu bisa jadi atraksi wisata, baru aja kemarin saya diskusi sama sekretaris 1 Pak Tukino, katanya dia bertemu pengusaha hotel, pengusaha hotel itu bingung nak bawa tamunya kemana, coba bawa ke wisata budaya, karena Alu segala macam itu masuk ke ranah wisata budaya, karena atraksi budaya yang ditampilkan, jadi tamu-tamu yang datang bisa kita arahkan disitu. Di samping melihat keindahan alam Natuna Karena keindahan alam akan berpadu dengan budaya itu sangat komposisi yang sangat pas. Baru Alu, terus ada lagi wisata kalau tadi kan bicara wisata itu banyak cabangnya, wisata ada wisata umum, wisata minat khusus, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner

	budaya, kuliner religi, masuk dalam ranah culture diversity. Wisata budaya secara umum makanan tradisional ada orang pecinta kuliner yang sampai kuliner ekstrim, jadi datang dari jauh-jauh mungkin hanya untuk merasakan pedek, saya pengen makan pedek di tempat dia dibuat. Ada, bisa jadi wisata kalau kita konservasi dengan baik konservasi itu tidak hanya melindungi kita dengan tambahkan narasi apa sih filosofi pedek itu, bagaimana sih orang-orang dulu kok bisa terpikiran bikin pedek, kenapa ikan bilis difermentasi sampai baunya minta ampun, tapi jadi nikmat setelah di oseng. Calok bau minta ampun, tapi bisa jadi nikmat penambah selera. Dengan kita tambah narasi, jadi orang semakin menarik wisatawan luar yang hobi makan atau hobi-hobi budaya, dilihat Alu, dilihat Mendu, termasuk dengan konservasi binatang Kekah di Desa Mekarjaya itu ada hanya orang yang datang ke sana untuk melihat kekah saja, dia tak mau lihat pantai, aku ke sini mau lihat kekah, itu termasuk wisata minat khusus. Wisata minat khusus itu mereka rela menghabiskan uangnya untuk memenuhi hasratnya, beda dengan wisata umum, wisata umum kalau misalnya di pantai di Bali lebih cantik, tapi kalau wisata minat khusus tidak, orang mau diving, mau lihat kekah, dia akan rela menghabiskan uangnya untuk mencapai hasratnya. Aku jauh-jauh ke sini hanya untuk lihat kekah, hanya untuk foto kekah, hanya untuk melihat binatang alam di malam hari, itu tadi konservasi
Peneliti	Selanjutnya itu untuk kondisi Geopark dari awal penetapan sampai saat ini gimana?
Informan	Semenjak ditetapkan tahun 2018, pemerintah dengan masyarakat sekitar berupaya untuk mengembangkan daerah masing-masing yang sudah berkembang. Ini Batu Kasah Alhamdulillah pemerintah dibantu stakeholder, mendapat bantuan CSR Migas, didukung oleh masyarakat setempat mengelola daerah tersebut, meski tidak semua tapi ada beberapa site Geosite itu yang berkembang perlahan.
Peneliti	Untuk perubahan signifikan dalam pengelolaan itu sendiri dari waktu ke waktu itu apa saja?
Informan	Perubahan yang signifikan di fasilitas. Fasilitas penunjang wisata dulu Senua tak ada Pelabuhan, semenjak di Geopark ada Pelabuhan, meskipun sudah hilang pelabuhannya karena cuaca. Terus ada lagi tadi Batu Kasah, yang sebelumnya hanya kursi dari kayu, sekarang sudah lengkap ada Mushola, Kamar Bilas. Gunung

	Ranai, dulu hanya jalan setapak sekarang sudah dibuat jalan, ada fasilitas parkir, gazebo.
Peneliti	Kalau untuk pemahaman Masyarakat lokal sama seperti pemerintah daerah terhadap konsep Geopark bagaimana?
Informan	Saya tak berani bilang sudah paham semua, cuma pengurus BPGN itu sedang mengupayakan untuk istilah dia (OTG) Orang Tertular Geopark, dengan cara instruksi Bupati. Terus tadi kita ke sekolah, kita ke sekolah kan anak-anak sekolah itu bakal balik ke rumahnya, jadi mereka sudah bagian dari Masyarakat, jadi itu Upaya. Kemarin kami juga ke pengelola-pengelola Geopark untuk memberikan pemahaman lebih detail di Geoparknya masing-masing tentang Geopark. Jadi pentingnya mereka menjaga itu, pentingnya mereka konservasi.
Peneliti	Dari Geopark in ikan ada 8 Geosite, menurut Bapak Geopark mana yang lebih unggul sejauh ini yang lebih berkembang?
Informan	Batu Kasah, Batu Kasah secara fasilitas, terus secara umur batuan itu. Pulau Setanau, Pulau Setanau itu sama dengan Pulau Akar umurnya 188 juta tahun, tapi untuk pengelolaan, untuk pengelolaan itu Batu Kasah.
Peneliti	Tadi kan yang lebih unggul menurut Bapak Batu Kasah, nah Batu Kasah itu mulai dikenal dan berkembang itu sebagai bagian dari Geopark itu kapan?
Informan	Secara wisata masal Batu Kasah itu udah lama dikenal, dari ini lah udah lama lah, baru dikenal hanya tempat wisata karena memang daerah dia bagus, tapi semakin dikenal saat ditetapkan sebagai Geopark dan Batu Kasah bagian dari Geopark itu. Jadi Batu Kasah ini selain berperan sebagai tempat wisata juga berperan sebagai Lab Alam karena batuan-batuannya sudah jadi sudah jadi tempat orang penelitian. Nah nanti kalau buka paper, termasuk paper yang dijadikan referensi yang kemarin paper saya dan kawan saya itu Batu Kasah jadi objeknya. Jadi objek penelitian itu, terus yang lain-lain juga masukkan Batu Kasah sebagai objek penelitiannya. Nah jadi dia semakin dikenal sejak ditetapkan sebagai Geopark, jadi semakin menarik orang lebih ramai orang yang wisata khusus, eh wisata umum juga dan wisata minat khusus juga tertarik ke situ.
Peneliti	Kalau untuk interaksi Masyarakat lokal di Batu Kasah itu sendiri dari sebelum sampai sekarang itu gimana?
Informan	Setelah ditetapkan tadi Batu Kasah itu pengelolanya lebih mereka berimprovisasi, sekarang bikin peraturan jangan buang sampah, mari jaga lingkungan. Terus interaksi ke sosialnya juga

	mengingatkan para pengunjung untuk tidak buang sampah sembarangan. Interaksi seperti itu juga mengajak orang pengunjung untuk mengenalkan Batu Kasah itu Pulau, Pantai. Terus situsnya itu ada di sebelah kanan Situs Batu Kasah itu ada sebelah kanan Sebelah kanan Pantai, jadi pengelola mengajak pengunjung untuk ke lokasi itu.
Peneliti	Menurut Bapak gimana keterlibatan antara pemangku kepentingan dalam mengelola Geopark ini sendiri?
Informan	Pemangku kepentingan terlibat dalam tupoksi masing-masing untuk geopark ya. Contohnya Dinas Pariwisata dengan tupoksinya mempromosikan wisata, dia membantu promosi di beberapa Geosite yang ada Batu Kasah, Pulau Senua. Dinas Lingkungan Hidup yang konservasi ada di tupoksinya dia membantu pengembangan Geopark dengan cara men-support bibit-bibit tanaman yang ditanam di Geosite tadi. Dinas Pendidikan, membantu di kegiatan Geopark Goes To School edukasinya, terus memberi arahan kepada sekolah-sekolah yang di bawah pembinaannya, seperti itu bentuk dukungan pemerintah untuk Natuna ini. Termasuk sampai pusat, di ranah pusat itu Kementerian dan Lembaga itu Kementerian dan Lembaga itu melakukan tupoksinya masing-masing dalam mendukung Geopark sampai ke Badan Penanggulangan Bencana juga. Karena mitigasi bencana bagian dari konservasi, bagian dari perlindungan, ada keterkaitannya juga.
Peneliti	Untuk pihak-pihak stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Geopark itu sendiri siapa saja?
Informan	Pemda, Pemda Swasta Profesional, Profesional itu ya akademisi kita punya konsep adalah Pentahelik namanya, Pentahelik pengembangan Geopark, Pentahelik itu siapa aja? pemerintah, swasta, swasta itu BUMN, perusahaan-perusahaan, akademisi, jurnalis dan masyarakat, kelompok. Ujung tombaknya di masyarakat itu. Untuk peran sama tanggung jawabnya masing-masing stakeholder itu gimana? Peran tadi mereka punya peran di tupoksi yang melekat pada diri mereka, macam dinas itu, pemerintah itu di regulasi, di regulasi pengaturan, bikin aturan, bikin himbawan segala macam. Wartawan, teman-teman jurnalis, itu tupoksinya dia sambil mempromosikan-mempromosikan daerah, memberitakan tentang Geopark. Terus swasta, swasta itu biasanya lebih ke support dana, kemudian akademisi di penelitian,

	masyarakat di pengelolaan dan event-event biasanya dibantu oleh masyarakat juga.
Peneliti	Untuk koordinasinya antara pihak-pihak stakeholder itu sendiri dalam mengelola itu apakah sudah baik?
Informan	Sejauh ini Alhamdulillah semua mendukung
Peneliti	Nah menurut Bapak nih, untuk struktur pengurus Badan Pengelola itu sendiri sama NGYF sudah efektif dalam mengelola Geopark apa belum?
Informan	Sejauh ini efektif ya. Tidak semua mungkin tidak semua, tidak bisa saya bilang 100% efektif, cuman dengan tupoksi tadi ya, tupoksi yang mereka itu tupoksi yang mereka miliki itu ya efektif secara umum ya kalau dijabarkan ya.
Peneliti	Dalam pemangku kepentingan itu sendiri ada kepentingan utama ya?
Informan	Kepentingan utama tujuan. Tujuan utama geopark itu biasanya menuju UNESCO, UNESCO Global Geopark, tapi pembangunan berkelanjutan salah satu tujuan utama SDGs
Peneliti	Masing-masing stakeholder dalam pengambilan keputusan itu ada pengaruhnya gak?
Informan	Masing-masing stakeholder dalam pengambilan keputusan ada, tentu ada. Di Pemda, karena di Geopark ini 90% itu pengurusnya 90% Pemda, terus lebihnya adalah swasta dan profesional tadi.
Peneliti	Apa, bagaimana bentuk pengaruhnya?
Informan	Pengaruh dari keputusannya, kayak pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap oh iya contohnya program-program yang dicanangkan oleh beberapa OPD tentang Geopark, Dispar paling sering program-program perusahaan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup tahun ini kalau gak salah ada program konservasi, kemarin penanaman terumbu karang di Geosite Pulau Setanau dan Geosite Tanjung Datuk, seperti itu
Peneliti	Ada gak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah, atau sebaliknya?
Informan	Belum, sebaliknya juga gak ada
Peneliti	Untuk tantangan utama yang dihadapi dalam melibatkan sesama pemangku, koordinasi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan Geopark itu sendiri apa?
Informan	Tantangan utama kalau yang saya rasakan adalah penyamaan persepsi tentang Geopark itu kalau saya ya penyamaan persepsi dan usaha untuk meng-OTG-kan Masyarakat. Orang Tertular Geopark.

Peneliti	Nah kalau dalam mengevaluasi sama monitoring selama ini apakah sudah efektif?
Informan	Sangat efektif, justru itu yang kalau saya perbadi justru itu yang saya harapkan, karena dari situ kita bisa tahu kurang kita dimana dan saya yakin Natuna ini banyak kurangnya, karena Natuna ini lahir sebagai Geopark itu kita ada 8 sodara, kita 8 Geopark ada termasuk Bogor, Halimun, Salak, ada Sihanouk, Maninjau Di Sumatera Barat, Ranah Minang, Siloke Sawah Lunto, itu ada 8 itu secara bahasa kasar cuma ditunjuk gitu tahun 2018. Tapi setelah 2018-2019 itu orang menjadi Geopark itu susah sekali, ada satu daerah gak perlu saya sebutkan daerahnya, sampai sekarang belum diakui sebagai Geopark Nasional, padahal sudah sering ikut kegiatan. Kalau sudah Geopark Nasional minimal satu kegiatan Geopark Nasional harus diikuti, jadi setiap tahun ada beberapa kegiatan Geopark kita harus ikuti sebagai bentuk eksistensi. Geopark yang ini sudah ikut terus kegiatan belum diakui sebagai Nasional, jadi sulit untuk jadi Geopark sekarang. Natuna yang sudah dikasih ini, tapi persiapannya belum matang, makanya saya berharap dari evaluasi dan monitoring nanti tanggal akhir Juli, saya berharap memang banyak evaluasinya, agar Natuna bisa memperbaiki hal tersebut.
Peneliti	Untuk mengevaluasi itu ada gak indikator yang digukan?
Informan	Ada, dari mereka ada banyak. Mereka sudah kirim ke kita juga hal yang harus diisi, seperti tadi ya. Kita ada dokumentasinya, jadi kita tidak hanya mengisi form, kita juga mengupload foto-foto bukti kita pernah ikut gitu. Misalnya, dalam 4 tahun terakhir, Geopark Natuna ke mana aja? Ke Geopark Rinjani di Lombok, Geopark Kebumen di Jawa Tengah, Geopark Belitung, gitu. Betul nih, ada fotonya nggak? Kita kasih fotonya, gitu. Itu salah satunya. Terus program Geopark Goes To School, ada nggak? Ada, fotonya mana? Ini kita paparan ke sekolah. Terus setelah Geopark Goes to School, sekolah itu nempel nggak Geoparknya? Oh, ada. MAN, sekolah di MAN itu, program P5-nya tentang Geopark. SMP Nurul Jannah, program P5-nya Geopark juga. Jadi mereka minta buktinya. Banyak lagi, banyak. Dia ada 5 kategori, satu kategorinya bisa 20-50 pertanyaan. Mereka punya indikator untuk poin-poin sendiri untuk penilaian.
Peneliti	Nah, ada nggak mekanisme untuk menanggapi masukan ataupun keluhan dari stakeholder?

Informan	Mekanismenya, kita biasa dirapat. Dirapat pertemuan, rutinnya. Nggak rutin juga sih, cuma terapat bisa dikasih tahu.
Peneliti	Masing-masing stakeholder itu dalam mengatasi tantangan sama evaluasi itu gimana?
Informan	Kita sampai saat ini lumayan sering rapat. Besok pagi kita rapat lagi untuk mempersiapkan diri betul-betul menghadapi evaluasi. Jadi sejauh ini koordinasi saja. Kita koordinasi sama stakeholder terkait.
Peneliti	Menurut Bapak nih, sejauh ini bagaimana pengelolaan Geopark itu, sudah sesuai atau belum sama visi misi Geopark sendiri?
Informan	Kalau sesuai visi misi, sudah sesuai. Cuma belum optimal.
Peneliti	Ada aspek positif nggak dari pengelolaan Geopark sendiri yang selama ini sudah berjalan?
Informan	Aspek positifnya tadi, Natuna dikenal, kemudian jadi objek wisata dan penelitian, jadi objek masuk dalam rencana jangka panjang pembangunan.
Peneliti	Menurut Bapak, ada nggak aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam pengelolaannya?
Informan	Aspek yang perlu ditingkatkan ya, paling kalau saya kesadaran masyarakat tentang Geopark itu, karena kami pun lagi usaha untuk menyadarkan masyarakat.
Peneliti	Menurut Bapak, ada nggak model pengembangan Geopark seperti apa yang ideal untuk Geopark itu agar lebih efektif dan berkelanjutan kedepannya?
Informan	Model pengembangan Geopark itu ada di juknis. Geopark itu ada juknisnya, ada aturan-aturannya. Jadi model pengembangannya adalah, kalau menurut saya dari masyarakat, karena ujung tombak Geopark itu masyarakat. Masyarakat sudah sadar, nanti biasanya event-event dari masyarakat yang mengusulkan, yang buat. Bukan dari pemerintah, bukan tunggu pemerintah. Sebenarnya seperti itu ya, yang idealnya seperti itu.
Peneliti	Ada nggak peran publik sampai swasta yang bisa mengoptimalkan pengelolaan?
Informan	Peran publik tadi di sektor komunitas, di masyarakatnya itu berperan. Kemudian yang swasta, ya ini pengusaha-pengusaha hotel ya, pengusaha hotel, tour guide, rental mobil, peran mereka itu untuk mengoptimalkan pengelolaan.
Peneliti	Ada jenis kontrak seperti BOT, atau lain-lain gitu nggak?

Informan	Keperguruan tinggi, ke pengelola museum, ke organisasi profesi, kita ada kontrak untuk sama-sama mengembangkan Geopark. Ada MoU ke HPI, MoU ke STAI, MoU ke sesama Geopark.
Peneliti	Berarti Geopark-Geopark yang lain gitu ya?
Informan	Iya, kita Kerjasamakan, kita MoU
Peneliti	Nah menurut Bapak, ada nggak rekomendasi untuk mengatasi keterbatasan SDM sama pemahaman masyarakat itu sendiri?
Informan	Rekomendasi dari saya, sebenarnya kan Pemda Natuna sekarang sedang ngejar-ngejanya beasiswa. Beasiswa untuk adik-adik yang sekarang SMA mau kuliah. Nah menurut saya itu bisa dimanfaatkan agar untuk pengembangan Geopark gitu. Jadi dengan cara apa pun jurusanannya, nanti penelitiannya bisa diarahkan ke Geopark. Jadi Geopark nggak hanya orang, oh saya bukan orang geologi Bang, saya bukan orang biologi. Saya pun bukan ambil antropologi, nggak bisa Geopark. Tidak, Geopark itu bisa semuanya. Jurusan ekonomi bisa. Barusan di mahasiswa UIR, jurusanannya komunikasi. Judulnya Geopark, Geopark Natuna. Jadi bisa arahkan itu, nanti kan lambat laun SDM terbentuk ya, pemahaman tentang Geopark. Nanti Insya Allah mereka balik ke sini, bisa meneruskan itu pemahaman Geopark kepada kawan-kawan minimal. Itu yang dari saya.
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana Geopark Natuna dapat lebih berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan juga pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan?
Informan	Ringkasnya dari pengelolaan itu. Dari masyarakat. Betul, dari masyarakat. Jadi tadi pengelolaan Geopark itu induknya memang di masyarakat. Memang ujung tombaknya di masyarakat. Pemerintah tadi hanya membantu regulasi, swasta membantu pendanaan misalnya. Wartawan membantu pemerintahan. Jadi memang ujung tombaknya di masyarakat. Masyarakat berkontribusi itu akan kayak efek domino, akan berdampak juga pada Geopark.

D. Identitas informan

Nama : (FF)

Pendidikan :

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Peneliti	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Nurmadiyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tujuan saya disini untuk wawancara Bapak untuk menyelesaikan tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pengolahan Geopark Natuna. Baiklah langsung saja ya Pak saya mau nanya sama Bapak, menurut Bapak bagaimana Geopark Natuna itu sendiri?
Informan	Ya karena saya basicnya dari tambang-pertambangan sih basicnya, jadi saya lebih melihat kepada aspek ekologi. Jadi, sedikit cerita flashback ya, waktu saya masih di dinas pertambangan dan energi, perbuatan natural yang sekarang sudah digudasi dengan berakhirnya kemenangan dan dinas yang pertambangan energi di Kabupaten Natuna yang sekarang sudah dipahkan kepada provinsi. Jadi, waktu itu saya masih di kepala bidang geologi. Nah, tahun 2000, entah waktunya bersilapan ya, karena 2015 sampai 2017, eh 2014 sampai 2016 itu banyak datang tim dari Litbang Geologi yang ada di Bandung yang merupakan di bawah setiap kemajuan SDM. Antara lain dari pusat Litbang Geologi Dasar Tanah, terus Publik Bank Geologi dan Kelautan, terus dari Badan Arkeologi. Di 2014 sampai 2016, Natuna itu ada kegiatan serupa Geologi Kelautan, ada di Pulau Laut, Midai, Senoa, Serasan, Subi, dia keliling lah itu, dan dilakukan secara bertahap. Jadi, tim-tim akhirnya itu dari Geologi Kelautan. Nah, disimpulkan oleh mereka, keragaman geologi Natuna ini unik. Itu pakar yang bilang, utamanya malah yang di laut. Osin Geopark. Walaupun sekarang yang dimunculkan adalah Geopark yang ada di darat. Nah, waktu itu disampaikan oleh mereka, ya kenapa tidak diusulkan, atau memang dibuat fokus untuk mengembangkan keunikan geologi Natuna ini sebagai daya tarik Kabupaten Natuna yang tidak dimiliki oleh Kabupaten lain di Kepri. Waktu itu masih belum trend, Geopark itu masih belum trend waktu itu. Jadi,

	rasanya pun waktu itu awam. Cuma mereka sampaikan akan ada. Ya, masanya nanti ini akan trending Geopark ini. Waktu itu saya sudah sempat sampaikan juga ke Bupati ini, waktu itu masih zaman Pak Abdul Ammar Rizal. Cuma, belum trending ya. Waktu itu orang masih, apa-apa sih Geopark? Orang banyak, gak tau juga. Nah, di tahun 2019 itu muncullah Geopark Natuna yang diusulkan oleh Kemenlu. Dan cukup unik Natuna ini, Geoparknya bukan prakarsa dari Pemda, tapi memang diusulkan oleh Kemenlu. Mungkin dari Pak Hardinansyah pun sudah nyampaikan juga. Nah, kenapa itu yang diusulkan Kemenlu? Karena mempertimbangkan geopolitik Natuna. Jadi, sebenarnya lebih kepada upaya untuk memprotek Natuna dari ancaman dari luar. Itu makanya ditetapkan sebagai Geopark Nasional di tahun 2017-2018. Sudah cukup lama sebenarnya. Jadi, waktu itu mulailah didatangkan lagi dari Badan Geologi untuk mengkaji kembali daerah-daerah, titik-titik mana yang memang bisa diurut sebagai geositenya. Apa semua, gunung ranai. Hanya sampai segitu sih Bapak tauin. Dan sudah gak terlibat lagi banyak sih. Walaupun di dalam BPGN sekarang ini, itu masuk di dalam kerjasamanya. Karena di bagian kerjasama. Justru sebenarnya yang disampaikan oleh tim pakarnya dari pusat BPGN itu, Natuna ini yang menarik Geoparknya bukan di darat sebenarnya, karena yang di darat itu kita punya rivalnya yang pangkat itu. Yang memang secara kenampakan batu-batuan itu persis sama dengan kita di Natuna. Tapi yang kita ini yang malah di laut sebenarnya. Dan itu yang belum digarap. Bahkan belum sama sekali. Osen Geopark. Jadi memang proses pembentukan batuan kerak bumi yang di laut Natuna ini unik dan tidak dimiliki oleh di daerah lain. Ini yang mungkin ya bukan lupa ya. Sudah pernah Bapak sampaikan juga. Cuma menyampung anggaran lagi. Di tahun berapa? 2018. Bahkan Pak Wabup Natuna sudah berkesempatan datang lagi ke sana untuk menanyakan. Cuma kita gak anggaran lagi itu. Ya Bapak sudah pernah sampaikan juga di TVBDN. Osen Geopark kita ini. Jadi Osen Geopark ini lebih kepada saintifik. Dia ada di bawah laut. Jadi memang agak-agak berat juga kita. Cuma yang punya frem itu hanya Natuna. Karena orang-orang ahli itu kan yang melihatnya dari keahlian mereka. Dan kita orang awam itu gak bisa tahu pasti gitu ya. Cuma nilai-nilai saintifiknya tinggi sekali katanya. Geopark ini sudah berlangsung 2000, sudah hampir lebih 5 tahun dah ya. Sudah cukup lama, sudah dari 2018.
--	---

	Dan Bapak bilang kita cukup setahunan. Ini karena dikaji ya. Kita bisa lebih jujur melihat. Apakah mungkin sense of Geopark itu belum dimiliki oleh seluruh pengurus gitu ya. Ya karena jujur gak mudah untuk kita bilang ke masyarakat ini juga dan semacamnya. Kayaknya kalau Bapak lihat sampai sekarang itu masih belum banyak masyarakat yang tahu Geopark. Kita ini mungkin karena keperlisan kita ini lambat gitu ya. Bandingkan dengan Sumbar yang memang sudah ditetapkan juga Geopark. Malah lebih di luar mereka ditetapkan. Sekarang lagi-lagi sudah global. Sumbar itu daerah pariwisata, jadi memang akses mudah semacam. Dan orang-orang juga sudah tahu alatnya. Dan sementara kita lihat tantangannya gak mudah. Contohnya endingnya Geopark itu pariwisata pada akhirnya juga. Kita mengharapkan dengan adanya Geopark itu akan meningkatkan keingintahuan orang luar tentang Natuna. Dan sementara kita ini jarak yang jauh, ini jangan dianggap sebagai kendala juga. Justru harus bisa menimbulkan perasaan ingin tahu orang luar. Ini kayak gimana daerah keluarga ini? Ini dibandingkan dengan sumbar. Ya, Nokoba itu kan masih Indonesia banget. Kalau ini kan isu-isunya sudah bikin merinding. Perang lamb diancam oleh China.
Peneliti	Menurut Bapak, terkait kondisi Geopark dari dulu sampai sekarang itu gimana Pak? Ada perkembangan atau nggak?
Informan	Yang baru nampak oleh Bapak itu baru kayak atribut-atribut Geopark, ada Geosite di sini. Cuma yang dibutuhkan sebenarnya itu masyarakat. Antusias masyarakat terhadap Geopark itu. Nah, kadang Bapak main ke Pantai Piwang, Bapak itu gak tulisan Geopark Natuna, kadang isu-isu. Dia nanya ke anak-anak sekolah malah, Ya tau gak kalian Geopark itu? Yang mereka lihat, ya pantai, malah dibilangnya pantai, Pak. Itu Geopark Natuna, itu Pantai Piwang sangkanya. Ya banyak yang belum tahu gitu ya. Dan itu memang enggak mudah juga sih. Istilahnya juga agak kebara-baratan gitu Geopark. Nah, sementara juga kita memberikan pemahaman ke rakyat-rakyat bawah, pelaku-pelakunya apalagi, pelayanan, semacam. Memang yang perlu pas, formula yang tepatnya gimana sih membangun Geopark Natuna kita biar cepat gitu ya. Memang ini, ya Bapak tahu juga ada macam-macam cara gitu ya. Orang-orang pasar semua di dalam gitu, kalau yang di dalam gak ada Pak Sri, Pak Nitasa, kalian harus, apa ya, caranya mungkin out of the box kayaknya ya, mungkin gitu loh.

Peneliti	Kalau untuk pengelolaan dalam geosite-geosite yang gitu Pak, menurut Bapak sudah optimal apa belum?
Informan	Belum. Yang melahir, yang ditungguin kadang ngacuh aja gitu, kadang orang ini ada honor apa enggak, itu muncul juga pada majalah. Ya gimana ada honor, itu emang masih sepi kayak gitu kan. Nah kita mengharapkan geosite yang ada, yang menunjuk datang dan gitu lah mungkin. Sekarang sepi gitu kan. Dan memang, pelik mungkin ya, cara meramaikan Natuna ini gimana sih gitu, yang orang datang, tiket pesawat udah lebih mahal sama kita kan. Ada kawan-kawan waktu itu, pas dipinang, ya mereka reuni. Nah dia bilang, ya panggilan saya, ini pengen main ke Natuna lah. Ya penasaran katanya gitu. Kalau pinang kan udah sering, karena teman-teman yang dijaga-jaga gitu. Pas diliat, mahal itu. Hari ini bingung nggak ada lagi, yang untukbaliknya kan, yang waktu itu masih belum ada. Akhirnya mereka, nggak jadi-jadi. Udah tuh kena wing. Dua puluh empat, dua puluh tiga. Mahal sekali. Nah, kalau orang, takutnya orang datang kesini apa, ya kecewa gitu. Udah datang kesini lihat, kok cuma ini aja sih? Gitu kan? Orang yang udah lihat-lihat tempat lain tuh kan, yang dibandingkan tuh macam-macam lombok, macam belitung gitu kan. Nah kalau kita lihat, jujur kan masih gini-gini aja sebenarnya. Paling, kalau yang baru kan masih ada, resort yang baru itu memang, tapi itu pun sepi kan? Orang sering datang kesini juga, kalau kita pikir-pikir gimana, ya kalau ada tamu, bisa nggak diarahkan gitu. Memang harus ada. Tidak terlalu besar yang, ekstrim kayak gini. Cuma memang tiket pesawat tuh, itu pertama. Memang ada kapal juga, cuma kan zaman sekarang orang, piknik itu jarang ada gunanya kapal lagi lah. Sebagai apapun kapalnya. Ya kecuali kapal itu, ya kapal, ya pesiar gitu, pesiar boleh juga.
Peneliti	Menurut Bapak ada nggak Pak tantangan sendiri buat pengurusnya terutama saat ini untuk mengembangkan Geopark itu?
Informan	Harus, mulai, mempendekati, anak-anak gengsi sih. Sekarang yang bukan viral, bukan-bukan, jangan anak muda. Harus ada, liat lho udah ada, liat nggak boleh muncul, tapi, ada yang lain lagi gitu kan. Yang harus banyak di, beri pemahaman itu, anak-anak mudanya. Dan juga kita kan punya, dia mahasiswa dimana-mana nih, itu menurut Bapak, potensialnya mereka, yang Jogja, Bandung, Jakarta itu, yang baru, yang final. Ya sayang sih memang kita, bagus sih, alat kita bagus itu. Cuma sekarang, kalah

	dengan Anambas, kalau kita mau bicara jujur ya. Yang kulineran kita, di Jogja, di Bandung, sampai Jakarta. Nah kita masih belum, kabel mandu kita, padahal itu unik. Kernas, kayak gitu kan. Kalau Bapak sih, BPGN itu harus ada, orang yang punya basic pariwisata. Ini kan, beda ya kalau orang, skill dari situ itu beda. Dia beda cara pandang itu, itu beda. Kalau yang dependani kan ya, orang-orang yang tidak, spesialisasi. Yang general semua, yang paling umum. Yang penting itu menurut Bapak, anak-anak muda ini, cuman anak-anak muda sini, kadang itulah, kan sering di kantornya, sering ngatain nih, anak-anak yang biasiswa kemana-mana nih, ini tadi terlambat ini, ini malah bagian yang dianggap soalnya, biasiswa. Jadi, ya Bapak lho, yang coba terobos ke kampus-kampus yang lain, itu kan YPMK Vegas, Pertamina, Telekom, dan itu tidak menggunakan APBD di Natuna, sedikit pun tidak. Memang awalnya orang ini, agak kasi itu. Udah anak-anak Natuna yang kuliah di YPMK Vegas, ya Bapak itu bilang, ya saya bilang, ya beri kami kesempatan lah, itu bisa. Kalau di YPMK memang harus dari kampus ke kampus tuh. Tapi, main dari kampus-kampus yang besar tuh ya, UGM gitu kan, UI kalau perlu gitu kan. Jangan, mainnya tinggal lokal itu juga. Kalau mau ini, ya sekalian besar gitu.
--	---

E. Identitas informan

Nama : (R)

Pendidikan :

Jabatan : Pengelola Geosite/Masyarakat

Peneliti	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Nurmadiyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tujuan saya disini untuk wawancara Abang untuk menyelesaikan tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pengolahan Geopark Natuna. Baiklah langsung saja ya Bang saya mau nanya sama Abang, menurut Abang bagaimana Geopark Natuna itu sendiri?
Informan	Menurut saya kalau di Goesite ini udah ada kemajuan kalau disini Pas lagi kita ini dapat bantuan dari BI kemarin Seperti kursi ini,

	kursi pantai, meja pantai gitu Seperti pedal, sepeda Jadi masyarakat ataupun masyarakat di luar desa wisata Jepang ketengah ini Antusias sekali di geosite bertugas disini Pas lagi ada barang-barang yang baru begitu
Peneliti	Berarti untuk Masyarakat disini sendiri, antusias ya memang sama geosite ini? Kalau untuk hambatan-hambatan dalam pengelolaan ini ada nggak Bang?
Informan	Untuk hambatan mungkin dari masyarakat juga, bahasa kampung bisa? Bisa boleh nggak apa-apa ada yang bilang mahal sekali ini untuk harganya kadang-kadang ada yang bilang murah sekali gitu, tapi untuk tempatnya kami usahakan bersih gitu dari sampah gitu.
Peneliti	Kalau untuk koordinasi dari Badan Pengelola atau pengurus ke pengelola disini itu koordinasinya apakah berjalan baik?
Informan	Cukup baik gitu, dikarenakan kita udah lama kenal sama pengurus geosite gitu sama pengelolanya juga, jadi kalau untuk hubungan itu cukup baik
Peneliti	Sejauh ini, di Batu Kasah ini sendiri pengunjungnya rame nggak Bang?
Informan	Untuk sekarang Alhamdulillah rame, pas lebaran kemarin tuh nyampe satu hari itu lebaran ke-3 Raya Haji gitu sekitar 1500 orang, kalau weekend pasti ada yang datang kalau di Batu Kasah ini nggak pernah kosong gitu pasti ada, setiap hari ada orang.

F. Identitas informan

Nama : (MA)

Pendidikan : S2

Jabatan : Kepala Dinas BP3D Kabupaten Natuna/Wakil Ketua 1 BPGN

Peneliti	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sebelumnya perkenalkan nama saya Ainul Nurmadiyah dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tujuan saya disini untuk wawancara Bapak untuk menyelesaikan tugas akhir saya skripsi dengan judul Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pengolahan Geopark Natuna. Baiklah langsung saja ya Pak saya mau nanya sama Bapak, menurut Bapak bagaimana Geopark Natuna itu sendiri?
----------	--

Informan	Geopak itu secara umum dibuat dengan taman bumi. Taman bumi itu ada satu wilayah yang memiliki warisan geologi, geoheritage, jadi tidak disebut ada keragaman Geologinya, kemudian keragaman Hayatinya, dan Culture di situ juga, Keragaman budayanya. Nah ini dikelola untuk tujuan sebagaimana keperluan konservasinya. Kemudian edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat, ini tujuannya. Nah ini dikelola dan ini untuk masyarakat di sekitaran, dan juga melibatkan masyarakat di dalam pengelolaannya.
Peneliti	Yang membedakan Geopark Natuna dari Kawasan konservasi atau pariwisata lain itu apa?
Informan	Ada yang membedakan memang karena memang kalau Geopark ini memang dari tujuannya sebenarnya bahwa kalau Geopark sendiri, kalau Geopark itu terkait dengan tujuannya bagaimana tadi ekonomi, kemudian edukasi, dan konservasi. Nah ini kan Geopark ini banyak nih, beberapa Geopark nih kalau konservasi ini kan seperti suatu wilayah yang yang dijaga seperti taman apa suatu warga seperti Natuna kemarin akan membentuk satu wilayah konservasi juga, seperti itu konservasi itu nanti akan dijaga dari jamahnya masyarakat atau manusia terkait dengan lokasi tersebut. Nah mungkin seperti kita punya di Natuna itu kan punya apa namanya kayaknya, nah itu akan di apa namanya di konservasi dari situ. Nah kalau di luar kan seperti ada taman nasional seperti unggulan atau apa atau suatu warga satwa itu direkonservasi. kalau punya pariwisata sendiri ya tentu ini kan adalah kegiatan aktivitas masyarakat terkait dengan rekreasi ya mungkin tujuannya ya bisa jadi terkait juga nanti terkait dengan alam dan sebagainya ini juga fokusnya pada wisata dan ekonomi ya itu seperti itulah. Kayak sebuah wisata kita ke Bali ini kan jadi pariwisatanya jadi tentu agak berbeda-beda sedikit tapi memang pada akhirnya juga kalau Geopark sendiri itu nanti juga akan melalui juga pariwisata. Pariwisata berkelanjutan seperti itu
Peneliti	Kalau untuk edukasi terus pemberdayaan masyarakat sama penumbuhan nilai ekonomi yang diterapkan di Geopark Natuna itu seperti apa?
Informan	Nah ini kan ada tiga poin nih terkait dengan edukasi ini sebenarnya tujuan dari Geopark sebenarnya, nah edukasi itu kan tentu itu kalau di kita lebih kepada bagaimana ada program-program yang mengedukasi masyarakat ,nah seperti adanya ada pelatihan nah ini juga edukasi, kemudian juga yang kita bagaimana mereka edukasi

	masyarakatnya tentang Geopark sebagai pemahaman mereka terhadap ikon, kemudian juga pembangunan berkelanjutan jadi masyarakat juga paham tentang Geopark sendiri. Nah kalau yang kedua pada generasi muda seperti ada program namanya Geopark to School, Geopark to School ini juga Geopark masuk sekolah, masuk ke dalam sekolah kita mengenalkan sadar wisata, kita mengenalkan dari dasar Geopark itu, kemudian umur-umur bebatuan. Nah ini kan kita sampaikan ke anak-anak sekolah, kemudian yang kedua pemberdayaan kalau pemberdayaan itu ini program terkait dengan bagaimana memberdayakan masyarakat dalam Geopark itu lebih kepada masyarakat itu terlibat langsung dalam pengelolaan Geosite. Jadi pengelolaan Geosite itu masyarakat dilibatkan di sana langsung, karena memang selain dari BPGN itu ada pengelola Geosite, Manajemen Geosite itu nanti akan terlibat. masyarakat itu bisa dari sadar wisata. Nah ini nanti mereka juga mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti bazar. Nah ini juga pernah dibuat oleh kawan-kawan kita dari pengelola Geopark yang ada di Pulau Setanau itu dibuat setiap tahun program-program terkait pemberdayaan. Nah ini juga berarti, kemudian juga kemudian yang kedua terkait dengan UMKN, nah UMKN ini sangat berhubungan juga dengan ekonomi nantinya, tapi memang lebih kepada pelatihan kewirausahaan bagaimana kita menghasilkan Geoproduct itu bentuk-bentuk pemberdayaan yang kita bisa terapkan di Geopark Natuna. Yang ketiga terkait dengan ekonomi, kalau ekonomi ini lebih kepada event-event. Nah kalau Natuna kemarin ada program setiap hari minggu itu Geospot dan Bazar Itu juga contoh, kemudian Pekan Expo Pulau Akar, Pulau Akar tadi di Pulau Akarnya juga di Setanau juga ada. Nah ini dilakukan oleh Masyarakat, nah ini juga berhubungan dengan ekonomi, kemudian juga akan berhubungan dengan pengembangan Geoproduct contohnya misalnya pulau-pulau lokal Itu bisa dikembangkan, kemudian nanti membuka peluang untuk ekspor dan sebagainya ini pada akhirnya adalah untuk penyelesaian masyarakat, contohnya juga seperti budaya ekonomi yang dilindungi tapi kan memang di tempat kita dapat izin untuk dikembangkan, ini juga. Kemudian CSR juga begitu, ada program-program dari CSR juga, nah ini juga adalah bentuk untuk mendekat dengan ekonomi di Geopark.
--	---

Peneliti	Untuk di Geopark ada berbagai macam keanekaragaman apa saja termasuk ke geologi, hayati, dan budayanya yang menonjol?
Informan	Yang menonjol kalau yang menonjol itu jadi tiga yang geologi, hayati dan budaya. Geodiversity kita memang ada cukup banyak formasi granit ada beberapa tempat seperti Pulau Akar, Pulau Setanau. Nah itu ada mungkin teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan juga dengan ada umur bebatuan itu lebih dari 125 tahun, tidak tahu ada juga beberapa tempat yang mungkin apa namanya, sifatnya batu granit. Kemudian juga ada cukup banyak tapi memang itu sudah di geologi kita cukup banyak. Mungkin nanti bisa diperjelas melalui dokumen-dokumen. Kemudian kalau hayati kita punya endemik menonjol itu endemik kekah. Nah ini primata langka, nah ini statusnya terancam punah, ini juga akan menjadi hari ini kita coba pemerintah negara sudah membuat wilayah konservasi di kurang lebih 39 hektare kalau tidak salah. Nah itu kita siapkan tempatnya dan ini hanya ditemukan di pulau besar. Makanya itu jadi endemik, nah itu juga menonjol. Kemudian mungkin dengan ikan napoleon Itu juga bagian dari apa namanya hayati yang perlu juga menilai tinggi, tapi juga itu harus menonjol juga ada di Sedanau. Kemudian juga tumbuh-tumbuh karang, tumbuh-tumbuh karang itu kan banyak yang ditemukan juga, nah makanya kemarin ada program kita juga bersama masyarakat terkait dengan penanaman tumbuh karang kembali di Pulau Akar. Kemudian kalau budaya, kalau budaya juga banyak. Banyak jenis bisa kuliner, kuliner itu kan banyak bisa dari ikan-ikan, karena yang sebagian besar kita adalah lautan jadi ikan itu bisa aja ikan bilis, kemudian ikan napoleon juga, kemudian ikan ini Itu juga bersifat culture. Kemudian Gara-gara budaya melayu sendiri bisa tari, kelantin, silat. Nah ini juga Pantun juga ada walaupun memang tidak terlalu tapi memang itu adalah bagian dari budaya melayu. Tapi kalau tari, seni-seni sebagian juga biasa memang itu biar ya Muhammadun ya seperti itu.
Peneliti	Dari berbagai macam keanekaragaman tadi, gimana caranya bisa dimanfaatkan untuk tujuan konservasi, edukasi, dan juga pariwisatanya?
Informan	Ya kalau konservasi tentu ditetapkan dulu padahal tempat-tempat desa itu sebagai kawasan Indonesia, ada juga tempat-tempat bukasa semua itu ditetapkan sebagai menengah-menengah basi, tapi juga karena memang harus ditetapkan kita ada pertanyaan ada pertanyaan nanti mesti dipintar kita bertanya. Nah pertanyaan itu

	sudah ditetapkan terutama di pulau besar ini untuk kawasan geologi itu ditetapkan karena harus ada zona-zona intinya karena nanti karena ada aktivitas masyarakat itu memecah batunya jangan sampai nanti zona-zona inti juga menjadi sasaran masyarakat untuk diambil secara untuk keuntungan pribadi. Nah hari ini memang kalau dilihat di lapangan antara masyarakat itu dengan kita tidak ada batasnya, tapi ada batasnya karena ini zona-zona inti yang tidak bisa diganggu, zona yang selain zona-zona inti silahkan saja yang itu kan memang masyarakat punya tanah, batu dan seperti itu. Kemudian nah perlibatan masyarakat nah sebagai penjaga dan pemandu dan sehingga nanti mengurangi terjadinya vandalisme, mencoret-coret di batu-batu seperti itu. Nah itu kita jaga betul jadi itu cara bentuk kita agar negara ini kita mematuhi tujuan konservasi kemudian di hayatinya di Biodiversity tadi konservasi ke mana? Nah dibuat lagi untuk informasi. Nah di Mekandai mana sudah ada Namanya, nah itu juga keterlibatan dari CSR Pertamina. Kemudian juga pelastarian ini Apa namanya? Ikan, napoleon dan sebagainya. Kemudian konservasi manggung nah itu dalam bentuk kita memampatkan itu tujuan konservasi tadi kan ada 3 konservasi, kemudian edukasi, dan ekonomi. Nah kalau untuk edukasi sendiri saya pikir tadi sama aja kita bikin program Go to School, itu wajib sebenarnya. Kemudian juga biasanya membuat Tour gitu kan, nah ini hari ini kan juga kita buat pusat-pusat informasi tentang edukasi, tentang Biodiversity, tentang bagaimana nanti habitat kekah itu bisa kita tahu informasinya. Nah itu ada di Mekandai seperti itu, nah itu juga bentuk kita dalam menempatkan untuk tujuan tadi ya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Perusahaan, perusahaan untuk ekonomi untuk lanjutan. Nah ini kan bisa dibuat dalam apa namanya Geowisata lakukan lokal, kemudian Pariwisata Konservasi kekah, kemudian juga wisata budaya mereka kan sudah lakukan, kemudian ada juga produk-produk, menampilkan produk-produk UMKM kerajinan, kerajinan itu juga bentuk pemanfaatannya.
Peneliti	Kalau untuk kondisi Geopark sendiri dari awal penetapan sampai saat ini itu ada perubahan signifikan tidak?
Informan	Dalam pengelolaannya ada ini kan memang sudah dia tetapkan tahun 2018 November 2018 Saya lupa tanggalnya. Nah jadi 2018 sampai sekarang Itu sudah berapa tahun nih? Nah ini pasti ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sebelumnya memang kan sebatas apa namanya yang kerja keras itu adalah

	BPEGN nya, masyarakatnya belum terlibat juga tapi sekarang sudah masyarakat sudah terlibat secara langsung, bisa dilihat dari beberapa tempat seperti Batu Kasah, nah itu sudah cukup pesanan-pesanan sudah berkembang walaupun sudah dibantu oleh pihak-pihak tertentu seperti dari SMK Migas, dibantu Sapras disitulah. Nah ini kemudian juga Pemda sudah bangun melalui dana di Aka untuk bunuh lara dan sebagainya. Dulu tidak ada dan dengan adanya sapras itu masyarakat pengelola lebih bersemangat, nah sebelumnya kan tentu agak sedikit ini berbeda lah pasti ada perkembangan-perkembangan, nah begitu
Peneliti	Kalau untuk pemahaman Masyarakat lokal sama pemerintah daerah dengan konsep Geopark itu sudah sejauh mana?
Informan	Gimana ya memang tidak semua masyarakat memahami tentang Geopark, tapi itu tantangan kita untuk memberi di pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada beberapa kita lakukan langkah-langkah kami wajibkan menggunakan Pin Geopark. Kemudian memang keterlibatan dari OPD-OPD sudah dilibatkan di dalam pengelolaan Geopark dasar pendidikannya. Kemudian Dinas Kominfo semua sudah dilibatkan. Nah cuman mungkin di masyarakat ini tentu ada tantangan sendiri karena memang masyarakat kan masih berpikir bahwa sesuatu itu kan secara instan, tapi kalau ini kan perusahaan lain itu perlu pergi lihat juga tidak bisa tiba-tiba langsung menghasilkan ekonomi yang cara cepat. Kemudian juga ini bisa jadi ini juga relate dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah ini juga berhubungan dengan sampras yang tersedia, bisa jadi masyarakat hari ini memahami bahwa semuanya disediakan oleh pemerintah itu salah juga semua sampras itu bisa disediakan oleh masyarakat secara mandiri yang tadi pemberdayaan mereka sudah tidak dorong tetapi memang sudah agak semakin bagus sebenarnya. Buktinya ada beberapa yang sudah cukup bagus juga menonjol seperti tadi di Batu Kasah hubungannya juga dengan ADWI Anggota Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah itu kan kemarin tentu yang tertipu disitu juga orang-orang yang mengelola Geopark juga disitu yang kita merupakan juara 2 Asia Nasional dari 6 ribu lebih Desa, nah itu juga bentuk atau pemahaman masyarakat pengelolanya sudah cukup bagus tapi secara umum memang masih perlu dorongan lebih keras lagi seperti itu.
Peneliti	Kalau untuk keterlibatan stakeholder dalam mengelola Geopark itu sudah efektif belum?

Informan	Stakeholder disini kalau terkait dengan pertama kalau terkait dengan di pemerintahan disini sudah cukup efektif, karena disitu di SK itu ada beberapa devisi yang berhubungan dengan apa namanya pengelolaannya berhubungan dengan Geo itu sendiri. Kemudian berhubungan biodiversitynya hubungan sendiri dan itu kita menemukan orang-orang yang sesuai dengan pendidikannya sudah kayak Biodiversity itu ada memang teman-teman yang paham tentang hayati gitu ya memang umumnya disitu kemudian juga Biodiversity itu juga kita menemukan orang-orang yang memahami tentang geologi alasan geologi kita disitu Culture juga begitu. Kemudian juga disitu ada devisi publikasi dan sebagainya. Nah ini sudah cukup, cukup efektif. Nah memang ada tantangan ya memang tidak semudah yang dilihat dibayangkan, karena tadi memang konsep karena konsep dari Geopark adalah untuk masyarakat sebenarnya bukan kepada BPGN, BPGN itu memang pada pengelolaan itu sebaiknya adalah masyarakat sebenarnya atau orang-orang yang tidak terhubung dengan pemerintah, tapi yang terjadi adalah karena diantara sendiri karena ini berbahan apa namanya hal yang baru juga untuk terlibat oleh pemerintah cukup dominan. Tapi disitu juga terlibat perusahaan ada melibatkan dan anak-anak kita yang menggerak-menggerak di lapangan juga melibatkan seperti itu.
Peneliti	Kalau untuk koordinasi antara stakeholder itu terkait dalam mengelola sudah baik belum?
Informan	Kalau koordinasi, kalau melihat di Pentahelik cukup bagus, karena kita di masyarakat kemudian juga media juga terlibat, kemudian juga pengusaha, kemudian juga penggunaan tinggi yang ada di Pentahelik. Kalau dengan masyarakat tentu kami sangat tumbuh merah dengan pengelola terus yang kedua hubungan kami dengan koordinasi kami dengan peluang tinggi disini cukup bagus karena kita ada MoU juga yang sama juga dengan peluang tinggi disini bagaimana pemerintah-pemerintah itu nanti masuk juga di peluang tinggi seperti KKN sebagainya. Kemudian juga hubungan dengan dunia pendidikan seperti KKN-KKN dari UGM itu program-program mereka minta kita sadarkan karena yang berhubungan dengan Geopark bagaimana mereka mengembangkan website-website, mempromosikan sebagainya. Nah kalau dengan pengusaha atau wirausaha itu cukup bagus karena memang kita berharap secara CSR itu masuk ke situ, nah ini banyak memang ada contohnya beberapa yang ini yang telah

	dibantu dari Bank ada disini kemudian juga dari SMK Migas sesuai dengan beberapa.
Penelitian	Kepentingan utama stakeholder dalam proses pengelolaan Geopark itu apa saja?
Informan	Pasti ada kepentingannya dari semua stakeholder itu kepentingan satu tujuan artinya gini, kepentingan bagaimana Geopark ini bisa bernilai sesuai dengan tujuan utama edukasi terutama menjadi pusat pendidikan dan sebagainya, kemudian di edukasi kemasyarakatan dan sebagainya, kemudian juga konservasi, nah bagaimana apa namanya Geopark itu betul-betul dijaga tujuannya, kemudian yang ketiga adalah ekonomi dan bernilai ekonomi kepada masyarakat bagaimana pada masyarakat bisa disejahterakan di atas bumi itu dijaga ya kemudian juga mendatangkan sejatiran untuk masyarakat, nah itu makanya lebih penekanan pada konservasi ekonomi dan edukasi. Nah ini makanya ada perangkat buku itu sekolah gitu, makanya anak-anak sekolah itu tu bagian dari kan generasi muda yang menjaga kelestarian dan pemampangan bayangkan kalau itu tidak di ini, makanya tujuan awalnya memang itu, konservasi, menjaga, kemudian bisa menaikkan ekonomi dan menjaga masyarakat.
Peneliti	Dari masing-masing stakeholder itu apakah ada pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengelola Geopark?
Informan	Ada, ada nah pengelolaan Geopark ini memang lebih kepada masyarakat kami lebih kepada masyarakat kalau kita sifatnya mendorong itu jelas. Contoh kasus ini, saya melihat jadi untuk kita menetapkan pengelolaan Geosite aja itu beberapa kelompok di masyarakat seperti ada kelompok darwis kemudian ada bumdes, nah yang sudah berjalan sebelumnya ini juga menjadi ada tarik ulur di kepentingan juga, tapi ya kita tengahkan bahwa pengelolaan Geopark ini bisa kolaborasi semua yang ada disitu, jadi artinya kepentingan jelas bagaimana keunggulan yang ada di Geosite itu juga dikembangkan untuk kesejahteraan di desa seperti itu, pasti ada tapi kalau berhubungan dengan yang selain dari itu, saya nggak ada kepentingan lah yang kepentingannya paling ya hanya mendorong sebuah Geosite itu bisa berkembang, Geopark seluruhnya bisa berkembang kalau pemerintah sih sifatnya juga mendorong, jadi kalau tarik ulur memang di masyarakat ya biasalah tapi tidak punya persoalan yang cukup ini yang serius semuanya sudah ditengahkan kemudian juga karena pemahaman kan kalau ada kompor Tok Darwis sendiri kan satu wisata juga ada

	terbentuk, tapi kalau kemudian bumdes juga merasa bahwa itu potensi desa tapi hari ini kita bangun sebuah wadah manajemen yang mengelola itu malah sudah dibangun pertengahan antara mereka.
Peneliti	Ada nggak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah, ataupun sebaliknya?
Informan	Kalau itu pengaruhnya tinggi memiliki kepentingan tinggi kalau masyarakat bisa aja kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah, kalau dikatakan rendah karena dia punya pengaruh tidak punya kekuasaan juga tapi dia punya kesempatan kemudian kalau diantaranya pengaruhnya tinggi kepentingan rendah tapi dia pengaruhnya tinggi. Contoh ini media juga sebenarnya itu mereka tidak kepentingan terlalu tinggi tapi pengaruhnya tinggi kepentingan tidak terlalu besar tapi pengaruhnya tinggi karena mereka punya pengaruh yang besar juga mempromosi mempromosikan tapi kepentingannya rendah, jadi itu bisa media juga. Kemudian kepentingan rendah tapi pengaruh tinggi. Contohnya tadi SKKA Badan Usaha Badan Usaha itu bisa pengaruhnya besar tapi kepentingannya rendah, terbalik ya karena dia itu sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa juga tapi pengaruhnya besar karena kontribusinya juga termasuk terkait dengan pemberian dana CSR tapi tidak ada kepentingan apa-apa cuma pengaruhnya cukup besar karena punya anggaran seperti itu. Mungkin nanti bisa dipetakan.
Peneliti	Kalau untuk dalam mengkoordinasikan masing-masing stakeholder itu ada tantangan utamanya nggak Pak?
Informan	Pasti ada, kayak tadi Mas Anang kan tentunya tentu ada punya tantangan karena Mas Anang kan sendiri pemahaman tentang itu masih rendah kemudian ya karena berpikir oh ini masih lama kalau dikembangkan, nanti itu tadi untuk di pertanyakan itu ya, pengalaman yang terbuat tadi terkait dengan ada hambatan-hambatan yang berhubungan dengan aksesibilitas. Nah ini juga tadi pertangkangan yang cukup besar sebenarnya untuk pengembangan di Geopark.
Peneliti	Kemudian bagaimana efektivitas pengelolaan di Geopark Natuna saat dievaluasi dan dimonitor?
Informan	Hasil evaluasi kami awal-awal hari ini sudah berjalan sih, tapi belum semua. Karena ada beberapa pengelolaan dari 8 Geosite itu, pengelolanya sudah terbentuk, tapi yang sudah berjalan juga dari beberapa seperti Gunung Ranai, kemudian Batu Kasah, nah yang

	di Tanjung, apa namanya, di Snowping, yang itu belum berjalan. Karena memang supply-nya belum tersedia semuanya. Jadi kita mengevaluasi dari delapannya dulu itu kayaknya hanya beberapa yang sudah berjalan efektif, yang lain masih dalam tahapan persiapan-persiapan gitu. Kalau dia ingin kita memang semuanya bisa berjalan, tapi kan tentu ada keterbatasan-keterbatasan tadi itu, kayak dengan anggaran, ini tantangan juga tadi anggaran masuk tuh tantangannya, anggaran itu jadi tantangan juga bahwa keterbatasan anggaran ini juga sialnya juga tidak dibangun. Makanya tadi ada kaitan juga tadi itu dengan CSR sebagainya, dorongan kan seperti itu. Makanya juga kembali lagi bahwa yang melaksanakan BPK ini menjadi pemerintah gitu, karena memang kekuatannya lebih besar dibandingkan dengan masyarakat sendiri gitu. Nah makanya itu di Saperas yang belum terlengkap, itu tentu belum berjalan secara efektif. Yang sudah berjalan itu dari Pulau Akar sudah melakukan beberapa event, tapi walaupun sebenarnya kalau lihat lapangan, Saperasnya juga belum terpenuhi secara penuh gitu ya. Karena ada beberapa yang harus tersedia seperti panel, komodan informasinya tentang itu. Itu masih ruang informasinya belum tersedia, tapi informasinya didapat sebenarnya. Komodan mungkin atau toiletnya belum tersedia, tapi hari ini toiletnya mungkin kalau di situ masih bisa menumpang di beberapa tempat. Seharusnya memang tersedia sendiri, karena itu kan kebanyakan nanti kalau di kunjungan yang berkunjung adalah turis-turis dari luar negeri. Tentu dia memilih WC-WC yang punya wc duduk, jongkok gitu kan. Nah ini perlu, tapi hari ini masih aman. Tapi itu masih target pemerintah juga untuk menyiapkannya. Dan banyak juga di science tunnel, itu sudah berjalan. Tapi memang Saperasnya belum lengkap, tapi sudah berjalan. Tapi sebaiknya dilengkapi, karena itu menjadi parabel, memberi kebedahan dan kekuasaan kepada pengunjung juga.
Peneliti	Kalau dalam evaluasi dan monitor itu indikator apa saja yang digunakan?
Informan	Sebenarnya banyak sih indikator yang digunakan. Indikator-indikator yang digunakan itu ya tentu sangat berhubungan dengan, jadi indikator itu pertama target dengan konservasi. Apakah kita melakukan kopulasi enggak? Itu indikator juga itu. Wadah psikologi itu dikonservasi enggak? Itu juga jadi penilaian. Nah kita akan diilai seperti itu. Kemudian juga, apa namanya, edukasi, ini jalan enggak? Ini juga menjadi, apakah pendidikan edukasi itu

	jalan atau enggak? Ini juga menjadi indikator-indikator untuk mengelola pengelolaan Geopark gitu. Kemudian pemberdayaan, bagaimana masyarakat terlibat? Terlibat enggak? Itu di, karena konsep awalnya adalah masyarakat terlibat. Itu jadi indikator juga, tetap mengukur. Kemudian, apakah ini jumlah kunjungan wisata? Ada pengaruhnya enggak? Itu juga jadi indikator. Artinya warisata berkelanjutan, nah itu jadi indikator juga pengukurnya. Pengukur dari pengelolaan Geopark. Kemudian manajemen, nah bagaimana? Bagaimana pengelola? Ketersediaan pengelola itu ada enggak? Nah itu juga jadi monitor, dimonitor oleh KNGI, dan juga Komite Nasional Geopark, promoter kita gitu. Kita juga memonitor pariwisata-pariwisata di lapangan seperti itu juga. Tapi hari ini kita memang dimonitor. Yang tadi adalah konservasi, kemudian ada edukasinya, bagaimana berjalan enggak? Kemudian pemberdayaan terlibat masyarakat jalan enggak? Kemudian juga pariwisata berkelanjutan, itu jadi indikator-indikator yang berjalan dengan manajemennya. Kemudian promosinya, itu jadi, jadi apa namanya, jadi indikator-indikator yang berukur juga. Kemudian inovasi dan penelitian, apakah juga diukur? Berapa sih jumlah peneliti? Karena tadi edukasi kan, edukasi itu kan fokusnya pada penelitian yang terjadi. Berapa banyak yang meneliti di nasional? Nah itu juga indikator juga. Kalau Geopark kita enggak diteliti berarti kan salah satu tujuannya edukasi juga, pulang jalan gitu kan. Nah, jadi kan membuat tertariknya peneliti-peneliti itu untuk melihat, meneliti geologi kita, atau culture diversity kita, atau meneliti seperti itu. Nah ini yang, ya ini hard DNA juga. Apalagi nanti if you operate, kalau masuk ke UGGP, itu kan sebuah nilai internasional. Terus ada nanti itu yang, apa namanya, jurnal-jurnal yang masuk ke, di peneliti itu membawa pen jurnal, tapi masuk ke jurnal internasional. Jadi bagian dari branding dulu nanti. Kemudian, kemudian terakhir-terakhir kayak bagaimana hayati itu, itu dilestarikan gak budaya dan hayati itu? Karena kan barang-barang itu semua tuh, budaya, hayati, kemudian penelitian, dan sebagainya. Itu jadi beberapa variable, atau indikator-indikator yang dipunakan dalam memonitor pelaksanaan pengelolaan Geopark. Ini zamannya, perusahaannya, kemudian pemerintah masyarakatnya, konservasinya, pendidikannya, kemudian penelitian adanya gak, kemudian pelaksanaan budaya dan keragaman hayatinya, itu-itu. Jangan-jangan kita, keragaman
--	---

	hayatnya kita biarkan gitu aja. Ini kan tadi, apa namanya, kekah yang punah, tapi kok dibiarkan gitu kan. Nah itu-itu, itu jadi terlalu kurang juga. Langsung ditetapkan di endemik, tapi kok dibiarkan, nah ini kan jadi diukur juga. Ya, nah itu contoh.
Peneliti	Kalau untuk menanggapi masukan ataupun keluhan dari stakeholder, itu ada mekanismenya nggak?
Informan	Ya paling rapat. Rapat, kemudian ada tiga teman-teman, kalau masyarakat biasanya juga, kalau di pengelola biasanya langsung hubungi-hubungi pada Geopark, pengelola Geopark. Nah ini kita rapat juga, rapat secara berkala. Dan di bandar pengelola itu, rapat-rapat secara berkala, ya melibatkan pengelola Geopark sendiri, kemudian juga nanti untuk Natuna Geopark Youth Forumnya juga sendiri, kita nanti berkolaborasi dengan kabupaten kita, kemudian juga nanti kita dengan tamu khusus dengan pengelola, dosainnya seperti itu, sampai mengevaluasi juga. Nah itu juga seperti itu. Di kesempatan itu, mereka menyampaikan beberapa mungkin keluhan-keluhan terkait dengan mungkin pengelolaan, kemudian juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan lainlah. Dan juga menginformasikan kita kira-kira yang mereka butuhkan apa, kemudian mungkin ada hal-hal perlu lagi yang mungkin harus mereka dapatkan. Contoh kemarin kita kumpulkan mereka, kita sampaikan juga terkait dengan kebutuhan untuk mengedukasi, kemudian kita mengedukasi mereka terkait dengan pengelolaan dosain. Makanya kita bawa mereka ke Celatuh kalau nggak salah. Tahun kemarin kita bawa ke Celatuh. Tahun kemarin kita bawa ke Celatuh, mereka belajar bagaimana mengelola dosain, seperti itu. Itu dikumpulkan kita. Sebenarnya mereka juga butuh itu. Kalau nggak, ya tentu jadi tolok mereka untuk belajar bagaimana pengelolaan, seperti itu.
Peneliti	Untuk mengatasi tantangan sama evaluasi itu dari masing-masing stakeholder bagaimana?
Informan	Contohnya kalau tantangan, kalau di sisi kita ini masing-masing berbeda. Kalau di kita, tantangan kita itu contohnya aksesibilitas, kemudian juga support yang belum terpenuhi, edukasi yang masih rendah. Edukasi sudah sih, tapi literasi pemahaman mereka yang masih rendah tentang pengelolaan itu memang harus dilakukan terus. Nah tentu kalau di sisi pemerintah dulu, kalau untuk menyelesaikan masalah itu, hasil evaluasi kemudian kita melakukan itu, kita menemukan tadi ada-ada tantangan-tantangan sebetulnya, ya bisa jadi. Kami sudah juga, pemerintah juga sudah

	berusaha untuk membuka jalur akses transportasi itu kan. Nah tapi ini kan tentu dengan kondisi secara global begini tentu ada beberapa tantangan tadi. Mas Kapai yang masih berpikir-pikir juga untuk, nah contohnya kemarin sudah diteruskan juga terkait dengan membuka akses support air jet masuk ke Natuna. Nah tapi ini masih dalam proses, sudah disetujui tapi dalam proses ini lah ya, proses persiapan. Tapi kalau dengan tantangan ekonomi yang sudah segini ya tentu akan jadi begitu balik. Ini berhubungan juga dengan kemampuan orang untuk, apa namanya, maaf seorang dan barang masuk ke Natuna. Nah yang kedua, tantangan tadi terkait dengan pemahaman. Tentu kami resolusinya adalah melakukan edukasi secara intensif gitu kan, edukasi. Setelah kan berikut, integrasinya dikuatkan gitu. Terutama pengelolaannya, nanti pengelolaannya juga kepada masyarakat yang di sekitar ini gitu. Kemudian kalau di sisi akumulasi juga tadi kita bagaimana, itu dijaga gitu kan. Tantangan juga itu, orang-orang memampatkan ruang-ruang publik seperti itu kan dipandang semua. Nah itu kan, itu juga dijaga, itu tantangan juga itu. Karena mereka berpikir itu batu ngapain, lebih cantik dicoret-coret gitu kan. Tapi kan dia bernilai. Nah itu juga, kita di WP juga menjaga itu, mengedukasi. Yang ditantang juga di masyarakat seperti itu juga. Tentu masyarakat juga, apa namanya, ya pengelola itu sendiri juga menghadapi tantangan masyarakat sendiri. Yang gak ada masyarakat, kemudian mengajak teman-temannya untuk bergabung. Tentu susah nih, karena memang isinya ada layan. Yang hari-harinya tentu harus cari ikan di laut, tiba-tiba disuruh diajak ngelola. Tentu ini kan berpikir panjang ini. Makanya kita juga menghadapi tantangan terkaitnya semua manusia juga itu sebenarnya, sama tuh. Nah solusinya ya tentu kita mau tidak mau, suka tidak suka. Kita kemarin juga melibatkan mahasiswa gitu kan. Orang-orang yang tertidur seperti itu, supaya terlibat. Tentu kan nih, karena kalau kita lihatnya ada beberapa pengelola-pengelola itu udah tua-tua gitu. Nah ini jadi tantangan juga. Waktu itu mereka, sudah kita diingatkan juga kalau pengelola yang kita sediakan adalah orang-orang yang tua gitu. Artinya anak-anak muda. Nah ini kita dorong, kita dorong pelan-pelan. Ya semuanya banyak tantangan sih. Kemudian solusinya sih, solusi tadi tuh, kalau kita memang kita paksakan juga, harus dipaksakan. Jadi di edukasi. Kemudian kami selalu monitoring, supaya mereka juga termodifikasi. Itu salah satu contoh. Kalau kunjungan-kunjungan,
--	--

	kami imbau dari pemerintah daerah, kami imbau kepada seluruh OPD, kalau memang ini melakukan, katakanlah mau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di luar, kegiatan yang berhubungan di luar ini adalah ruangan. Nah itu yang kita dorong, mereka untuk melakukan aktivitas di beberapa gesen gitu kan, kayak family gathering. Family gathering itu kita dorong sih itu. Kita dorong, OPD-OPD akan pembeli Gatering di daerah lokasi itu. Itu kan berdampak kepada seragam juga, seperti itu. Nah itu tantangannya apanya tuh? Oh udah tadi asesbilitas, promosinya cukup luas tapi asesbilitasnya masih kurang ya, tentunya itu juga. Ya, seperti itu.
Peneliti	Menurut Bapak, dalam bentuk pengelolaan saat ini, itu sudah sesuai apa belum dengan visi misi Geopark sendiri?
Informan	Menurut saya sudah, sudah. Ya, tapi tentu sesuai visi kita ya seperti itu. Tapi ya, pelastari yang sudah jalan, kemudian apa namanya, edukasi, sudah jalan. Ada beberapa penelitian juga sudah, kemudian program Geopark sekolah sudah jalan juga. Tapi memang belum terlalu ini lagi ya, karena memang masih terpokok di pulau ini. Di pulau besar ini. Sebenarnya kan potensi kita kan seratusan lebih. Di sekolah-sekolah ke-12 kan ada berapa gitu ya? 14 itu ya potensinya. Sampai keserasan kemana-kemana, nah itu. Sudah sih, cuma tadi visi kita seperti itu kan. Mengembangkan dulu, memendaikan, berniak ekonomi juga. Tapi memang masih di tataran, di tataran ya lokal juga gitu kan. Belum, belum, belum. Ada sih kunjung-kunjungan dari, di luar negeri ada sih, ada. Cuma tadi itu terbatas kan, karena akses tadi yang terbatas. Tapi secara ini kita, ya visi kita ya tentu itu sudah berjalan juga gitu. Tapi memang tidak belum-belum secara totalitas lah ya. Nah hari ini sudah mulai bersemangat lah kawan-kawan juga. Karena memang sudah mulai ada kunjungan-kunjungan. Kalau kunjungan dari kementerian apa semua kita bawa ke situ. Itu juga sudah mulai, sudah mulai jalan. Terutama ya dari daerah yang sudah siap secara ini lah ya. Apa namanya, yang sudah punya bisa ada lebih aktif gitu ya. Seperti di Batu Kasah, kemudian juga di Pulau Setanau. Pulau Setanau itu malah ada kerjasama mereka dengan hotel NDR gitu. Tetangga-tetangga dive resort itu buat paket gitu sampai ke pulau situ. Karena yang punya tanah juga ada katanya pemilik NDR itu juga punya tanah situ. Sehingga dia buat paket sampai nginep di situ atau main-main ke pulau itu gitu. Nah ini juga tentu akan berdampak kepada harininya gitu. Itu sudah mulai jalan gitu.

	Secara fisik kita sudah mulai ini lah ya. Tapi visi besarnya adalah, tadi terkait dengan UGCP. Cita-citanya itu ya, cita-citanya adalah kita masuk di UGCP. Karena secara potensi kita punya, warisan biologi kita ada. Semua potensi ada. Cuma hari ini, itu tadi. Tantangan terbesarnya adalah masyarakat tadi. Harus betul-betul masyarakat. Karena memang ada penilai UGCP itu berat. Masyarakat ketika masyarakat itu lebih dominan dibandingkan dengan pengelola. Mereka datang nanti akan lebih ke masyarakat. Mereka akan tanya ke masyarakat, di jalan tau nggak itu apa UGCP? Di mana aja UGCP-nya? Itu apa barangnya? Ditanya seperti itu. Jadi masyarakat harus tahu itu. Brandingnya harus tahu gitu. Makanya hal terbesar tentang hal terbesar itu adalah mengelola masyarakat. Nah jadi masyarakat sudah menyadari bahwa masyarakat ini berpikir tentang konservasi. Maka mereka menjaga semuanya. Mereka juga memikirkan tentang punya pendidikan ekonomi. Dan juga misalnya edukasi.
Peneliti	Menurut Bapak, ada nggak aspek positif dari pengelolaan Geopark Natuna yang sudah berjalan selama ini?
Informan	Sudah. Karena kita kan keguguran salah satunya adalah sampai ke program Geopark tersebut. Sudah sampai ke sekolah-sekolah. Nah program-program itu kita jalankan dari kemarin. Sudah teman-teman dari BP malah masuk ke sekolah-sekolah memperkenalkan. Kita dorong sekolah-sekolah itu sudah membuat nama-nama kelas itu kayak dengan nama-nama biasa seperti itu. Dulu pernah kita libatkan juga Bapinsa. Kita libatkan untuk bagaimana Bapinsa itu kita perkenalkan. Kita kenalkan saja tentang Geopark. Artinya mereka nanti akan menjaga. Hari ini alhamdulillah itu berjalan. Artinya mereka diedukasi untuk besar masyarakat di lapangan. Karena Bapinsa itu kan selalu besar masyarakat di lapangan. Nah itu mengedukasi seperti itu. Berjalan. Hal-hal positif seperti itu ya sedikit sudah mulai nampak lah. Kemudian juga sudah mulai dikenal beberapa tempat. Di profesi mereka tahu bahwa kita sudah ada Geopark gitu kan. Ya tapi memang untuk mereka berkunjung dalam kedinasan itu sudah ini. Ada kebanyakan-banyakan lah mereka datangnya ke Natuna. Kemudian juga ada kemarin saya didatangi pengelola Zirah Suba. Mereka tahu memang turut-turut mereka dari banyak luar negeri. Ini ada beberapa dari 4 orang dari Swiss atau dari Polandia. Itu sudah diperkenalkan juga disampaikan ke situ. Dan mereka rata-rata tahu juga dari website, tahu juga dari ini. Karena memang kita

	dipungsi di jaring tadi sebenarnya. Di jaring antara kerjasama antar apa namanya. Geopark itu wajib itu di jaring. Jadi memang kita berhubungan dengan Batur Bali. Kemudian itu kita ada MoU. Batur Bali kita melakukan MoU. Kita melakukan MoU dengan Siloke. Padang gitu. Jadi kalau nanti ada apa namanya mereka mempromosikan kita juga.
Peneliti	Kemudian menurut Bapak model pengembangan Geopark seperti apa yang ideal untuk Geopark Natuna itu agar lebih efektif dan berkelanjutan kedepannya?
Informan	Yang model ideal ya? Karena model ideal memang harus melibatkan masyarakat. Nah ini model ideal. Model pengembangan geopark yang ideal untuk melibatkan masyarakat. Yang padahalnya bapaknya masyarakat. Karena pengelolaan Geopark ini tak bisa dari pandang. Harus dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang bekerja. Pemerintah ini nggak bisa. Seluruh totalitas masuk ke situ. Cuma sifatnya kan usaha pemerintah ini hanya sebagai stimulus saja. Hanya pendorong saja. Fasilitator saja. Nggak bisa terlibat terlalu jauh. Jadi kita dorong mereka ulang pendidikan mereka. Kemudian membantu saplas. Punya saplas sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi sebagai contoh. Sebenarnya memang masih banyak berpikir tentang sebuah geosite itu harus lengkap. Dengan pintu gerbang yang megah. Nggak begitu. Konsepnya cukup ada selamat datang. Dengan itu. Selamat datang di Geosite A. Di Geosite Pulau Setanau. Pulau Senua. Bentuknya ada penanda. Selain gitu. Selamat datang. Itu kan bisa saja dari papan, dari kayu-kayu. Ini yang mungkin dibikin secara ini. Nggak mesti juga. Mesti dibikin, bangun. Sampai ratusan juta untuk dibikin. Nggak. Jadi itu yang pemahamannya. Makanya lebih kepada pemerintah mereka memempahakan. Ketersediaan. Resource ada. Ini nggak perlu juga mereka pisah-pisahkan juga. Kalau konsepnya masih berpikir tentang begitunya, nggak jalan-jalan. Nah, tentang informasi. Informasi itu lebih kepada pemahaman mereka. Nanti bisa menjelaskan kepada tamu-tamu. Ini itu. Yang ideal itu adalah bagaimana mereka sendiri yang berkerja. Di bidang mereka sendiri yang menolong. Mereka sudah memperlima manfaatnya. Masalah pemerintah ini. Banyak kata resource-nya. Tentu didukung dengan semua-semua yang lain. Termasuk dari media didukung. Kemudian dari JSA juga masuk ke situ. Kemudian perguruan tinggi juga. Ketika mendukung mereka. Ada program-

	program tertentu. Jadi idealnya memang semua stakeholder itu bergerak. Dalam satu PC tadi. Yang dengan tujuan juga tadi. Edukasi, ekonomi, dan konservasi. Bagaimana bumi dijaga. Dan juga diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat di atasnya. Nah itu contohnya. Jadi dikelola oleh masyarakat sendiri. Idealnya seperti itu. Bukan kami. Bukan dari pemerintah yang hari ini terlibat di BPN. BPN gitu ya.
Peneliti	Kemudian bagaimana peran kemitraan publik sampai swasta dapat dioptimalkan dalam pengelolaan Geopark?
Informan	Ya. Kalau kemitraan publik ya. Ya. Hari ini kita sudah tidak bermitra dengan mereka. Sudah. Malah kami dengan pengelolaan Geopark itu ada MoU. Ada MoU. MuU nya itu bentuk-bentuk kerjasama yang kita bangun supaya mereka merasa bahwa kita tidak terlepas tangan. Kemudian juga bagaimana kami punya kewajiban untuk mengedukasi mereka. Nah jadi itu sudah. Sudah. Kemudian kita harus bangun di publik. Kalau di swasta sebenarnya. Kalau kemitraan-kemitraan di swasta. Pihak Bank juga ada masuk. Ada di situ. Memang sih. Contohnya ini, SMK Migas. SMK Migas juga banyak tuh yang bantu. Tapi memang itu terbatas tadi. Tidak semua mereka bisa tertentu. Mereka cuma bantu untuk beberapa tempat. Ada Kemitraan-kemitraan itu yang sebenarnya harus didorong. Didorong memang karena tidak semuanya juga. Karena idealnya seperti pengelolaan itu adalah orang swasta. Orang-orang bukan pemerintahan. Mereka nanti mencari dana sendiri. Makanya mereka juga bisa menerima hibah. Tapi ketika hibah, hibah dari mana pun boleh. CSR mana pun bisa. Cuma ketika dari pengelolanya adalah orang-orang pendang. BPGN-nya pendang. Lebih dari pendang. Ini kesulitan kita kalau ada hibah-hibah. Tidak boleh. Tidak bisa kita terima hibah. Tapi kita bangun dengan kemitraan tadi. Mereka langsung yang membangun. Bukan kita. Kita tidak menerima uang. Itu yang bentuk kemitraan-kemitraan itu. Nah gitu. Jadi, yang swasta ada. Kemudian juga yang mengenai masyarakat juga ada.
Peneliti	Kemudian ada tidak rekomendasi dari Bapak untuk mengatasi keterbatasan SDM, anggaran, akses, dan lainnya untuk Geopark Natuna?
Informan	Dari akses. Akses itu saya pikir., kami dari BP Geopark untuk berharap ini bisa didorong semua pihak, karena kita dilihat perbatasan. Dilihat perbatasan ini untuk membangun, menjaga perbatasan ini tidak dengan pengamanan saja. Tapi dengan salah

	satu konsep. Kesejahteraan, Prosperity. Artinya, tapi juga dari kesejahteraan salah satunya adalah. memanfaatkan potensi. Apa itu potensinya? Potensinya adalah Geopark. Konsep ini, nah ini keterlibatan semua pihak. Sebenarnya, didorong artinya pemerintah kalau ingin membangun. Membangun artinya, harus terlibat langsung. Artinya ada keputusan pemerintah dari provinsi mendorong. Atau tentunya kerja sama dengan daerah juga untuk mendatangkan, untuk membuka akses, membangun daerah-daerah itu. Tidak bisa dengan mengukur totalitas ekonomi sekarang ini. Sebagai contoh begini, kita membangun sekolah SMP. Itu ada 5 SD minimal. Membangun SMA. SMP harus minimum di tempat itu. Tapi untuk membangun daerah-daerah perbatasan. Tidak bisa. Harus ada diskresinya. Jadi, ya walaupun kita cuma 2 SMP. Atau 2 SMP, tapi kalau SMA. Contohnya ada 2. Kita membangun. Sekolah, SDLB, luar biasa, betul-betul khusus. Itu Kuliah Promisi, itu nggak bisa kalau kita lihat hari ini, apa namanya, secara ekonomi lain, merugi. Tidak bisa. Jadi harus dibangun juga. Itu yang terpaksa dibangun. Itu bentuk negara hadir. Nah, jadi artinya pertama, keterlibatan semua pihak, mulai dengan Promisi, Pusat, supaya menjaga masyarakat lain. Kalau masyarakat yang sejahtera, tentu masyarakat akan menjaga masyarakat lain, itu yang baik. Karena itu perbatasan. Perantakan eksternal yang salah satu adalah, jadi yang perbatasan adalah, kita berharap negara yang lebih maju, gitu kan mensejahtera seperti itu. Kalau anggaran, anggaran juga. Anggaran juga memang, anggaran hari ini, kami masih juga berharap, ya, Pusat juga bantu, gitu. Dan Promisi juga bantu. Nah, informasinya dulu, Promisi pasti bantu. Bantu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terlibat. Tentu juga sangat kandidatnya. Yang kita kaitkan dengan pernamanya Geopark, gitu kan. Membangun karena memang tidak bisa dibiarkan sendiri. Karena apa namanya, kalau hanya mengantarkan pemerintah sendiri, ya itu diberat di situ. Karena safras-safras ini tentu harus dibangun. Lepangan, kemudian ada poin-poin juga aksesibilitasnya, kita boleh jalan, kita bangun, sebagainya, lebih mudah, gitu kan. Tapi kan, pemerintah Pusat, Promisi, pemerintah Bandar Muda, sepertinya jadi RPDMN. Eh, RPDMN Promisi juga ada terkait dengan Geopark. Malah sekarang udah di RPJMN 2025-2029 juga ada tentang Geopark, gitu. Artinya, program itu dihukum penuh oleh pemerintah Pusat, malah pemerintah daerah, pemerintah daerah Promisi, dan kita
--	---

	juga. Nah, tapi memang tidak juga terlepas bahwa swasta juga boleh berkontribusi dalam membangun safras, dan sebagainya. Atau membuat pelatihan terhadap sumbernya manusia. SDM, kalau kami untuk menghadapi kesulitan terkait dengan telangga ahli. Tenaga ahli itu contohnya adalah orang-orang yang pakar terkait dengan Geopark ini. Nah, secara umum ya, ada beberapa. Nah, ini ya, kami kesulitan dalam menghayal orang. Karena ya, tadi, ada belombong anggaran, yang kedua, kasetidikitas. Orang itu ya, dia datang sini, setelah itu hanya 2-3-4 hari pulang. Tapi kalau penerbangan seperti ini, nanti mereka akan berpikir kita untuk masuk ke negara. Itu tantangan juga. Nah, tapi, kita harusnya keras deh itu. Nah, yang kedua, sudah ditanggalkan juga. Nah, yang kedua, SDM tadi, kami mempertahankan SDM-SDM kami, kita yang ada di Natura, yang gak tentu punya pendidikannya Geologi, itu kita dibatalkan langsung. Itu salah satu keterbatasannya seperti itu. Kita tolong, kita paksa, paksakan mereka masuk di divisi geologi. Kemudian, mereka yang mengerti tentang telekomunikasi atau promosi yang kita masukkan, mereka dipaham tentang media-media, apa namanya, di bidang informasi dan branding-branding seperti itu. Nah, ada di divisinya. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian, keterbatasan SDM pengelola di lapangan. Nah, itu tadi kita pake kolaborasi juga dengan antara teman-teman yang pernah terlibat di Bunda Ecapo, semuanya dipaksakan untuk, setidaknya dipaksakan lah itu, untuk berani mengelola itu. Nah, kita dorong, makanya kemarin kita bawa mereka ke celetub supaya mereka memahami, oh, begini loh bentuk pengelolaannya. Enggak terlalu sulit, gitu? Enggak. Jadi, bagaimana? Supaya potensinya ada. Ya, tinggal di eksplorasi aja gitu, contoh punya silat, silatnya ada, tinggal di eksplor. Nah, mungkin nanti kita dorong juga untuk pengadaan musiknya, gitu. Nah, ini yang di SDM tadi kita kelola dengan sumber daya yang ada, kita sedikit agak memaksa lah bahwa mereka juga harus terlibat, sesuai dengan tujuan awal.
Peneliti	Kemudian bagaimana Geopark Natuna ini dapat lebih berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan juga pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan?
Informan	Ya, langkah-langkahnya pasti, kalau Geopark. Dari awal Geopark itu punya tujuan pelestarian konservasi dan lainnya. Untuk Geopark, kalau dikelola dengan betul pasti berkompetensi karena kan gak jalan Geopark kalau gak identik dengan konservasi.

	Kemudian gak jalan. Dan Geopark itu gak sampai tujuannya kalau tidak berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Nah, itu hari ini secara umum memang semuanya belum. Ada beberapa tempat belum. Nah, belum musuh di tempat itu. Contohnya di Tanjung Datuk. Tapi kan konsep pengembangan Geopark itu yang sedang kita kongsikan adalah bahwa itu sifatnya bukan parsial-parsial tapi dia menyeluruh. Jadi artinya ketika orang datang berkunjung melihat Geosite di apa namanya di Tanjung Datuk, nah itu kan dia tinggal di hotel-hotel di sekitar kita. Itu pasti ada kontribusinya hotel kita. Hotel secara ini di itu pasti hotelnya kemudian tentu Geoproduct dibeli. Contohnya mereka akan lihat kemudian mereka melihat yang di sebelah kanan, kemudian juga bisa jadi kostum-kostum tentang apa namanya itu yang dibawa oleh Pak Nayel itu kan, itu juga contohnya. Jadi secara langsung diraih sekitarnya belum, tapi memang sudah masuk ke Natuna umum sudah. Jadi karena kan rata-rata kan rata-ratanya tinggal di sini, transportasinya juga terdampak. Usaha-usaha seperti itu yang pasti terdampak sih. Berkontribusi pasti pada bidang ekonomi, kemudian juga konservasi, terus ada edukasi. Sudah wajib, wajib pokoknya itu konservasi. Karena nggak mungkin Geopark itu berjalan dengan begini kalau konservasinya juga nggak berjalan. Jadi wajib pokoknya karena itu identik Geopark itu identik dengan konservasi. Tadi saya ulang lagi, Pak. Dia menjaga lingkungan, pokoknya mesejahterakan masyarakat di atasnya. Itu konsepnya. Jadi tidak hanya sebatas eksplorasi ekonomi, tapi konservasinya nggak jalan. Makanya kita juga diperlukan orang juga untuk mengeluh, kita jaga orang-orang kembali. Kemudian juga apa namanya? Karena mengeluh itu kan kita ini nggak mudah rusak. Karena itu adalah kebiasaan orang untuk buat kayu bakar. Kayu bakar itu dari bakau. Itu adalah pelaku yang tidak baik. Kemudian juga ada pembangunan yang mungkin ya tadi yang masyarakat nggak paham. Itu dulu, ya dulu. Nah sekarang ini kita dalam pembangunan. Banyak terlibat yang itu. Bukan kita yang tidak jadi juga terlibat, malah jadi badan konservasi itu juga terlibat dalam pembangunan. Kita juga boleh lakukan itu. Nah itu sudah pasti, secara positifnya terhadap apa namanya? Itu sudah pasti. Karena kami juga mendorong anak-anak untuk terlibat langsung dalam menjaga apa namanya? Menjaga konservasi kekayaan-kekayaan kita yang ada di BNI HLT, Biodiversity, maupun Culture, maupun juga geodiversity.
--	---

Lampiran 2 hasil olah data NVIVO

Nodes				
Name	Files	References	Created On	
Penentuan Wilayah		3	4	26/07/2025 14.05
Wilayah Administratif		1	1	26/07/2025 14.06
Area Geosite		3	3	26/07/2025 14.06
Lingkup Sosial & Pemerintahan		2	2	26/07/2025 14.06
Pemangku Kepentingan		4	4	26/07/2025 14.06
Pemerintah Daerah		4	4	26/07/2025 14.08
Dinas Pariwisata		1	1	26/07/2025 14.09
BP3D		1	1	26/07/2025 14.09
Sekretaris Daerah		1	1	26/07/2025 14.09
Forum Geopark		2	2	26/07/2025 14.21
BPGN		1	1	26/07/2025 14.21
NGYF		1	1	26/07/2025 14.22
Masyarakat Lokal		1	1	26/07/2025 14.22
Pengelola Lapangan		1	1	26/07/2025 14.22
Mitra Eksternal		1	1	26/07/2025 14.23
STAI		1	1	26/07/2025 14.24
BPGK		1	1	26/07/2025 14.24
Pengembangan Alat Pemetaan		5	7	26/07/2025 14.24

Nodes				
Name	Files	References	Created On	
Pengembangan Alat Pemetaan		5	7	26/07/2025 14.24
Struktur dan Fungsi Organisasi		3	3	26/07/2025 14.25
SK Pengurus		2	2	26/07/2025 14.25
Pembagian Peran		2	2	26/07/2025 14.25
Strategi Koordinasi dan Komunikasi		3	3	26/07/2025 14.26
Antar OPD		2	2	26/07/2025 14.26
Internal BPGN atau NYGF		2	2	26/07/2025 14.27
Regulasi Pendukung		3	3	26/07/2025 14.28
MoU		2	2	26/07/2025 14.28
Pemetaan Pengaruh		4	5	26/07/2025 14.30
Key Players Dampak Tinggi Minat Tinggi		2	2	26/07/2025 14.30
Keep Satisfied Dampak Tinggi Minat Rendah		1	1	26/07/2025 14.30
Keep Informed Dampak Rendah Minat Tinggi		1	1	26/07/2025 14.32
Monitor Only Dampak Rendah Minat Rendah		1	1	26/07/2025 14.33
Strategi Keterlibatan		4	4	26/07/2025 14.33

Files				
Name	Codes	References	Modified On	
BP3D Kabupaten Natuna (Wakil Ketua 1 BPGN)		15	17	26/07/2025 13.58
KABAG Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna		8	9	26/07/2025 13.59
Kepala Dinas Pariwisata		14	14	26/07/2025 13.59
Ketua NYGF		9	9	26/07/2025 13.59
Masyarakat (Pengelola Geosite)		6	6	26/07/2025 13.59
MoU BPGN dan BPGK		5	5	26/07/2025 14.02
MoU BPGN dan STAI Natuna		0	0	26/07/2025 14.01
Sekretaris BPGN		14	15	26/07/2025 14.00
SK BUPATI PENGURUS BPGN		6	6	26/07/2025 14.01

Lampiran 3 dokumentasi wawancara/turun lapangan



Wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna/Wakil Ketua 2

BPGN



Wawancara bersama Kepala Dinas BP3D Kabupaten Natuna/Wakil Ketua 1

BPGN



Wawancara bersama Sekretaris 2 BPGN



Wawancara bersama Ketua NGYF



Wawancara Bersama Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat



Wawancara bersama masyarakat lokal/pengelola geosite



Dokumentasi survei lokasi

Lampiran 4 surat rekomendasi penelitian dari fakultas

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	
	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124 Telepon (0771) 4500089 Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Laman: http://fisip.umrah.ac.id Posel email: fisip@umrah.ac.id	
Nomor	: 2051/UN53.5/TU/2025	26 Juni 2025
Hal	: Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian	
 Yth. Ketua Badan Pengelola Geopark Nasional Kabupaten Natuna		
 Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami.		
Nama	: Ainul Nurmadiyah	
NIM	: 2105020010	
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara	
Jenjang	: Strata Satu (S1)	
Alamat	: Tanjungpinang Timur, Perum. Bukit Raya, Gg. Sangiang, No 32	
Nomor Handphone	: 087888427440	
Judul Penelitian/Skripsi	: "Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna"	
 Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
  Assist. Prof. Dr. Siti Arieta, S.H., M.A. NIP. 198304062015042002		

Lampiran 5 surat keterangan selesai penelitian



Nomor : 028/SET-BPGN/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin dan Rekomendasi Penelitian

Ranai, 4 Juli 2025

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

di
Tempat

Salam Geopark!

Menindaklanjuti surat nomor 2051/UN53.5/TU/2025 tanggal 26 Juni 2025, Perihal Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian atas nama **Ainul Nurmadiyah** dengan judul "Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna", bersama ini kami memberikan Ijin dan Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswa yang dimaksud. Adapun pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, sopan santun, dan tidak mengganggu kegiatan pelayanan atau pembelajaran yang sedang berlangsung.
2. Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.
3. Setelah selesai, peneliti diwajibkan menyampaikan **laporan hasil penelitian** dan/atau **salinan skripsi** kepada BPGN Natuna.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. KETUA UMUM BPGN NATUNA
KETUA HARIAN

J. BASRI, M.Si

**BADAN PENGELOLA
GEOPARK NASIONAL NATUNA**

Jln: DKWM Benteng Komplek NGU www.geoparknatuna.com
@geoparknatuna natunageopark2018@gmail.com

Lampiran 6 SK penetapan dosen pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dompok Telp. 0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : sisip@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 160/UN53.5/HK.04/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI NOMOR: 7144/UN53.5/HK.00/2024
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian dosen pembimbing dan judul Usulan Penelitian mahasiswa atas nama Ainul Nurmadiyah NIM : 2105020010 Program Studi Ilmu Administrasi Negara
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
NOMOR : 160/UN53.5/HK.04/2025 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
7 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
8 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/HK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan : Penunjukan Perubahan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dari Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI NOMOR: 7144/UN53.5/HK.00/2024 TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
- KESATU : Menetapkan Perubahan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian), kualitas data, dan analisis data;
- KETIGA : Pembimbing Pendamping bertugas membimbing tata kelola referensi, sistematika penulisan, dan orisinalitas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 14 Januari 2025



Dekan,

SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Penguji Skripsi
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM
RAJA ALI HAJI NOMOR : 160/UN53.5/HK.04/2025
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN

Nomor : 160/UN53.5/HK.04/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

PERUBAHAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SESUDAH PERUBAHAN						
NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN / SKRIPSI	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Ainul Nurmadiyah	2105020010	Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Chaerrey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P
SEBELUM PERUBAHAN						
1	IAN	Ainul Nurmadiyah	2105020010	Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Chaerrey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P



Dekan,

SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

Lampiran 7 SK penetapan dewan penguji usulan proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dompok Telp. 0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fisisip@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 1281/UN53.5/HK.04/2025

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI

UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang : a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelayakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
7. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pegangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/HK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Penguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta teknik penulisannya;
- KETIGA : Anggota 1 (satu) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Usulan Penelitian, Pendahuluan, Metode Penelitian, dan Lampiran;
- KEEMPAT : Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Refrensi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 05 Mei 2025

DEKAN,



SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Penguji Seminar
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR : 1281/UN53.5/HK.04/2025
Pada Tanggal 05 Mei 2025

**DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGUJI	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Kurnia Zaharatul Aini	2105020012	Bibliometrik Review Of Self-Determination Theory	Ketua	Assist. Prof. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP.
					Anggota 1	Assist. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.
					Anggota 2	Assist. Prof. Firman, ST., M.A.P
2	IAN	Marsaulina	2105020052	Kritik Jorgen Habermas Terhadap Program Makan Bergizi Gratis: Studi Komunikasi Kebijakan	Ketua	Assist. Prof. Chaeray Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P
					Anggota 1	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 2	Assist. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.
3	IAN	Ivana Devita Manik	2105020047	Kebijakan Pelarangan Impor Barang Bekas Di Kota Batam : Pertarungan Kelompok Kepentingan	Ketua	Assist. Prof. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP.
					Anggota 1	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 2	Assist. Prof. Firman, ST., M.A.P
4	IAN	Aimul Nurmadiyah	2105020010	Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna	Ketua	Assist. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.
					Anggota 1	Assist. Prof. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP.
					Anggota 2	Assist. Prof. Chaeray Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P
5	IAN	Abdur Rahman Al Haz	2105020032	Pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove di Desa Berakit dengan Pendekatan Quadruple Helix Collaboration	Ketua	Assist. Prof. Chaeray Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P
					Anggota 1	Assist. Prof. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP.
					Anggota 2	Assist. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.
6	IAN	Ewi Suryani	2105020040	Pengaruh Kelompok Usaha Bersama Terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan	Ketua	Assist. Prof. Chaeray Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P
					Anggota 1	Assist. Prof. Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Assist. Prof. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP.
7	IAN	Vini Suri Liandrainy	2105020027	Analisis Responsivitas Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang	Ketua	Assist. Prof. Firman, ST., M.A.P
					Anggota 1	Assist. Prof. Wahjoe Pangestoeti, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Assist. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.



DEKAN,

SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

Lampiran 8 SK penetapan dewan penguji sidang skripsi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fsip@umrah.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 3869/UN53.5/HK.04/2025
TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

- Menimbang :**
- bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepadanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian
 - bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen penguji skripsi.
 - bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/HK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan :**
- Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
- KESATU :** Menetapkan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua Penguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Skripsi beserta teknik penulisannya;
- KETIGA :** Anggota 1 (satu) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Sistematika dan Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian;
- KEEMPAT :** Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Refrensi, dan Lampiran;
- KELIMA :** Anggota 3 (tiga) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Sistematika dan Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian;
- KEENAM :** Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Diskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Refrensi, dan Lampiran;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
05 Desember 2025



DEKAN,
SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- Yth. Tim Penguji Skripsi
- Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN
SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
Tanggal : 05 Desember 2025

DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	JABATAN	DEWAN PENGUJI
1	IAN	Ainul Nurmadiyah	2105020010	Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna	Ketua	Assoc. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.
					Anggota 1	Assist. Prof. Dr. Dian Prima Safitri, S.AP., M.A.P.
					Anggota 2	Assist. Prof. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P.
					Anggota 3	Lecture. Reza Gemilang, S.Si., M.A.B.
					Anggota 4	Assist. Prof. Dedy Afrizal, S.Sos., M.Si., Ph.d.
2	IAN	Abdur Rahman Al Haz	2105020032	Pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove di Desa Berakit dengan Pendekatan Quadruple Helix Collaboration	Ketua	Assist. Prof. Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P.
					Anggota 1	Assist. Prof. Dr. Dian Prima Safitri, S.AP., M.A.P.
					Anggota 2	Assoc. Prof. Dr. Wayu Eko Yudiantmaja, S.IP., MPA.
					Anggota 3	Assoc. Prof. Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Assist. Prof. Okky Rizki Azizi, M.A.P.


 DEKAN,

 SAYED FAUZAN RIYADI
 NIP. 198207072015041002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Ainul Nurmadiyah, lahir di Tanjungpinang 14 Juni 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Ibu Rosmawati dan Bapak Bustamam. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur pada tahun 2009-2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Midai pada tahun 2015-2018, selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Midai pada tahun 2018-2021. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara, di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021. Penulis juga aktif dalam organisasi internal kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMANEGARA), UKM Research And Dedication (REACTION) Fisip Umrah, dan Forum Mahasiswa Kip Kuliah. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Geopark Natuna”, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.